



**STUDI KOMPARATIF PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT
KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI SUMATERA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-2 Pada
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi**

Oleh:

**TITA WIDYA UTARI
NIM.P2C123016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari ternyata ditemui hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini maka saya bersedia menerima sanksi hingga pencabutan gelar akademis.



Jambi, Mei 2025
Yang menyatakan,


TITA WIDYA UTARI

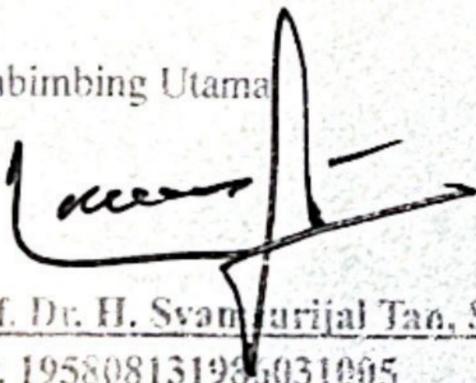
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini pembimbing tesis menyatakan bahwa tesis yang disusun oleh :

Nama : TITA WIDYA UTARI
Nim : P2C123016
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera

Telah layak dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tesis pada tanggal yang telah ditentukan.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Syamurrijal Tan, S.E. M.A
NIP. 195808131983031005

Jambi, Mei 2025
Pembimbing Pendamping,



Dr. Candra Mustika, SE, M.Si
NIP. 198305142006041002

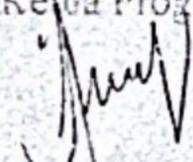
TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM

Dengan ini Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jambi, menyatakan bahwa :

Nama : TITA WIDYA UTARI
Nim : P2C123016
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat
Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera

Telah layak dan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan
keuangan, untuk mengikuti ujian tesis.

Jambi Mei 2025
Ketua Program,


Dr. Hj. Endang Aniyati, SE, M.Si
NIP. 196807091993032002

TANDA PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera" telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Pada :

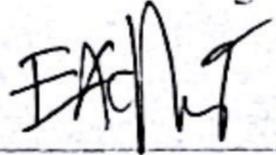
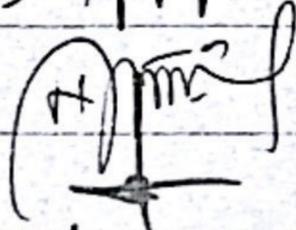
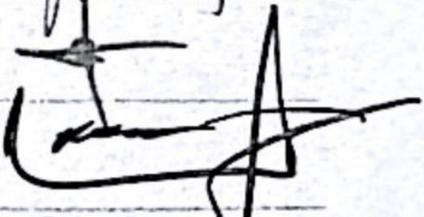
Hari : Jumat

Tanggal : 25 April 2025

Jam : 15.00 – 17.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Program Magister Ilmu Ekonomi PPs-UNJA

TIM PENGUJI

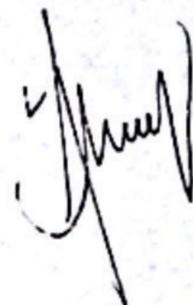
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Hj. Erni Achmad, S.E, M.Si	
2. Sekretaris	: Dr. Nurhayani, S.E., M.Si	
3. Penguji Utama	: Dr. Siti Hadijah, S.E., M.Si	
4. Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E. M.A	
5. Pembimbing II	: Dr. Candra Mustika, S.E.,M.Si.	

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi



Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si
NIP.196607011990032002

Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Jambi



Dr. Etik Umivati, S.E.,M.Si.
NIP.196807091993032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera”.

Dalam proses penyelesaian Tesis ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan Tesis, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Alm. H. Muhammad dan Rosniati yang telah berjasa dalam segala hal. Serta Suami R. Abdul Jabbar, S.IP.,M.M yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada penulis, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H Rektor Universitas Jambi yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Univeristas Jambi.
3. Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Dr. Hj. Etik Umiyati, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi.
5. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E. M.A selaku Pembimbing Utama dan Dr. Candra Mustika, SE, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pada Program Magister Ilmu Ekonomi yang telah dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta memberikan pelayanan adminitrasi dalam memperlancar pengurusan perkuliahan.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Jambi Angkatan tahun 2023 yang selalu memberi support dan

semangat.

8. Semua teman-teman serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebaikan, perhatian, bantuan, kritik, dan sarannya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan dan memberikan kemudahan kepada bapak, ibu dan teman-teman sekalian, amin.

Akhir kata, tiada karya manusia yang sempurna karena keterbatas dan kesanggupannya, penulis menyadari tesis ini mempunyai kekurangan dan kelebihan baik dalam penyajian maupun dalam tuntutan ilmiahnya, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Mei 2025



TITA WIDYA UTARI
NIM. P2C123016

Lampiran 1 Tabulasi Data

No	Wilayah	Tahun	Belanja Modal (Rp. Ribu)	Pendidikan (Tahun)	Investasi (Rp. Miliar)	Ekspor Netto (US\$ Juta)	Pertumbuhan Eko Nomi (%)	Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran (%)
1	Aceh	2019	3.161.488.624	9,59	3.607	186,4	4,14	15,32	6,17
		2020	1.755.472.079	9,71	8.241	174,1	-0,37	14,99	6,59
		2021	3.319.367.168	9,77	7.905	383,8	2,81	15,33	6,3
		2022	2.868.705.757	9,79	4.424	624,6	4,21	14,64	6,17
		2023	1.718.549.130	9,89	8.883	461,3	4,23	14,45	6,03
2	Sumatera Utara	2019	1.249.600.484	9,71	19.749	3.132,8	5,22	8,83	5,41
		2020	1.497.944.969	9,83	18.190	4.104,5	-1,07	8,75	6,91
		2021	1.145.566.552	9,88	18.485	6.759,0	2,61	9,01	6,33
		2022	1.775.917.392	9,99	22.789	6.788,9	4,73	8,42	6,16
		2023	3.271.597.642	10,07	21.574	3.340,5	5,01	8,15	5,89
3	Sumatera Barat	2019	1.062.230.453	9,22	3.027	139,0	5,01	6,42	5,38
		2020	736.888.361	9,34	3.106	216,0	-1,61	6,28	6,88
		2021	836.913.147	9,46	4.184	276,7	3,29	6,63	6,52
		2022	941.069.948	9,51	2.560	174,1	4,36	5,92	6,28
		2023	1.037.235.695	9,59	4.488	132,7	4,62	5,95	5,94
4	Riau	2019	1.161.037.469	9,35	26.292	10.986,3	2,81	7,08	5,97
		2020	919.245.594	9,47	34.118	12.490,4	-1,13	6,82	6,32
		2021	979.270.772	9,52	24.998	18.090,3	3,36	7,12	4,42
		2022	1.508.534.414	9,54	43.062	19.556,8	4,55	6,78	4,37
		2023	2.256.371.169	9,6	48.243	23.877,6	4,21	6,68	4,23
5	Jambi	2019	866.500.806	8,86	4.437	2.086,9	4,35	7,6	4,06
		2020	642.696.111	8,97	3.512	984,3	-0,51	7,58	5,13
		2021	261.411.153	9,03	6.204	2.299,3	3,7	8,09	5,09
		2022	906.797.776	9,07	8.883	2.621,8	5,12	7,62	4,59
		2023	910.534.045	9,16	8.939	1.406,7	4,67	7,58	4,53
6	Sumatera Selatan	2019	1.652.396.195	8,6	16.921	3.547,7	5,69	12,71	4,53
		2020	1.664.700.767	8,68	15.825	2.663,7	-0,11	12,66	5,51
		2021	1.954.307.419	8,78	16.267	4.334,7	3,58	12,84	4,98
		2022	1.513.814.504	8,82	23.526	6.669,6	5,24	11,9	4,63
		2023	1.288.129.124	8,9	25.602	5.420,5	5,08	11,78	4,11
7	Bengkulu	2019	741.823.064	9,08	5.458	483,9	4,94	15,23	3,26
		2020	417.095.645	9,2	5.399	935,4	-0,02	15,03	4,07
		2021	425.832.852	9,26	4.924	949,6	3,27	15,22	3,65
		2022	417.048.457	9,28	6.957	913,7	4,31	14,62	3,59
		2023	544.306.198	9,35	7.219	1.164,4	4,28	14,04	3,42
8	Lampung	2019	1.013.880.674	8,36	2.429	71,1	5,26	12,62	4,03

No	Wilayah	Tahun	Belanja Modal (Rp. Ribu)	Pendidikan (Tahun)	Investasi (Rp. Miliar)	Ekspor Netto (US\$ Juta)	Pertumbuhan Eko Nomi (%)	Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran (%)
		2020	752.528.210	8,51	7.121	1.801,0	-1,66	12,34	4,67
		2021	828.810.711	8,56	10.513	2.627,0	2,77	12,62	4,69
		2022	1.025.325.883	8,61	5.809	3.067,0	4,28	11,57	4,52
		2023	1.250.016.556	8,72	7.626	2.481,8	4,55	11,11	4,23
9	Kep. Bangka Belitung	2019	441.201.204	8,35	2.915	1.435,3	3,32	4,62	3,62
		2020	436.502.108	8,49	1.864	1.276,5	-2,29	4,53	5,25
		2021	641.639.965	8,54	3.677	2.637,9	5,05	4,9	5,03
		2022	354.008.246	8,57	6.309	2.565,1	4,4	4,45	4,77
		2023	491.999.213	8,66	7.961	2.015,2	4,38	4,52	4,56
10	Kep. Riau	2019	634.501.179	10,13	5.656	2.024,4	4,83	5,8	7,5
		2020	586.608.799	10,22	14.249	687,9	-3,8	6,13	10,34
		2021	347.953.458	10,38	9.769	1.541,3	3,43	5,75	9,91
		2022	552.161.762	10,46	4.817	2.909,0	5,06	6,03	8,23
		2023	581.565.470	10,52	8.857	1.143,3	5,16	5,69	6,80

Lampiran 2 Hasil Regresi Data Panel

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.788964	(9,36)	0.6281
Cross-section Chi-square	9.000987	9	0.4372

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.919206	4	0.1402

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/10/25 Time: 14:03

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 50

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	3.247260 (0.0715)	159.0282 (0.0000)	162.2754 (0.0000)
Honda	-1.802016 (0.9642)	12.61064 (0.0000)	7.642850 (0.0000)
King-Wu	-1.802016 (0.9642)	12.61064 (0.0000)	9.493106 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	159.0282 (0.0000)

Dependent Variable: PE?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:25
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	3.43E-09	6.96E-10	4.926204	0.0000
PD?	0.062536	0.039141	1.597715	0.1170
I?	4.50E-05	5.10E-05	0.882177	0.3823
EN?	-0.000408	7.67E-05	-5.319976	0.0000
R-squared	0.763416	Mean dependent var		3.600000
Adjusted R-squared	0.747987	S.D. dependent var		1.511858
S.E. of regression	0.758967	Akaike info criterion		2.362901
Sum squared resid	26.49742	Schwarz criterion		2.515863
Log likelihood	-55.07253	Hannan-Quinn criter.		2.421150
Durbin-Watson stat	0.536606			

Dependent Variable: PE?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/25 Time: 14:27
Sample: 2019 2023
Included observations: 5
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.031810	1.825171	0.565323	0.5754
BM?	8.59E-11	4.36E-10	0.196886	0.8450
PD?	0.210317	0.191873	1.096123	0.2803
I?	6.79E-05	3.71E-05	1.828510	0.0758
EN?	-8.40E-05	7.73E-05	-1.085797	0.2848
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-1.991485			
_SUMATERAUTAR				
A--C	-2.184844			
_SUMATERABARA				
T--C	-0.228431			
_RIAU--C	-0.082935			
_JAMBI--C	0.658373			
_SUMATERASELAT				
AN--C	0.613709			
_BENGKULU--C	0.879406			
_LAMPUNG--C	0.862120			
_KEPBANGKABELI				
TUNG--C	0.686696			
_KEPRIAU--C	0.787390			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.981492	Mean dependent var	3.600000
Adjusted R-squared	0.974809	S.D. dependent var	1.511858
S.E. of regression	0.239959	Akaike info criterion	0.214802
Sum squared resid	2.072898	Schwarz criterion	0.750168
Log likelihood	8.629953	Hannan-Quinn criter.	0.418672
F-statistic	146.8540	Durbin-Watson stat	1.690593
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: PE?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/10/25 Time: 14:28
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.180814	1.540718	1.415453	0.1638
BM?	1.10E-09	3.17E-10	3.460850	0.0012
PD?	0.446805	0.173326	2.577839	0.0133
I?	9.31E-05	3.18E-05	2.930093	0.0053
EN?	0.000213	5.98E-05	3.565423	0.0009
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-1.108848			
_SUMATERAUTARA--C	-1.533410			
_SUMATERABARAT--C	0.214986			
_RIAU--C	0.237326			
_JAMBI--C	0.829531			
_SUMATERASELATAN--C	0.729145			
_BENGKULU--C	0.589334			
_LAMPUNG--C	0.201886			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.048827			
_KEPRIAU--C	-0.111123			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.438182	0.7693
Idiosyncratic random			0.239959	0.2307
Weighted Statistics				
R-squared	0.533522	Mean dependent var	0.856352	
Adjusted R-squared	0.492057	S.D. dependent var	0.428072	
S.E. of regression	0.305088	Sum squared resid	4.188535	
F-statistic	12.86688	Durbin-Watson stat	1.106254	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.711519	Mean dependent var	3.600000	
Sum squared resid	32.30982	Durbin-Watson stat	0.143411	

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	481.195278	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.912854	9	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.483099	4	0.4805

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/10/25 Time: 15:03

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 50

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	74.03485 (0.0000)	1.502329 (0.2203)	75.53718 (0.0000)
Honda	8.604351 (0.0000)	-1.225695 (0.8898)	5.217497 (0.0000)
King-Wu	8.604351 (0.0000)	-1.225695 (0.8898)	3.752995 (0.0001)
GHM	-- --	-- --	74.03485 (0.0000)

Dependent Variable: TK?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 15:00
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-1.00E-08	1.60E-09	-6.252221	0.0000
PD?	2.049130	0.090107	22.74109	0.0000
I?	-0.000214	0.000117	-1.823423	0.0747
EN?	0.001210	0.000177	6.852359	0.0000
R-squared	0.785430	Mean dependent var		9.480000
Adjusted R-squared	0.771436	S.D. dependent var		3.654687
S.E. of regression	1.747244	Akaike info criterion		4.030575
Sum squared resid	140.4317	Schwarz criterion		4.183537
Log likelihood	-96.76438	Hannan-Quinn criter.		4.088824
Durbin-Watson stat	0.724640			

Dependent Variable: TK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/25 Time: 14:33
Sample: 2019 2023
Included observations: 5
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.55112	2.694573	4.657924	0.0000
BM?	-9.76E-10	6.44E-10	-1.514135	0.1387
PD?	-0.194326	0.283271	-0.686007	0.4971
I?	-3.14E-05	5.48E-05	-0.572972	0.5702
EN?	6.67E-05	0.000114	0.584290	0.5627
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	4.503066			
_SUMATERAUTARA--C	4.347590			
_SUMATERABARAT--C	2.878816			
_RIAU--C	1.825776			
_JAMBI--C	-1.224038			
_SUMATERASELATAN--C	-1.717330			
_BENGKULU--C	-2.313676			
_LAMPUNG--C	-2.643424			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-2.769973			
_KEPRIAU--C	-2.886808			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.993097	Mean dependent var	9.480000	
Adjusted R-squared	0.990604	S.D. dependent var	3.654687	
S.E. of regression	0.354262	Akaike info criterion	0.993935	
Sum squared resid	4.518050	Schwarz criterion	1.529301	
Log likelihood	-10.84836	Hannan-Quinn criter.	1.197805	
F-statistic	398.3786	Durbin-Watson stat	1.435538	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: TK?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/10/25 Time: 14:34
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.89580	2.322055	8.998839	0.0000
BM?	-3.73E-09	4.82E-10	-7.738765	0.0000
PD?	-0.778082	0.259403	-2.999512	0.0044
I?	-0.000116	4.80E-05	-2.410139	0.0201
EN?	-0.000427	9.14E-05	-4.671553	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	2.118052			
_SUMATERAUTARA--C	2.617267			
_SUMATERABARAT--C	1.495690			
_RIAU--C	0.821163			
_JAMBI--C	-1.778034			
_SUMATERASELATAN--C	-2.073321			
_BENGKULU--C	-1.595214			
_LAMPUNG--C	-0.792237			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.616966			
_KEPRIAU--C	-0.196401			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.725084	0.8073
Idiosyncratic random			0.354262	0.1927
Weighted Statistics				
R-squared	0.596486	Mean dependent var	2.023634	
Adjusted R-squared	0.560618	S.D. dependent var	0.847172	
S.E. of regression	0.561555	Sum squared resid	14.19050	
F-statistic	16.63008	Durbin-Watson stat	0.859020	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.775813	Mean dependent var	9.480000	
Sum squared resid	146.7260	Durbin-Watson stat	0.083080	

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.801245	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.095536	9	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.328461	4	0.3634

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/10/25 Time: 20:03

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 50

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	24.05936 (0.0000)	5.270551 (0.0217)	29.32991 (0.0000)
Honda	4.905034 (0.0000)	2.295768 (0.0108)	5.091736 (0.0000)
King-Wu	4.905034 (0.0000)	2.295768 (0.0108)	4.631018 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	29.32991 (0.0000)

Dependent Variable: TP?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:36
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-3.43E-09	8.88E-10	-3.859224	0.0004
PD?	0.973032	0.049945	19.48226	0.0000
I?	-0.000115	6.51E-05	-1.762337	0.0847
EN?	0.000450	9.79E-05	4.600612	0.0000
R-squared	0.601695	Mean dependent var		5.440000
Adjusted R-squared	0.575718	S.D. dependent var		1.486813
S.E. of regression	0.968464	Akaike info criterion		2.850407
Sum squared resid	43.14442	Schwarz criterion		3.003369
Log likelihood	-67.26018	Hannan-Quinn criter.		2.908656
Durbin-Watson stat	0.463433			

Dependent Variable: TP?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/10/25 Time: 14:37
Sample: 2019 2023
Included observations: 5
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.32347	2.895423	7.019173	0.0000
BM?	-1.51E-09	6.92E-10	-2.183999	0.0356
PD?	-1.386942	0.304385	-4.556535	0.0001
I?	-0.000105	5.89E-05	-1.780580	0.0834
EN?	0.000301	0.000123	2.456430	0.0190
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	0.697116			
_SUMATERAUTARA--C	-0.045958			
_SUMATERABARAT--C	-0.670352			
_RIAU--C	-0.455606			
_JAMBI--C	-1.253621			
_SUMATERASELATAN--C	-1.142895			
_BENGKULU--C	0.607256			
_LAMPUNG--C	0.962959			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.783562			
_KEPRIAU--C	0.517539			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.951840	Mean dependent var	5.440000
Adjusted R-squared	0.934449	S.D. dependent var	1.486813
S.E. of regression	0.380668	Akaike info criterion	1.137717
Sum squared resid	5.216689	Schwarz criterion	1.673083
Log likelihood	-14.44292	Hannan-Quinn criter.	1.341588
F-statistic	54.73143	Durbin-Watson stat	2.481086
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: TP?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/10/25 Time: 14:38
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.47213	2.390212	7.728238	0.0000
BM?	-1.23E-09	4.88E-10	-2.528232	0.0150
PD?	-1.237230	0.270709	-4.570330	0.0000
I?	-6.71E-05	4.91E-05	-1.366249	0.1786
EN?	-0.000212	9.12E-05	-2.328561	0.0244
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	1.028116			
_SUMATERAUTARA--C	0.202317			
_SUMATERABARAT--C	-0.412240			
_RIAU--C	-0.256514			
_JAMBI--C	-1.039358			
_SUMATERASELATAN--C	-0.957903			
_BENGKULU--C	0.443859			
_LAMPUNG--C	0.519309			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.301602			
_KEPRIAU--C	0.170811			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.618458	0.7252
Idiosyncratic random			0.380668	0.2748
Weighted Statistics				
R-squared	0.597809	Mean dependent var		1.443744
Adjusted R-squared	0.562059	S.D. dependent var		0.594136
S.E. of regression	0.393182	Sum squared resid		6.956659
F-statistic	16.72178	Durbin-Watson stat		1.759434
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.741202	Mean dependent var		5.440000
Sum squared resid	28.03301	Durbin-Watson stat		0.436620

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Adisti, A. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1998-2008*. Universitas Andalas.
- Aluthge, C., Jibir, A., & Abdu, M. (2021). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria, 1970-2019. *Central Bank of Nigeria Journal of Applied Statistics*, 12(No. 1), 139–174. <https://doi.org/10.33429/cjas.12121.6/6>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Amar, S., Satrianto, A., Ariusni, & Kurniadi, A. P. (2022). Determination of Poverty, Unemployment, Economic Growth, and Investment in West Sumatra Province. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(4), 1237–1246. <https://doi.org/10.18280/ijdsdp.170422>
- Andriani, Y., & Sukmawati, N. (2022). Kemiskinan Dalam Naskah Hah Karya Putu Wijaya (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Jurnal Humaniora*, 18(1).
- Annisa, N., & Anwar, K. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh)*. 04, 1–6.
- Apriliansah, L. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2401–2413. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Astuti, S., & Mispriyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Ayu, N. E. N., & Faisal, A. A. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies*, 1(1), 1–12.
- Badan Pusat Statistik, B. (2020). *Profil Kemiskinan Di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2011). *Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi 2011-2015*. Bappenas Republik Indonesia.
- Christia, A. ., & Ispriyarso. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di

Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.

Dewi, A. (2006). *Kajian penerapan Akuntansi biaya pada Anggaran belanja Daerah Kota Singkawang*. Universitas Islam Indonesia.

Dornbusch, R., Fischer, S., & Starz, R. (2008). *Makro Ekonomi*. Media Global Edukasi.

Eka Suputra, I., & Martini Dewi, N. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), 105–112.

Ernawati, Y. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Pemerintah Kota Medan). *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(1), 143–158. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i1.293>

Fahira, C. E., Chalisa, D., Karila, N., Rezaldi, M., Ramadhani, R. W., & Amri, K. (2023). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Journal of Law and Economics*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.56347/jle.v2i1.174>

Fajri, A. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.18264>

Fatihudin, D. (2016). *Pengaruh Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (6th ed.). Salemba Empat.

Gulo, A. K., Zamzami, Z., & Bhakti, A. (2017). Dampak alokasi belanja langsung terhadap ketimpangan ekonomi wilayah (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 57–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3941>

Halim, & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat.

Hanifah, U., Septiani, Y., & Panjawa, J. L. (2023). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Webinar Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 2(5), 145–160. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/download/229/292>

- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Preneda Media Group.
- Haughton, J., & Khandar, S. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Salemba Empat.
- Hidayah, A., & Aji, T. S. (2022). Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Journal of Economics*, 2(3), 160–168.
- Hodijah, S. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 156–173.
- Ibrahim, Z. (2016). *Pengantar Ekonomi Makro*. Koperasi Syariah Baraka.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Ekonomi Publish.
- Ismi, F. (2019). *Pengaruh Utang Luar Negeri, Nilai Ekspor dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1983-2015*. Universitas Sebelas Maret.
- Jhingan, M. . (2016). *The Economics of Development and Planning*. Nisha Entreprises.
- Johar, M. R. (2023). Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka : Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Oikos : Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 108–117. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i1.6035>
- Kumalasari, M., & Poerwono, D. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata - Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal UNDIP*, 15(2), 1–23.
- Kuncoro. (2012). *Pengertian Kemiskinan*. YKPM.
- Latifah, N. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan dampaknya pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado (2006-2015). *Jurnal Ekonomi*, 17(2).
- Lubis, R. P., & Handayani, R. (2024). Pengaruh Inflasi Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 290–298. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4501>
- Mankiw. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi, Yogyakarta.

- Maulani Nisa, A., Rusdarti, & Wahyudin, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 65–74. <http://beaj/unnes.ac.id>
- Meida, E. A., & Susilo. (2024). Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 03(2), 483–501. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.12>
- Mustika, C., Amril, A., & Emilia, E. (2015). Analisis Pengaruh Ekspor ke Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Pengangguran di Indonesia Periode 1993 sampai 2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(1). <https://doi.org/10.22437/paradigma.v10i1.3654>
- Mustika, C., & Nurjanah, R. (2021). Rural and urban poverty models on Sumatra Island. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 107–114. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.10684>
- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533. <https://doi.org/10.29210/020231686>
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12.
- Nasution, Y. (2018). *Analisis Pengaruh Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup Di Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ngiik, T. I., Kueh, J., Yau, J., & Liwan, A. (2021). Impact of Government Expenditure, Exchange Rate and Unemployment Rate on Economic Growth of Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 13(2).
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nwamuo, C. (2022). Government Expenditure and Unemployment Rate in Nigeria: An Empirical Analysis. *Greener Journal of Social Sciences*, 12(1), 16–24.
- Olasunkanmi, I. (2023). Effect of Capital Expenditure on Unemployment Rate in Nigeria Isiaq Olasunkanmi OSENI † & Aduralere O. OYELADE ‡. *African Journal of Economic Review*, 11(3), 1–12.
- Padriyansyah, P., & Syahputera, R. (2022). Analisis Pdrb, Ipm Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 31.

<https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4567>

- Pangestu, E. C. (2019). Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.20527/jiep.v1i1.1113>
- Permatasari, A., Abd Rachim, & Sutrisno. (2024). Pengaruh Ekspor Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumbagsel. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 57–65. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.154>
- Pinem, A. A., Saleh, M., & Effendy, A. S. (2021). The Effect of Profit Sharing Fund, Export Value, Capital Expenditure Investment in Economic Growth and Unemployment in East Kalimantan. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 4(5), 689–699. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i5.1472>
- Pramesti, I. G. A. A. (2023). Perkembangan Ekspor terhadap Dampak Pengangguran di Provinsi Bali. *Remik*, 7(1), 229–232. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12026>
- Prawoto. (2021). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT Reflika Aditama.
- Purnamawati, I. G. A. (2021). *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saputra, I., Supeno, B., & Wardi, J. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(2), 234–250. <http://www.jkkm.akademimanajemen.or.id>
- Sese, D. B., & Ebisine, L. (2023). Government Expenditure On Education And Unemployment Rate In Nigeria. *Ye-Numu Journal of Economic and Development Issues*, 6(1).
- Sinha, J. K. (2022). *Unemployment , Public Expenditure & Economic Growth in India During Post Economic Reform Period*. 3(December), 161–174. <https://doi.org/10.47509/IJABMS.2022.v03i02.02>
- Soleh, A., Daniel, P. A., & Siswoyo. (2019). Analisis Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 7(2), 151–173.
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d (Sutopo (ed.)). ALFABETA, cv.*
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Raja Grafindo.

- Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional (Understanding Multidimension Of Poverty). *JMPK*, 8(3).
- Syaiful. (2008). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan*. Bappenas.
- Tan, S. (2010). *Perencanaan Ekonomi dan Implikasinya Dalam Pembangunan Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jambi.
- Tjiptoherijanto. (2002). *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Naskah ke 20.
- Todaro, Michael, P., & Smith, S. C. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Vhernando, P., Huda, S., & Perdana, P. (2024). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 18(1).
- Yacaoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Privinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3).
- Yunanto, A. G. (2015). *Analisa Kemiskinan Struktural*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera periode 2019-2023 yaitu :

- a. Tren belanja modal di provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan beberapa provinsi mengalami pertumbuhan yang konsisten, sementara yang lain menghadapi fluktuasi atau bahkan penurunan. Aceh mengalami perubahan yang tajam, menunjukkan ketidakstabilan dalam alokasi anggaran. Provinsi seperti Aceh, yang sebagian besar belanja modalnya bersumber dari dana otonomi khusus dan transfer pusat, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan keterlambatan pencairan anggaran. Selain itu, pergantian kepala daerah dan birokrasi yang belum stabil juga dapat memengaruhi prioritas dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, rendahnya kapasitas teknis dalam menyusun dan melaksanakan proyek belanja modal menyebabkan banyak program tidak terealisasi sesuai target.

Evaluasi perencanaan yang lemah serta kurangnya pengawasan juga berkontribusi terhadap tidak optimalnya belanja modal di provinsi tersebut. Sumatera Utara dan Riau mencatat pertumbuhan belanja modal tertinggi dengan tren yang lebih konsisten, mengindikasikan kebijakan anggaran yang lebih terarah. Sebaliknya, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau menunjukkan tren pertumbuhan yang kurang stabil, sementara Jambi mengalami fluktuasi ekstrem, yang dapat berdampak pada efektivitas pembangunan. Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki pertumbuhan yang relatif stabil, sedangkan Sumatera Selatan mengalami tren negatif yang bisa mengindikasikan pengurangan investasi atau perubahan kebijakan belanja modal. Secara keseluruhan, variasi ini mencerminkan perbedaan dalam strategi pengelolaan anggaran di setiap provinsi di Sumatera.

- b. Rata-rata lama sekolah di provinsi-provinsi Pulau Sumatera meningkat selama 2019-2023, tetapi masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Kepulauan Riau mencatat angka tertinggi pada 2023 (10,52 tahun), Kepulauan Riau yang memiliki konsentrasi ekonomi lebih tinggi dan akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan cenderung menarik lebih banyak investasi di sektor pendidikan, baik dari pemerintah maupun swasta. Sementara itu, provinsi-provinsi dengan daerah terpencil dan keterbatasan anggaran menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan. Selain itu,

faktor budaya dan tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tertentu juga memengaruhi angka rata-rata lama sekolah. Sementara Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka terendah (8,66 tahun). Jambi mengalami peningkatan dari 8,86 tahun (2019) menjadi 9,16 tahun (2023), tetapi masih tertinggal dibandingkan provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Riau.

- c. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan potensi sektor unggulan. Riau mencatat investasi tertinggi dengan rata-rata Rp35.343 miliar, Capaian ini disebabkan oleh sejumlah faktor strategis yang membuat provinsi ini sangat menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Salah satu faktor utama adalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, terutama di sektor minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit, yang telah lama menjadi andalan ekonomi Riau. Diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat memiliki nilai investasi yang lebih rendah. Fluktuasi investasi terjadi di beberapa provinsi, seperti Aceh dan Kepulauan Riau, yang mengalami lonjakan besar di satu tahun tetapi kontraksi tajam di tahun berikutnya. Lampung mencatat pertumbuhan investasi tertinggi dengan rata-rata 56,83%, sedangkan Jambi menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 24,90%.

Secara keseluruhan, provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan investasi yang stabil cenderung menarik lebih banyak investasi, sementara provinsi yang mengalami fluktuasi memerlukan strategi kebijakan yang lebih konsisten untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

- d. Provinsi Riau mencatat nilai ekspor netto tertinggi di Sumatera selama 2019-2023 dengan rata-rata 17.000,3 juta US\$ dan tren pertumbuhan yang relatif stabil, capaian ini dikarenakan struktur ekonomi Riau yang sangat kuat di sektor-sektor berorientasi ekspor, terutama minyak dan gas bumi (migas) serta kelapa sawit dan produk turunannya. Sektor migas, meskipun menghadapi fluktuasi harga dunia, tetap menjadi kontributor utama karena volume produksinya yang besar dan infrastruktur ekspor yang lengkap. Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit di Riau juga sangat dominan, dengan ribuan hektare lahan yang menghasilkan crude palm oil (CPO) dan bahan baku turunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan berada di posisi berikutnya meskipun mengalami fluktuasi. Jambi dan Kepulauan Riau mencatat angka ekspor netto lebih rendah dengan volatilitas yang cukup tinggi, seperti lonjakan Jambi pada 2021 sebesar 133,60% sebelum turun drastis pada 2023. Beberapa provinsi dengan nilai ekspor netto lebih kecil, seperti

Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil. Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mengalami dinamika ekspor netto yang cukup tajam, dengan kenaikan dan penurunan signifikan dalam beberapa tahun. Secara keseluruhan, meskipun beberapa provinsi mencatat pertumbuhan ekspor netto yang tinggi, fluktuasi yang terjadi mencerminkan ketidakstabilan perdagangan luar negeri di Sumatera dalam lima tahun terakhir.

- e. Pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan tren pemulihan setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada 2020, dengan Kepulauan Riau mengalami kontraksi terdalam (-3,8%) dan Sumatera Selatan paling ringan (0,11%). Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi rata-rata 3,90% selama lima tahun, dikarenakan sejumlah faktor utama yang saling bersinergi. Pertama, sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Jambi menunjukkan kinerja yang relatif stabil, khususnya dalam komoditas unggulan seperti batu bara, minyak bumi, karet, dan kelapa sawit. Kedua, adanya peningkatan investasi di sektor pengolahan dan infrastruktur turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Sementara Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Meskipun beberapa

provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata pertumbuhan lebih rendah dari 3,5%, pemulihan ekonomi di sebagian besar wilayah cukup baik, dengan Riau dan Lampung mencatat pertumbuhan signifikan pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi di beberapa daerah, ketahanan ekonomi Sumatera cukup kuat, terutama di provinsi dengan sektor unggulan yang mendukung pemulihan cepat. Ke depan, penguatan sektor ekonomi utama di setiap provinsi diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

- f. Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif, dengan Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi rata-rata 14,95% yang dikarenakan perekonomian Aceh masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas, diikuti oleh Bengkulu dan Sumatera Selatan, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mencatat angka terendah. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, seperti Aceh dari 15,32% (2019) menjadi 14,45% (2023) dan Sumatera Utara dari 8,83% menjadi 8,15%. Beberapa daerah, seperti Jambi dan Sumatera Selatan, mengalami fluktuasi sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan. Riau dan Kepulauan Riau cenderung stabil, sementara

Lampung dan Bengkulu mengalami penurunan bertahap. Kesenjangan antarprovinsi masih menjadi tantangan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, serta akses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik di setiap daerah dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

- g. Tingkat pengangguran di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kepulauan Riau dan Aceh mencatat angka tertinggi, masing-masing 6,80% dan rata-rata 6,25%, tingginya tingkat pengangguran lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan investasi swasta dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Sementara Bengkulu dan Sumatera Selatan memiliki tingkat terendah, stabil di sekitar 3,60%-4,11%. Beberapa provinsi seperti Riau menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan dari 5,97% pada 2019 menjadi 4,23% pada 2023, mencerminkan perbaikan pasar kerja. Namun, Kepulauan Riau mengalami lonjakan pengangguran pada 2020-2022 akibat dampak pandemi sebelum akhirnya menurun, sementara Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi berhasil menekan tingkat pengangguran, perbedaan kondisi ekonomi di

setiap wilayah memerlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan daerah.

2. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di provinsi-provinsi Sumatera menunjukkan bahwa belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan belanja modal, pendidikan dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera, pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal secara lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sektor pendidikan dengan meningkatkan akses dan kualitas

pendidikan di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Program pelatihan dan pendidikan vokasi harus dikembangkan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudahan dalam regulasi investasi juga harus menjadi perhatian utama agar investor lebih tertarik menanamkan modalnya di sektor produktif yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, peningkatan ekspor netto perlu didukung dengan diversifikasi produk unggulan serta peningkatan daya saing komoditas daerah agar mampu bersaing di pasar global. Pemerintah juga dapat mendorong sektor UMKM untuk berorientasi ekspor dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan yang memadai.

2. Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menyerap tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan khusus. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat agar lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi di sektor industri padat karya dan sektor berbasis teknologi harus ditingkatkan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga harus menjadi prioritas, mengingat banyaknya masyarakat di Sumatera yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani dan nelayan, seperti bantuan modal usaha, teknologi modern, serta akses pasar yang lebih luas. Dengan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perbandingan Belanja Modal, Pendidikan, Investasi, Ekspor Netto, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Antara Wilayah Sumatera

5.1.1 Perbandingan Belanja Modal Antara Wilayah Sumatera

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau barang dengan manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, peralatan, dan tanah. Untuk mengetahui perbandingan realisasi belanja modal antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Perbandingan Belanja Modal antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Ribu)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	3.161.488.624	1.755.472.079	3.319.367.168	2.868.705.757	1.718.549.130	2.564.716.552
Perkembangan (%)	-	-44,47	89,09	-13,58	-40,09	-2,26
Sumatera Utara	1.249.600.484	1.497.944.969	1.145.566.552	1.775.917.392	3.271.597.642	1.788.125.408
Perkembangan (%)	-	19,87	-23,52	55,03	84,22	33,90
Sumatera Barat	1.062.230.453	736.888.361	836.913.147	941.069.948	1.037.235.695	922.867.521
Perkembangan (%)	-	-30,63	13,57	12,45	10,22	1,40
Riau	1.161.037.469	919.245.594	979.270.772	1.508.534.414	2.256.371.169	1.364.891.884
Perkembangan (%)	-	-20,83	6,53	54,05	49,57	22,33
Jambi	866.500.806	642.696.111	261.411.153	906.797.776	910.534.045	717.587.978
Perkembangan (%)	-	-25,83	-59,33	246,89	0,41	40,54
Sumatera Selatan	1.652.396.195	1.664.700.767	1.954.307.419	1.513.814.504	1.288.129.124	1.614.669.602
Perkembangan (%)	-	0,74	17,40	-22,54	-14,91	-4,83
Bengkulu	741.823.064	417.095.645	425.832.852	417.048.457	544.306.198	509.221.243
Perkembangan (%)	-	-43,77	2,09	-2,06	30,51	-3,31
Lampung	1.013.880.674	752.528.210	828.810.711	1.025.325.883	1.250.016.556	974.112.407
Perkembangan (%)	-	-25,78	10,14	23,71	21,91	7,50
Kep. Bangka Belitung	441.201.204	436.502.108	641.639.965	354.008.246	491.999.213	473.070.147
Perkembangan (%)	-	-1,07	47,00	-44,83	38,98	10,02
Kep Riau	634.501.179	586.608.799	347.953.458	552.161.762	581.565.470	540.558.134
Perkembangan (%)	-	-7,55	-40,68	58,69	5,33	3,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.1 menyajikan perbandingan belanja modal di berbagai provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Data menunjukkan bahwa Aceh

memiliki angka belanja modal tertinggi di antara provinsi lain pada beberapa tahun tertentu, tetapi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belanja modal Aceh mengalami penurunan drastis sebesar 44,47% dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian melonjak kembali pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 89,09%. Namun, tren ini tidak berlanjut secara konsisten, terlihat dari penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal di Aceh kurang stabil dan cenderung mengalami fluktuasi yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara dan Riau menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam belanja modal selama periode yang diamati. Sumatera Utara mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 84,22% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Riau mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 54,05%. Rata-rata pertumbuhan belanja modal di Sumatera Utara selama lima tahun terakhir mencapai 33,90%, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di antara provinsi lain. Riau juga mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,33%. Kedua provinsi ini menunjukkan konsistensi dalam peningkatan belanja modal, yang dapat mengindikasikan adanya kebijakan yang lebih terarah dalam alokasi anggaran pembangunan.

Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami tren pertumbuhan yang kurang stabil, seperti Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Sumatera Barat mengalami pertumbuhan belanja modal yang cenderung fluktuatif, dengan peningkatan moderat sekitar 1,40% rata-rata per tahun. Bengkulu menunjukkan tren

negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,31%, yang menandakan adanya hambatan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Kepulauan Riau mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021 dengan angka -40,68%, meskipun kemudian mengalami pemulihan pada tahun berikutnya. Ketidakstabilan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran di provinsi-provinsi tersebut.

Jambi merupakan salah satu provinsi dengan fluktuasi paling ekstrem dalam belanja modal, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 sebesar -59,33% tetapi kemudian melonjak drastis pada tahun 2022 sebesar 246,89%, hal ini dikarenakan ketergantungan yang cukup besar terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor sumber daya alam. Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Sumatera, mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -4,83%, yang menandakan adanya kemungkinan pengurangan investasi atau perubahan prioritas belanja modal. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa tren belanja modal di Sumatera sangat bervariasi antarprovinsi, dengan beberapa wilayah mengalami pertumbuhan pesat sementara yang lain menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

5.1.2 Perbandingan Pendidikan Antara Wilayah Sumatera

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan

formal. RLS dihitung sebagai rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Untuk mengetahui perbandingan pendidikan antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Perbandingan Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Tahun)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata (Tahun)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	9,59	9,71	9,77	9,79	9,89	9,75
Sumatera Utara	9,71	9,83	9,88	9,99	10,07	9,90
Sumatera Barat	9,22	9,34	9,46	9,51	9,59	9,42
Riau	9,35	9,47	9,52	9,54	9,6	9,50
Jambi	8,86	8,97	9,03	9,07	9,16	9,02
Sumatera Selatan	8,6	8,68	8,78	8,82	8,9	8,76
Bengkulu	9,08	9,2	9,26	9,28	9,35	9,23
Lampung	8,36	8,51	8,56	8,61	8,72	8,55
Kep. Bangka Belitung	8,35	8,49	8,54	8,57	8,66	8,52
Kep Riau	10,13	10,22	10,38	10,46	10,52	10,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.2 menunjukkan perbandingan rata-rata lama sekolah di berbagai provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019 hingga 2023. Data ini menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat yang diukur berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan untuk bersekolah. Secara umum, rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2023, yaitu 10,52 tahun, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka terendah sebesar 8,66 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan akses pendidikan di seluruh wilayah, masih ada ketimpangan antarprovinsi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Provinsi Jambi mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,86 tahun pada 2019 menjadi 9,16 tahun pada 2023. Namun, angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatera Utara (10,07 tahun) dan Riau (9,60 tahun). Peningkatan yang terjadi di Jambi menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan akses pendidikan, tetapi masih memerlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai angka yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ini meliputi infrastruktur pendidikan, jumlah sekolah yang tersedia, kualitas tenaga pendidik, serta program pemerintah dalam mendukung pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif agar Jambi dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Ketimpangan pendidikan di Pulau Sumatera terlihat dari perbedaan angka rata-rata lama sekolah antarprovinsi. Misalnya, Kepulauan Riau secara konsisten memiliki angka tertinggi sepanjang periode 2019–2023, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, provinsi seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung memiliki angka yang lebih rendah, menunjukkan adanya tantangan dalam sektor pendidikan di wilayah tersebut. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, serta kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan cenderung memiliki angka rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di hampir seluruh provinsi di Sumatera, masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan. Upaya yang lebih besar harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah. Kebijakan seperti pemberian beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ini. Selain itu, peran masyarakat dalam mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah juga sangat penting dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di masa depan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan seluruh provinsi di Sumatera dapat mencapai angka rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dan lebih merata, sehingga kualitas sumber daya manusia di wilayah ini dapat terus berkembang.

5.1.3 Perbandingan Investasi Antara Wilayah Sumatera

Investasi adalah salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam konteks makroekonomi merujuk pada pengeluaran untuk barang modal, seperti mesin, gedung, dan infrastruktur, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Investasi dalam penelitian ini adalah penanaman modal dalam negeri. Untuk mengetahui perbandingan investasi antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Perbandingan Investasi (Penanaman Modal dalam Negeri) antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	3.607	8.241	7.905	4.424	8.883	6.612
Perkembangan (%)	-	128,48	-4,08	-44,03	100,79	45,29
Sumatera Utara	19.749	18.190	18.485	22.789	21.574	20.157
Perkembangan (%)	-	-7,90	1,62	23,29	-5,33	2,92
Sumatera Barat	3.027	3.106	4.184	2.560	4.488	3.473
Perkembangan (%)	-	2,63	34,69	-38,81	75,33	18,46
Riau	26.292	34.118	24.998	43.062	48.243	35.343
Perkembangan (%)	-	29,76	-26,73	72,26	12,03	21,83
Jambi	4.437	3.512	6.204	8.883	8.939	6.395
Perkembangan (%)	-	-20,86	76,67	43,17	0,63	24,90
Sumatera Selatan	16.921	15.825	16.267	23.526	25.602	19.628
Perkembangan (%)	-	-6,48	2,80	44,62	8,83	12,44
Bengkulu	5.458	5.399	4.924	6.957	7.219	5.991
Perkembangan (%)	-	-1,08	-8,81	41,31	3,76	8,79
Lampung	2.429	7.121	10.513	5.809	7.626	6.700
Perkembangan (%)	-	193,16	47,65	-44,74	31,27	56,83
Kep. Bangka Belitung	2.915	1.864	3.677	6.309	7.961	4.545
Perkembangan (%)	-	-36,07	97,31	71,56	26,19	39,75
Kep Riau	5.656	14.249	9.769	4.817	8.857	8.670
Perkembangan (%)	-	151,91	-31,44	-50,69	83,85	38,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5.3, terlihat adanya variasi dalam nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di setiap provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Riau tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata investasi tertinggi selama lima tahun tersebut, yaitu sebesar Rp35.343 miliar. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga menunjukkan nilai investasi yang cukup besar, masing-masing dengan rata-rata Rp20.157 miliar dan Rp19.628 miliar. Di sisi lain, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat memiliki rata-rata investasi yang relatif lebih kecil, yaitu Rp4.545 miliar dan Rp3.473 miliar. Sementara itu, Jambi menunjukkan tren peningkatan investasi yang cukup signifikan dengan rata-rata Rp6.395 miliar. Angka-angka ini mencerminkan adanya

perbedaan dalam daya tarik investasi di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, serta potensi sektor unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.

Dari segi pertumbuhan investasi, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan di beberapa provinsi. Aceh, misalnya, mengalami pertumbuhan investasi sebesar 128,48% pada tahun 2020, namun turun drastis sebesar -44,03% pada tahun 2022 sebelum kembali naik menjadi 100,79% pada tahun 2023. Hal serupa juga terjadi di Kepulauan Riau, yang mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 151,91% pada tahun 2020, namun mengalami kontraksi tajam sebesar -50,69% pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 83,85% pada tahun 2023. Di sisi lain, provinsi seperti Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan investasi yang lebih stabil, dengan rata-rata perkembangan sebesar 2,92% selama lima tahun. Variasi dalam pertumbuhan investasi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional, kebijakan investasi, dan stabilitas politik daerah turut memengaruhi arus modal dalam negeri di Pulau Sumatera.

Provinsi yang mengalami pertumbuhan investasi tertinggi dalam periode lima tahun tersebut adalah Lampung dengan rata-rata perkembangan sebesar 56,83%. Tahun 2020 menjadi periode puncak bagi provinsi ini, di mana pertumbuhan investasinya mencapai 193,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu bersifat konsisten, sebagaimana terlihat pada tahun 2022 ketika investasi di Lampung mengalami kontraksi sebesar -44,74%. Jambi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif, dengan lonjakan investasi sebesar 76,67% pada tahun 2021 dan 43,17% pada tahun 2022. Walaupun

mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023 dengan hanya tumbuh sebesar 0,63%, Jambi masih mencatat pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 24,90%, yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Fluktuasi ini mencerminkan bagaimana berbagai sektor ekonomi di setiap provinsi mengalami tantangan dan peluang yang berbeda dalam menarik investasi dalam negeri.

Secara keseluruhan, perbandingan investasi antarprovinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa daerah dengan infrastruktur yang lebih baik, potensi industri yang berkembang, dan dukungan kebijakan yang kuat cenderung memiliki nilai investasi yang lebih tinggi. Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan investasi terbesar, yang dapat dikaitkan dengan adanya sektor industri, perkebunan, dan pertambangan yang dominan di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi yang mengalami fluktuasi signifikan dalam investasi, seperti Aceh dan Kepulauan Riau, mungkin dipengaruhi oleh ketidakstabilan kebijakan atau tantangan dalam sektor tertentu. Dengan adanya tren peningkatan investasi di beberapa provinsi seperti Jambi dan Lampung, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi wilayah-wilayah tersebut untuk terus menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan di tingkat regional.

5.1.4 Perbandingan Ekspor Netto Antara Wilayah Sumatera

Ekspor Netto adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ekspor Netto yang positif menunjukkan bahwa suatu negara lebih banyak menjual barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan membeli dari luar negeri, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika

negatif, berarti negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, yang bisa menjadi indikasi ketergantungan terhadap barang dari luar negeri. Untuk mengetahui perbandingan ekspor netto antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 Perbandingan Ekspor Netto antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	186,4	174,1	383,8	624,6	461,3	366,0
Perkembangan (%)	-	-6,60	120,46	62,74	-26,14	37,6
Sumatera Utara	3.132,8	4.104,5	6.759,0	6.788,9	3.340,5	4.825,1
Perkembangan (%)	-	31,01	64,67	0,44	-50,79	11,3
Sumatera Barat	139,0	216,0	276,7	174,1	132,7	187,7
Perkembangan (%)	-	55,39	28,15	-37,10	-23,76	5,7
Riau	10.986,3	12.490,4	18.090,3	19.556,8	23.877,6	17.000,3
Perkembangan (%)	-	13,69	44,83	8,11	22,09	22,2
Jambi	2.086,9	984,3	2.299,3	2.621,8	1.406,7	1.879,8
Perkembangan (%)	-	-52,83	133,60	14,03	-46,35	12,1
Sumatera Selatan	3.547,7	2.663,7	4.334,7	6.669,6	5.420,5	4.527,2
Perkembangan (%)	-	-24,92	62,73	53,87	-18,73	18,2
Bengkulu	483,9	935,4	949,6	913,7	1.164,4	889,4
Perkembangan (%)	-	93,30	1,51	-3,78	27,44	29,6
Lampung	71,1	1.801,0	2.627,0	3.067,0	2.481,8	2.009,6
Perkembangan (%)	-	2.433,05	45,86	16,75	-19,08	619,1
Kep. Bangka Belitung	1.435,3	1.276,5	2.637,9	2.565,1	2.015,2	1.986,0
Perkembangan (%)	-	-11,06	106,65	-2,76	-21,44	17,8
Kep Riau	2.024,4	687,9	1.541,3	2.909,0	1.143,3	1.661,2
Perkembangan (%)	-	-66,02	124,06	88,74	-60,70	21,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam periode 2019-2023, Provinsi Riau mencatatkan nilai ekspor netto tertinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera, dengan rata-rata sebesar 17.000,3 juta US\$. Kinerja ekspor netto Riau menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 22,09%. Sumatera Utara berada di posisi kedua dengan rata-rata ekspor netto sebesar 4.825,1 juta US\$, meskipun mengalami penurunan signifikan pada 2023 sebesar -50,79%. Provinsi

Sumatera Selatan juga menunjukkan angka ekspor netto yang cukup tinggi, dengan rata-rata 4.527,2 juta US\$ dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 53,87%. Sementara itu, Jambi dan Kepulauan Riau mencatat rata-rata ekspor netto masing-masing sebesar 1.879,8 juta US\$ dan 1.661,2 juta US\$, tetapi mengalami fluktuasi signifikan selama periode tersebut. Jambi, misalnya, mengalami lonjakan ekspor netto pada 2021 sebesar 133,60%, tetapi turun drastis pada 2023 hingga -46,35%.

Beberapa provinsi dengan nilai ekspor netto lebih rendah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi. Aceh memiliki rata-rata ekspor netto sebesar 366,0 juta US\$, dengan kenaikan tertinggi pada 2021 sebesar 120,46%, tetapi turun kembali pada 2023 sebesar -26,14%. Sumatera Barat mencatat rata-rata ekspor netto sebesar 187,7 juta US\$ dengan tren yang kurang stabil, mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 28,15% tetapi kembali turun pada 2023 sebesar -23,76%. Bengkulu, yang memiliki rata-rata ekspor netto sebesar 889,4 juta US\$, menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2021 dan 2022. Sementara itu, Lampung mencatat rata-rata ekspor netto sebesar 2.009,6 juta US\$, dengan lonjakan luar biasa pada 2020 yang mencapai 2.433,05%, sebelum kembali mengalami pertumbuhan yang lebih moderat pada tahun-tahun berikutnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau juga memiliki pola ekspor netto yang cukup dinamis. Kepulauan Bangka Belitung mencatat rata-rata ekspor netto sebesar 1.986,0 juta US\$, dengan kenaikan signifikan pada 2021 sebesar 106,65%, tetapi turun kembali pada 2023 sebesar -21,44%. Kepulauan

Riau, meskipun memiliki rata-rata ekspor netto yang cukup tinggi, mengalami fluktuasi yang lebih drastis. Pada 2020, ekspor netto Kepulauan Riau anjlok sebesar -66,02%, kemudian mengalami kenaikan pesat pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 124,06% dan 88,74%, sebelum akhirnya turun kembali pada 2023 sebesar -60,70%. Secara keseluruhan, meskipun beberapa provinsi mencatatkan pertumbuhan ekspor netto yang tinggi, fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perdagangan luar negeri di wilayah Sumatera selama lima tahun terakhir.

5.1.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Wilayah Sumatera

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan ekopnomi antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23	3,00
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	3,30
Sumatera Barat	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	3,13
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	2,76
Jambi	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,67	3,47
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	5,24	5,08	3,90
Bengkulu	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	3,36
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	3,04
Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38	2,97
Kep Riau	4,83	-3,8	3,43	5,06	5,16	2,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.5 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Pulau Sumatera dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Data tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dengan angka pertumbuhan negatif yang bervariasi. Kepulauan Riau mengalami kontraksi terdalam dengan pertumbuhan sebesar -3,8 persen, sedangkan Sumatera Selatan mengalami kontraksi paling ringan dengan pertumbuhan -0,11 persen. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, semua provinsi mulai menunjukkan pemulihan ekonomi dengan angka pertumbuhan yang cenderung meningkat hingga tahun 2023. Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di antara provinsi lain, yaitu sebesar 3,90 persen selama lima tahun tersebut.

Perbandingan antar provinsi menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang konsisten lebih tinggi dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera, terutama pada tahun 2019 dan 2023 dengan angka pertumbuhan di atas 5 persen. Provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung cenderung memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah selama periode yang diamati, dengan angka pertumbuhan yang lebih kecil dari 3,5 persen. Sementara itu, Kepulauan Riau meskipun mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, berhasil mengalami pemulihan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya faktor ekonomi yang mendukung pertumbuhan di masing-masing wilayah,

seperti sektor industri, perdagangan, dan investasi yang berbeda-beda di tiap provinsi.

Tingkat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 juga menunjukkan pola yang berbeda di setiap provinsi. Riau, sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Sumatera, mengalami pertumbuhan yang cukup baik setelah kontraksi pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2019 pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding provinsi lain, pemulihannya setelah pandemi cukup signifikan, mencapai 4,21 persen pada tahun 2023. Sementara itu, provinsi Lampung yang mengalami kontraksi terbesar kedua pada tahun 2020 (-1,66 persen) juga berhasil pulih dengan pertumbuhan 4,55 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kontraksi yang signifikan, sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera memiliki daya tahan ekonomi yang cukup baik sehingga mampu pulih dalam waktu yang relatif singkat.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi. Dengan melihat angka rata-rata, dapat disimpulkan bahwa Jambi merupakan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut cukup kuat dan memiliki sektor unggulan yang mampu mendukung pemulihan yang lebih cepat. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung yang sangat bergantung pada sektor tertentu seperti industri manufaktur dan pertambangan, mengalami fluktuasi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.

Dengan adanya data ini, kebijakan ekonomi di masa depan dapat difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan di setiap provinsi untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

5.1.6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antara Wilayah Sumatera

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu. Garis kemiskinan biasanya ditentukan berdasarkan tingkat pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kemiskinan antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45	14,95
Sumatera Utara	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	8,63
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95	6,24
Riau	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68	6,90
Jambi	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58	7,69
Sumatera Selatan	12,71	12,66	12,84	11,9	11,78	12,38
Bengkulu	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	14,83
Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	12,05
Kep. Bangka Belitung	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52	4,60
Kep Riau	5,8	6,13	5,75	6,03	5,69	5,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 5.6 menunjukkan perbandingan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2019-2023. Secara umum, terdapat tren fluktuatif di beberapa provinsi, dengan beberapa daerah mengalami peningkatan atau penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode ini adalah Aceh, dengan rata-rata 14,95 persen,

diikuti oleh Bengkulu dan Sumatera Selatan yang memiliki rata-rata 12,38 dan 14,83 persen. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata 4,60 persen, diikuti oleh Kepulauan Riau sebesar 5,75 persen. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam tingkat kesejahteraan di berbagai wilayah Sumatera, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, serta tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat di masing-masing daerah.

Jika melihat tren tahunan, sebagian besar provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2023. Aceh, misalnya, mengalami penurunan dari 15,32 persen pada 2019 menjadi 14,45 persen pada 2023. Sumatera Utara juga menunjukkan tren penurunan dari 8,83 persen pada 2019 menjadi 8,15 persen pada 2023. Sumatera Barat mencatat penurunan yang cukup signifikan, dari 6,42 persen pada 2019 menjadi 5,95 persen pada 2023. Namun, beberapa provinsi menunjukkan fluktuasi yang lebih bervariasi, seperti Jambi yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebelum kembali turun pada 2023. Sumatera Selatan juga mengalami tren yang serupa, dengan kenaikan kecil di tahun 2021 sebelum mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2023.

Beberapa provinsi, seperti Riau dan Kepulauan Riau, menunjukkan tren yang relatif stabil dengan perubahan yang tidak terlalu drastis. Riau mengalami sedikit fluktuasi, dari 7,08 persen pada 2019 menjadi 6,68 persen pada 2023. Kepulauan Riau juga mencatat pergerakan yang tidak signifikan, dengan tingkat kemiskinan berkisar antara 5,69 persen hingga 6,13 persen. Provinsi Lampung dan Bengkulu yang awalnya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi juga mengalami

penurunan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam mengurangi kemiskinan, baik melalui program bantuan sosial maupun penguatan sektor ekonomi, telah memberikan dampak yang cukup positif bagi beberapa daerah di Sumatera.

Meskipun demikian, kesenjangan antarprovinsi dalam hal tingkat kemiskinan tetap menjadi perhatian. Beberapa provinsi yang memiliki angka kemiskinan tinggi, seperti Aceh dan Bengkulu, memerlukan intervensi yang lebih besar dalam aspek pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor seperti ketergantungan terhadap sektor tertentu, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingkat investasi yang bervariasi bisa menjadi penyebab utama perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Pulau Sumatera perlu mempertimbangkan faktor-faktor spesifik di setiap provinsi, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

5.1.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Antara Wilayah Sumatera

Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mencerminkan jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin bekerja tetapi belum

mendapatkan pekerjaan, sementara TPT yang rendah menandakan bahwa sebagian besar angkatan kerja terserap ke dalam pasar kerja. Untuk mengetahui perbandingan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Perbandingan Tingkat pengangguran antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	6,17	6,59	6,3	6,17	6,03	6,25
Sumatera Utara	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89	6,14
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	6,20
Riau	5,97	6,32	4,42	4,37	4,23	5,06
Jambi	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,68
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	4,75
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,60
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,43
Kep. Bangka Belitung	3,62	5,25	5,03	4,77	4,56	4,65
Kep Riau	7,5	10,34	9,91	8,23	6,80	8,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Analisis tingkat pengangguran di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2023 adalah Kepulauan Riau dengan 6,80%, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,23%. Aceh juga memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan rata-rata 6,25% selama lima tahun terakhir, menunjukkan masalah ketenagakerjaan yang masih cukup serius. Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki rata-rata tingkat pengangguran yang hampir serupa, masing-masing sebesar 6,14% dan 6,20%, dengan tren penurunan yang terlihat pada tahun 2023 dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, Riau

mengalami penurunan yang cukup baik dalam tingkat pengangguran, dari 5,97% pada 2019 menjadi hanya 4,23% pada tahun 2023, yang mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di wilayah tersebut.

Provinsi dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah di Sumatera adalah Bengkulu dan Sumatera Selatan. Bengkulu memiliki tingkat pengangguran yang stabil dengan rata-rata 3,60% selama lima tahun terakhir, sementara Sumatera Selatan mengalami tren penurunan signifikan dari 4,53% pada 2019 menjadi hanya 4,11% pada 2023. Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pengangguran yang relatif moderat, dengan rata-rata masing-masing 4,43% dan 4,65%. Jambi juga menunjukkan stabilitas dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, yakni rata-rata 4,75% dalam periode 2019-2023. Penurunan angka pengangguran di beberapa provinsi dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan sektor ekonomi yang lebih luas.

Namun, beberapa provinsi masih menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat pengangguran, seperti Kepulauan Riau dan Aceh. Kepulauan Riau mengalami lonjakan pengangguran yang cukup tinggi pada 2020 hingga 2022, dengan puncaknya pada 10,34% pada 2020 sebelum menurun menjadi 6,80% pada 2023. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi yang lebih signifikan terhadap sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Aceh, di sisi lain, meskipun mengalami sedikit penurunan tingkat pengangguran pada 2023, masih memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menciptakan lapangan kerja dan

memperkuat sektor ekonomi lokal. Dengan perbedaan kondisi ketenagakerjaan di berbagai provinsi di Sumatera, kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan daerah diperlukan untuk memastikan penurunan tingkat pengangguran yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

5.2 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi Dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran

5.2.1 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera

Regresi data panel adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki dimensi waktu (*time series*) dan dimensi individu (*cross-section*) secara bersamaan. Dalam regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu model efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*), model efek acak (*Random Effect Model/REM*), dan model regresi data panel biasa (*Pooled OLS*). Model efek tetap digunakan ketika karakteristik individu dianggap tetap selama periode waktu tertentu, tetapi bisa berbeda antar-individu. Sebaliknya, model efek acak mengasumsikan bahwa perbedaan individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Model ini lebih efisien dibandingkan dengan model efek tetap jika asumsi tersebut terpenuhi, karena dapat menghemat derajat kebebasan. Sementara itu, model *Pooled OLS* mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan spesifik antar-individu, sehingga semua data dianalisis sebagai satu kesatuan tanpa mempertimbangkan struktur panelnya.

Pemilihan model yang tepat dalam regresi data panel biasanya dilakukan melalui uji spesifik, seperti uji Chow untuk membandingkan *Pooled OLS* dengan

Fixed Effect Model, uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, serta uji *Breusch-Pagan* untuk menentukan apakah model efek acak lebih sesuai dibandingkan dengan *Pooled OLS*. Jika uji *Chow* menunjukkan bahwa model efek tetap lebih baik daripada *Pooled OLS*, maka FEM lebih disarankan. Selanjutnya, jika uji Hausman menyatakan bahwa model efek tetap lebih sesuai dibandingkan dengan model efek acak, maka penggunaan FEM lebih diutamakan. Namun, jika asumsi dalam uji Hausman tidak terpenuhi, maka REM bisa digunakan karena memberikan estimasi yang lebih efisien. Dengan demikian, regresi data panel memungkinkan analisis yang lebih akurat dan komprehensif terhadap hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ekonomi, sosial, dan berbagai bidang lainnya.. Berikut ini akan ditampilkan hasil estimasi ketiga model tersebut:

Tabel 5.8 Model *Pooled OLS*

Dependent Variable: PE?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:25
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	3.43E-09	6.96E-10	4.926204	0.0000
PD?	0.062536	0.039141	1.597715	0.1170
I?	4.50E-05	5.10E-05	0.882177	0.3823
EN?	-0.000408	7.67E-05	-5.319976	0.0000
R-squared	0.763416	Mean dependent var		3.600000
Adjusted R-squared	0.747987	S.D. dependent var		1.511858
S.E. of regression	0.758967	Akaike info criterion		2.362901
Sum squared resid	26.49742	Schwarz criterion		2.515863
Log likelihood	-55.07253	Hannan-Quinn criter.		2.421150
Durbin-Watson stat	0.536606			

Sumber: *Data Diolah, Eviews 10 (2025)*

Tabel 5.8 diatas adalah hasil dari model *pooled OLS*, untuk mengetahui hasil

fixed effect model (FEM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9 Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/10/25 Time: 14:27

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.031810	1.825171	0.565323	0.5754
BM?	8.59E-11	4.36E-10	0.196886	0.8450
PD?	0.210317	0.191873	1.096123	0.2803
I?	6.79E-05	3.71E-05	1.828510	0.0758
EN?	-8.40E-05	7.73E-05	-1.085797	0.2848
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-1.991485			
_SUMATERAUTARA--C	-2.184844			
_SUMATERABARAT--C	-0.228431			
_RIAU--C	-0.082935			
_JAMBI--C	0.658373			
_SUMATERASELATAN--C	0.613709			
_BENGKULU--C	0.879406			
_LAMPUNG--C	0.862120			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.686696			
_KEPRIAU--C	0.787390			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.981492	Mean dependent var	3.600000	
Adjusted R-squared	0.974809	S.D. dependent var	1.511858	
S.E. of regression	0.239959	Akaike info criterion	0.214802	
Sum squared resid	2.072898	Schwarz criterion	0.750168	
Log likelihood	8.629953	Hannan-Quinn criter.	0.418672	
F-statistic	146.8540	Durbin-Watson stat	1.690593	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Tabel 5.9 diatas adalah hasil dari *fixed effect model* (FEM), untuk mengetahui hasil *random effect model* (REM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10 Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: PE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/10/25 Time: 14:28

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.180814	1.540718	1.415453	0.1638
BM?	1.10E-09	3.17E-10	3.460850	0.0012
PD?	0.446805	0.173326	2.577839	0.0133
I?	9.31E-05	3.18E-05	2.930093	0.0053
EN?	0.000213	5.98E-05	3.565423	0.0009
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-1.108848			
_SUMATERAUTARA--C	-1.533410			
_SUMATERABARAT--C	0.214986			
_RIAU--C	0.237326			
_JAMBI--C	0.829531			
_SUMATERASELATAN--C	0.729145			
_BENGKULU--C	0.589334			
_LAMPUNG--C	0.201886			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.048827			
_KEPRIAU--C	-0.111123			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.438182	0.7693
Idiosyncratic random			0.239959	0.2307
Weighted Statistics				
R-squared	0.533522	Mean dependent var		0.856352
Adjusted R-squared	0.492057	S.D. dependent var		0.428072
S.E. of regression	0.305088	Sum squared resid		4.188535
F-statistic	12.86688	Durbin-Watson stat		1.106254
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.711519	Mean dependent var		3.600000
Sum squared resid	32.30982	Durbin-Watson stat		0.143411

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Chow Test (Uji Chow) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara PLS dan FEM.

Tabel 5.11. Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.788964	(9,36)	0.6281
Cross-section Chi-square	9.000987	9	0.4372

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,4372 dan 0,4372 lebih besar dibandingkan alfa 0,05), sehingga model ini hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model *Pooled OLS* lebih baik dibandingkan model FEM. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hausman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 5.12. Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.919206	4	0.1402

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square memiliki Prob besar dibandingkan alfa 0,05 ($0,142 > 0,05$), sehingga hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya pengujian Uji *Lagrange*

Multiplier untuk menentukan metode yang terbaik antara PLS dan REM. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana yang terbaik antara PLS dan REM.

Tabel 5.13 Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara model PLS dengan REM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/10/25 Time: 14:03

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 50

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	3.247260 (0.0715)	159.0282 (0.0000)	162.2754 (0.0000)
Honda	-1.802016 (0.9642)	12.61064 (0.0000)	7.642850 (0.0000)
King-Wu	-1.802016 (0.9642)	12.61064 (0.0000)	9.493106 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	159.0282 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, *Eviews 10* (2025)

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,0000 (Pada kolom kedua yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP (0,000) < 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan PLS. Dengan kata lain model yang cocok adalah REM.

5.2.1.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM)

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)

Dependent Variable: PE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/10/25 Time: 14:28

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.180814	1.540718	1.415453	0.1638
BM?	1.10E-09	3.17E-10	3.460850	0.0012
PD?	0.446805	0.173326	2.577839	0.0133
I?	9.31E-05	3.18E-05	2.930093	0.0053
EN?	0.000213	5.98E-05	3.565423	0.0009
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-1.108848			
_SUMATERAUTARA--C	-1.533410			
_SUMATERABARAT--C	0.214986			
_RIAU--C	0.237326			
_JAMBI--C	0.829531			
_SUMATERASELATAN--C	0.729145			
_BENGKULU--C	0.589334			
_LAMPUNG--C	0.201886			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.048827			
_KEPRIAU--C	-0.111123			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.438182	0.7693
Idiosyncratic random			0.239959	0.2307
Weighted Statistics				
R-squared	0.533522	Mean dependent var		0.856352
Adjusted R-squared	0.492057	S.D. dependent var		0.428072
S.E. of regression	0.305088	Sum squared resid		4.188535
F-statistic	12.86688	Durbin-Watson stat		1.106254
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.711519	Mean dependent var		3.600000
Sum squared resid	32.30982	Durbin-Watson stat		0.143411

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

5.2.1.2 Uji Hipotesis

A. Uji F Statistik

Dapat dilihat pada tabel 5.14 diatas diketahui juga bahwa nilai Prob (f Statistik) $0,000000 < 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya uji secara bersama sama menunjukkan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Sumatera.

B. Uji R^2

Dapat dilihat pada Tabel 5.14 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,533522 artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada tingkat korelasinya sebesar 53,35 persen.

C. Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Sumatera secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Tabel 5.15. Nilai t Statistik Pada Metode REM

Variabel	t hitung	Prob.	Keterangan
BM?	3.460850	0.0012	Signifikan
PD?	2.577839	0.0133	Signifikan
I?	2.930093	0.0053	Signifikan
EN?	3.565423	0.0009	Signifikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 09 (2025)

Berdasarkan Tabel 5.15 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari belanja modal sebesar 0,0012 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari pendidikan sebesar 0,0133 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
3. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari investasi sebesar 0,0053 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
4. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari ekspor netto sebesar 0,0009 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

5.2.1.3 Estimasi Model REM

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.14 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$PE_{it} = 2,180814 + 0,0000000011BM + 0,446805PD + 0,0000931I + 0,000213EN$$

Berdasarkan hasil persamaan model regresi tersebut maka persamaan model dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *REM* adalah sebagai :

1. Nilai konstanta sebesar 2,180814 artinya belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto tidak mengalami perubahan atau tetap maka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,180814 persen.
2. Nilai koefisien belanja modal sebesar 0,0000000011, artinya apabila belanja modal meningkat sebesar 1 ribu rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0000000011 persen, atau jika belanja modal meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 1,1 persen.
3. Nilai koefisien pendidikan sebesar 0,446805, artinya apabila pendidikan meningkat sebanyak 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,446805 persen.
4. Nilai koefisien investasi sebesar 0,0000931, artinya apabila investasi meningkat sebesar 1 miliar rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0000931 persen, atau jika investasi meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0931 persen.
5. Nilai koefisien ekspor netto sebesar 0,000213, artinya apabila ekspor netto meningkat sebesar 1 juta US\$ maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,000213 persen, atau jika ekspor netto meningkat sebesar 1 miliar US\$ rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,213 persen.

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing -masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Individual *Random effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.16 Random Effect Estimasi Model REM

Provinsi	C	Ci	C + Ci
Aceh	2,18081	-1,1088	1,07197
Sumatera Utara	2,18081	-1,5334	0,6474
Sumatera Barat	2,18081	0,21499	2,3958
Riau	2,18081	0,23733	2,41814
Jambi	2,18081	0,82953	3,01035
Sumatera Selatan	2,18081	0,72915	2,90996
Bengkulu	2,18081	0,58933	2,77015
Lampung	2,18081	0,20189	2,3827
Kepulauan Bangka Belitung	2,18081	-0,0488	2,13199
Kepulauan Riau	2,18081	-0,1111	2,06969

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan estimasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Random effect* dalam hasil estimasi metode REM adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Aceh akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 1,07197 persen.

2. Provinsi Sumatera Utara

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Utara akan

mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 0,6474 persen.

3. Provinsi Sumatera Barat

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,3958 persen.

4. Provinsi Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,41814 persen.

5. Provinsi Jambi

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 3,01035 persen.

6. Provinsi Sumatera Selatan

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,90996 persen.

7. Provinsi Bengkulu

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bengkulu akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,77015 persen.

8. Provinsi Lampung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Lampung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,3827 persen.

9. Provinsi Bangka Belitung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,13199 persen.

10. Provinsi Kepulauan Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 2,06969 persen.

5.2.2 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera

Pemilihan model yang tepat dalam regresi data panel dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan uji *Breusch-Pagan*. Jika uji *Chow* menunjukkan bahwa model efek tetap lebih baik daripada *Pooled OLS*, maka FEM lebih disarankan. Selanjutnya, jika uji Hausman menyatakan bahwa model efek tetap lebih sesuai dibandingkan dengan model efek acak, maka penggunaan FEM lebih diutamakan. Namun, jika asumsi dalam uji Hausman tidak terpenuhi, maka REM bisa digunakan karena memberikan estimasi yang lebih efisien. Berikut ini akan ditampilkan hasil estimasi ketiga model tersebut:

Tabel 5.17 Model *Pooled OLS*

Dependent Variable: TK?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 15:00
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-1.00E-08	1.60E-09	-6.252221	0.0000
PD?	2.049130	0.090107	22.74109	0.0000
I?	-0.000214	0.000117	-1.823423	0.0747
EN?	0.001210	0.000177	6.852359	0.0000
R-squared	0.785430	Mean dependent var		9.480000
Adjusted R-squared	0.771436	S.D. dependent var		3.654687
S.E. of regression	1.747244	Akaike info criterion		4.030575
Sum squared resid	140.4317	Schwarz criterion		4.183537
Log likelihood	-96.76438	Hannan-Quinn criter.		4.088824
Durbin-Watson stat	0.724640			

Sumber: Data Diolah, *Eviews 10* (2025)

Tabel 5.17 diatas adalah hasil dari model *pooled OLS*, untuk mengetahui hasil *fixed effect model* (FEM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.18 Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TK?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:33
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.55112	2.694573	4.657924	0.0000
BM?	-9.76E-10	6.44E-10	-1.514135	0.1387
PD?	-0.194326	0.283271	-0.686007	0.4971
I?	-3.14E-05	5.48E-05	-0.572972	0.5702
EN?	6.67E-05	0.000114	0.584290	0.5627
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	4.503066			
_SUMATERAUTARA--C	4.347590			
_SUMATERABARAT--C	2.878816			
_RIAU--C	1.825776			
_JAMBI--C	-1.224038			
_SUMATERASELATAN--C	-1.717330			
_BENGKULU--C	-2.313676			
_LAMPUNG--C	-2.643424			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-2.769973			
_KEPRIAU--C	-2.886808			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.993097	Mean dependent var	9.480000	
Adjusted R-squared	0.990604	S.D. dependent var	3.654687	
S.E. of regression	0.354262	Akaike info criterion	0.993935	
Sum squared resid	4.518050	Schwarz criterion	1.529301	
Log likelihood	-10.84836	Hannan-Quinn criter.	1.197805	
F-statistic	398.3786	Durbin-Watson stat	1.435538	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Tabel 5.18 diatas adalah hasil dari *fixed effect model* (FEM), untuk mengetahui hasil *random effect model* (REM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19 Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: TK?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/10/25 Time: 14:34

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.89580	2.322055	8.998839	0.0000
BM?	-3.73E-09	4.82E-10	-7.738765	0.0000
PD?	-0.778082	0.259403	-2.999512	0.0044
I?	-0.000116	4.80E-05	-2.410139	0.0201
EN?	-0.000427	9.14E-05	-4.671553	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	2.118052			
_SUMATERAUTARA--C	2.617267			
_SUMATERABARAT--C	1.495690			
_RIAU--C	0.821163			
_JAMBI--C	-1.778034			
_SUMATERASELATAN--C	-2.073321			
_BENGKULU--C	-1.595214			
_LAMPUNG--C	-0.792237			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.616966			
_KEPRIAU--C	-0.196401			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.725084	0.8073
Idiosyncratic random			0.354262	0.1927
Weighted Statistics				
R-squared	0.596486	Mean dependent var		2.023634
Adjusted R-squared	0.560618	S.D. dependent var		0.847172
S.E. of regression	0.561555	Sum squared resid		14.19050
F-statistic	16.63008	Durbin-Watson stat		0.859020
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.775813	Mean dependent var		9.480000
Sum squared resid	146.7260	Durbin-Watson stat		0.083080

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Chow Test (Uji Chow) Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara PLS dan FEM.

Tabel 5.20. Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	481.195278	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.912854	9	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,0000 dan 0,0000 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05), sehingga model ini hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model PLS. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hausman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 5.21. Uji Hausman untk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.483099	4	0.4805

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square memiliki Prob besar kecil dibanding alfa 0,05 ($0,4805 > 0,05$), sehingga hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

model REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya pengujian Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan metode yang terbaik antara PLS dan REM. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana yang terbaik antara PLS dan REM.

Tabel 5.22 Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara model PLS dengan REM

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	74.03485 (0.0000)	1.502329 (0.2203)	75.53718 (0.0000)
Honda	8.604351 (0.0000)	-1.225695 (0.8898)	5.217497 (0.0000)
King-Wu	8.604351 (0.0000)	-1.225695 (0.8898)	3.752995 (0.0001)
GHM	-- --	-- --	74.03485 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, *Eviews 10* (2025)

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,0000 (Pada kolom kedua yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP $(0,000) < 0,05$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan PLS. Dengan kata lain model yang cocok adalah REM.

5.2.2.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM)

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23. Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)

Dependent Variable: TK?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/10/25 Time: 14:34
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.89580	2.322055	8.998839	0.0000
BM?	-3.73E-09	4.82E-10	-7.738765	0.0000
PD?	-0.778082	0.259403	-2.999512	0.0044
I?	-0.000116	4.80E-05	-2.410139	0.0201
EN?	-0.000427	9.14E-05	-4.671553	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	2.118052			
_SUMATERAUTARA--C	2.617267			
_SUMATERABARAT--C	1.495690			
_RIAU--C	0.821163			
_JAMBI--C	-1.778034			
_SUMATERASELATAN--C	-2.073321			
_BENGKULU--C	-1.595214			
_LAMPUNG--C	-0.792237			
_KEPBANGKABELITUNG--C	-0.616966			
_KEPRIAU--C	-0.196401			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.725084	0.8073
Idiosyncratic random			0.354262	0.1927
Weighted Statistics				
R-squared	0.596486	Mean dependent var		2.023634
Adjusted R-squared	0.560618	S.D. dependent var		0.847172
S.E. of regression	0.561555	Sum squared resid		14.19050
F-statistic	16.63008	Durbin-Watson stat		0.859020
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.775813	Mean dependent var		9.480000
Sum squared resid	146.7260	Durbin-Watson stat		0.083080

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

5.2.2.2 Uji Hipotesis

A. Uji F Statistik

Dapat dilihat pada tabel 5.23 diatas diketahui juga bahwa nilai Prob (f Statistik) $0,00000 < 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya uji secara bersama sama menunjukkan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Sumatera.

B. Uji R^2

Dapat dilihat pada Tabel 5.23 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,596486 artinya bahwa variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada tingkat korelasinya sebesar 59,65 persen.

C. Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Sumatera secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Tabel 5.24. Nilai t Statistik Pada Metode REM

Variabel	t hitung	Prob.	Keterangan
BM?	-7.738765	0.0000	Signfikan
PD?	-2.999512	0.0044	Signfikan
I?	-2.410139	0.0201	Signfikan
EN?	-4.671553	0.0000	Signfikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan Tabel 5.24 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari belanja modal sebesar 0,0000 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diketahui bahwa *Prob* dari pendidikan sebesar 0,0044 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Sumatera.
3. Diketahui bahwa *Prob* dari investasi sebesar 0,0201 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Sumatera.
4. Diketahui bahwa *Prob* dari ekspor netto sebesar 0,0000 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi-provinsi di Sumatera.

5.2.2.3 Estimasi Model REM

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.23 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat kemiskinan dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$TK_{it} = 20,89580 - 0,00000000373BM - 0,778082PD - 0,000116I - 0,000427EN$$

Berdasarkan hasil persamaan model regresi tersebut maka persamaan model dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *REM* adalah sebagai :

1. Nilai konstanta sebesar 20,89580 artinya belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto tidak mengalami perubahan atau tetap maka tingkat kemiskinan sebesar 20,89580 persen.
2. Nilai koefisien belanja modal sebesar -0,00000000373, artinya apabila belanja modal meningkat sebesar 1 ribu rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,00000000373 persen, atau jika belanja modal meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 3,73 persen.
3. Nilai koefisien pendidikan sebesar -0,778082, artinya jika pendidikan meningkat sebesar 1 tahun maka tingkat kemiskinan di provinsi se-Sumatera mengalami penurunan sebesar -0,778082 persen.
4. Nilai koefisien investasi sebesar -0,000116, artinya apabila investasi meningkat sebesar 1 miliar rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0,000116 persen, atau jika investasi meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,116 persen.
5. Nilai koefisien ekspor netto sebesar -0,000427, artinya apabila ekspor netto meningkat sebesar 1 juta US\$ maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0,000427, atau jika ekspor netto meningkat sebesar 1 miliar US\$ rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,427 persen.

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai

intersep yang berbeda-beda. Individual *Random effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.25 Random Effect Estimasi Model REM

Provinsi	C	Ci	C + Ci
Aceh	20,8958	2,118052	23,01385
Sumatera Utara	20,8958	2,617267	23,51307
Sumatera Barat	20,8958	1,49569	22,39149
Riau	20,8958	0,821163	21,71696
Jambi	20,8958	-1,77803	19,11777
Sumatera Selatan	20,8958	-2,07332	18,82248
Bengkulu	20,8958	-1,59521	19,30059
Lampung	20,8958	-0,79224	20,10356
Kepulauan Bangka Belitung	20,8958	-0,61697	20,27883
Kepulauan Riau	20,8958	-0,1964	20,6994

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan estimasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Random effect* dalam hasil estimasi metode REM adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Aceh akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 23,01385 persen.

2. Provinsi Sumatera Utara

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 23,51307 persen.

3. Provinsi Sumatera Barat

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 22,39149 persen.

4. Provinsi Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 21,71696 persen.

5. Provinsi Jambi

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 19,11777 persen.

6. Provinsi Sumatera Selatan

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,82248 persen.

7. Provinsi Bengkulu

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bengkulu akan mendapatkan

pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 19,30059 persen.

8. Provinsi Lampung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Lampung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 20,10356 persen.

9. Provinsi Bangka Belitung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 20,27883 persen.

10. Provinsi Kepulauan Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 20,6994 persen.

5.2.3 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera

Dalam regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu model efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*), model efek acak (*Random Effect Model/REM*), dan model regresi data panel biasa (*Pooled OLS*). Pemilihan model yang tepat dalam regresi data panel dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan uji *Breusch-Pagan*. Jika uji *Chow* menunjukkan bahwa model

efek tetap lebih baik daripada *Pooled OLS*, maka FEM lebih disarankan. Selanjutnya, jika uji Hausman menyatakan bahwa model efek tetap lebih sesuai dibandingkan dengan model efek acak, maka penggunaan FEM lebih diutamakan. Namun, jika asumsi dalam uji Hausman tidak terpenuhi, maka REM bisa digunakan karena memberikan estimasi yang lebih efisien. Berikut ini akan ditampilkan hasil estimasi ketiga model tersebut:

Tabel 5.26 Model *Pooled OLS*

Dependent Variable: TP?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:36
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM?	-3.43E-09	8.88E-10	-3.859224	0.0004
PD?	0.973032	0.049945	19.48226	0.0000
I?	-0.000115	6.51E-05	-1.762337	0.0847
EN?	0.000450	9.79E-05	4.600612	0.0000
R-squared	0.601695	Mean dependent var		5.440000
Adjusted R-squared	0.575718	S.D. dependent var		1.486813
S.E. of regression	0.968464	Akaike info criterion		2.850407
Sum squared resid	43.14442	Schwarz criterion		3.003369
Log likelihood	-67.26018	Hannan-Quinn criter.		2.908656
Durbin-Watson stat	0.463433			

Sumber: Data Diolah, *Eviews 10* (2025)

Tabel 5.26 diatas adalah hasil dari model *pooled OLS*, untuk mengetahui hasil *fixed effect model* (FEM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.27 Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TP?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/10/25 Time: 14:37
 Sample: 2019 2023
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.32347	2.895423	7.019173	0.0000
BM?	-1.51E-09	6.92E-10	-2.183999	0.0356
PD?	-1.386942	0.304385	-4.556535	0.0001
I?	-0.000105	5.89E-05	-1.780580	0.0834
EN?	0.000301	0.000123	2.456430	0.0190
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	0.697116			
_SUMATERAUTARA--C	-0.045958			
_SUMATERABARAT--C	-0.670352			
_RIAU--C	-0.455606			
_JAMBI--C	-1.253621			
_SUMATERASELATAN--C	-1.142895			
_BENGKULU--C	0.607256			
_LAMPUNG--C	0.962959			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.783562			
_KEPRIAU--C	0.517539			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.951840	Mean dependent var	5.440000	
Adjusted R-squared	0.934449	S.D. dependent var	1.486813	
S.E. of regression	0.380668	Akaike info criterion	1.137717	
Sum squared resid	5.216689	Schwarz criterion	1.673083	
Log likelihood	-14.44292	Hannan-Quinn criter.	1.341588	
F-statistic	54.73143	Durbin-Watson stat	2.481086	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Tabel 5.27 diatas adalah hasil dari *fixed effect model* (FEM), untuk mengetahui hasil *random effect model* (REM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.28 Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: TP?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/10/25 Time: 14:38

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.47213	2.390212	7.728238	0.0000
BM?	-1.23E-09	4.88E-10	-2.528232	0.0150
PD?	-1.237230	0.270709	-4.570330	0.0000
I?	-6.71E-05	4.91E-05	-1.366249	0.1786
EN?	-0.000212	9.12E-05	-2.328561	0.0244
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	1.028116			
_SUMATERAUTARA--C	0.202317			
_SUMATERABARAT--C	-0.412240			
_RIAU--C	-0.256514			
_JAMBI--C	-1.039358			
_SUMATERASELATAN--C	-0.957903			
_BENGKULU--C	0.443859			
_LAMPUNG--C	0.519309			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.301602			
_KEPRIAU--C	0.170811			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.618458	0.7252
Idiosyncratic random			0.380668	0.2748
Weighted Statistics				
R-squared	0.597809	Mean dependent var		1.443744
Adjusted R-squared	0.562059	S.D. dependent var		0.594136
S.E. of regression	0.393182	Sum squared resid		6.956659
F-statistic	16.72178	Durbin-Watson stat		1.759434
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.741202	Mean dependent var		5.440000
Sum squared resid	28.03301	Durbin-Watson stat		0.436620

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Chow Test (Uji Chow) Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara PLS dan FEM.

Tabel 5.29. Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.801245	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.095536	9	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,0000 dan 0,0000 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05), sehingga model ini hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model PLS. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hausman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 5.30. Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.328461	4	0.3634

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square memiliki Prob besar kecil dibandingkan alfa 0,05 ($0,3634 > 0,05$), sehingga hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

model REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya pengujian Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan metode yang terbaik antara PLS dan REM. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana yang terbaik antara PLS dan REM.

Tabel 5.31 Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara model PLS dengan REM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 03/10/25 Time: 20:03

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 50

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	24.05936 (0.0000)	5.270551 (0.0217)	29.32991 (0.0000)
Honda	4.905034 (0.0000)	2.295768 (0.0108)	5.091736 (0.0000)
King-Wu	4.905034 (0.0000)	2.295768 (0.0108)	4.631018 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	29.32991 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, *Eviews 10* (2025)

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,0000 (pada kolom kedua yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP (0,000) < 0,05 maka H₀ ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan PLS. Dengan kata lain model yang cocok adalah REM.

5.2.3.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM)

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat pengangguran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32 Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)

Dependent Variable: TP?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/10/25 Time: 14:38

Sample: 2019 2023

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.47213	2.390212	7.728238	0.0000
BM?	-1.23E-09	4.88E-10	-2.528232	0.0150
PD?	-1.237230	0.270709	-4.570330	0.0000
I?	-6.71E-05	4.91E-05	-1.366249	0.1786
EN?	-0.000212	9.12E-05	-2.328561	0.0244
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	1.028116			
_SUMATERAUTARA--C	0.202317			
_SUMATERABARAT--C	-0.412240			
_RIAU--C	-0.256514			
_JAMBI--C	-1.039358			
_SUMATERASELATAN--C	-0.957903			
_BENGKULU--C	0.443859			
_LAMPUNG--C	0.519309			
_KEPBANGKABELITUNG--C	0.301602			
_KEPRIAU--C	0.170811			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.618458	0.7252
Idiosyncratic random			0.380668	0.2748
Weighted Statistics				
R-squared	0.597809	Mean dependent var		1.443744
Adjusted R-squared	0.562059	S.D. dependent var		0.594136
S.E. of regression	0.393182	Sum squared resid		6.956659
F-statistic	16.72178	Durbin-Watson stat		1.759434
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.741202	Mean dependent var		5.440000
Sum squared resid	28.03301	Durbin-Watson stat		0.436620

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

5.2.3.2 Uji Hipotesis

A. Uji F Statistik

Dapat dilihat pada tabel 5.32 diatas diketahui juga bahwa nilai Prob (f Statistik) $0,00000 < 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya uji secara bersama sama menunjukkan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera.

B. Uji R^2

Dapat dilihat pada Tabel 5.32 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,597809 artinya bahwa variabel tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada tingkat korelasinya sebesar 59,78 persen.

C. Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Tabel 5.33. Nilai t Statistik Pada Metode REM

Variabel	t hitung	Prob.	Keterangan
BM?	-2.528232	0.0150	Signifikan
PD?	-4.570330	0.0000	Signifikan
I?	-1.366249	0.1786	Tidak Signifikan
EN?	-2.328561	0.0244	Signifikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan Tabel 5.33 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari belanja modal sebesar 0,0150 karena $Prob < 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diketahui bahwa *Prob* dari pendidikan sebesar 0,0000 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera.
3. Diketahui bahwa *Prob* dari investasi sebesar 0,1786 karena $Prob > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera.
4. Diketahui bahwa *Prob* dari ekspor netto sebesar 0,0244 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera.

5.2.3.3 Estimasi Model REM

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.32 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap tingkat pengangguran dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$TP_{it} = 18,47213 - 0,00000000123BM - 1,237230PD - 0,0000671I - 0,000212EN$$

Berdasarkan hasil persamaan model regresi tersebut maka persamaan model dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *REM* adalah sebagai :

1. Nilai konstanta sebesar 18,47213 artinya belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto tidak mengalami perubahan atau tetap maka tingkat pengangguran sebesar 18,47213 persen.
2. Nilai koefisien belanja modal sebesar -0,00000000123, artinya apabila belanja modal meningkat sebesar 1 ribu rupiah maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar 0,00000000123 persen, atau jika belanja modal meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar 1,23 persen.
3. Nilai koefisien pendidikan sebesar -1,237230, artinya jika pendidikan meningkat sebesar 1 tahun maka tingkat pengangguran di provinsi se-Sumatera mengalami penurunan sebesar 1,237230 persen.
4. Nilai koefisien investasi sebesar 0,0000671, karena investasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran secara signifikan maka koefisien investasi terhadap tingkat pengangguran tersebut tidak dapat diinterpretasikan.
5. Nilai koefisien ekspor netto sebesar -0,000212, artinya jika nilai ekspor netto meningkat sebesar 1 juta US\$ maka tingkat pengangguran di provinsi se-Sumatera mengalami penurunan sebesar 0,000212 persen.

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai

intersep yang berbeda-beda. Individual *Random effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.34 Random Effect Estimasi Model REM

Provinsi	C	Ci	C + Ci
Aceh	18,47213	1,028116	19,5002
Sumatera Utara	18,47213	0,202317	18,6744
Sumatera Barat	18,47213	-0,412240	18,0599
Riau	18,47213	-0,256514	18,2156
Jambi	18,47213	-1,039358	17,4328
Sumatera Selatan	18,47213	-0,957903	17,5142
Bengkulu	18,47213	0,443859	18,916
Lampung	18,47213	0,519309	18,9914
Kepulauan Bangka Belitung	18,47213	0,301602	18,7737
Kepulauan Riau	18,47213	0,170811	18,6429

Sumber: Data Diolah, Eviews 10 (2025)

Berdasarkan estimasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Random effect* dalam hasil estimasi metode REM adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Aceh akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 19,5002 persen.

2. Provinsi Sumatera Utara

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,6744 persen.

3. Provinsi Sumatera Barat

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,0599 persen.

4. Provinsi Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,2156 persen.

5. Provinsi Jambi

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 17,4328 persen.

6. Provinsi Sumatera Selatan

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 17,5142 persen.

7. Provinsi Bengkulu

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bengkulu akan mendapatkan

pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,916 persen.

8. Provinsi Lampung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Lampung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,9914 persen.

9. Provinsi Bangka Belitung

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,7737 persen.

10. Provinsi Kepulauan Riau

Jika terjadi perubahan belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 18,6429 persen.

5.3 Analisis Ekonomi

5.3.1 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang

mengatakan bahwa model belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera karena alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang memadai memperlancar distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta menarik investasi swasta. Selain itu, peningkatan belanja modal di sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mendorong produktivitas tenaga kerja. Sektor konstruksi juga mendapatkan dampak positif dengan bertambahnya proyek-proyek pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi dan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah pun terdorong. Lebih lanjut, belanja modal yang dialokasikan untuk pengembangan industri dan pariwisata di Sumatera dapat mempercepat diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan pertambangan. Efisiensi dalam pengelolaan belanja modal juga menentukan sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika penggunaan belanja modal tidak efektif atau terjadi pemborosan, maka dampak positifnya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengawasan dalam realisasi anggaran sangat diperlukan agar

belanja modal benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan Johar (2023) yang mengatakan bahwa Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan, produktivitas meningkat, inovasi lebih berkembang, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru juga meningkat.

Berpengaruhnya pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera dikarenakan Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pembangunan. Dengan pendidikan yang lebih baik, tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga produktivitas meningkat dan daya saing tenaga kerja di pasar global semakin kuat. Selain itu, pendidikan yang baik juga mendorong inovasi dan kewirausahaan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis. Pendidikan yang merata di seluruh wilayah Sumatera juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, karena masyarakat di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lebih lanjut, pendidikan yang tinggi memungkinkan adopsi teknologi yang lebih cepat di berbagai sektor industri, termasuk pertanian, manufaktur, dan jasa, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Selain itu, peningkatan rata-rata lama sekolah di Sumatera berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, karena individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Pendidikan juga berperan dalam membentuk pola pikir yang lebih kritis dan adaptif, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, baik melalui peningkatan kualitas guru, fasilitas sekolah, maupun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera dapat berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Fatihudin, 2016) yang mengatakan bahwa Investasi, baik dari sektor domestik maupun asing (Foreign Direct Investment/FDI), adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.

Berpengaruhnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera dapat disebabkan investasi mendorong peningkatan aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta aliran modal ke berbagai sektor ekonomi. Investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan energi, yang mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi dan transportasi dapat ditekan, sehingga daya saing ekonomi daerah meningkat. Selain itu, investasi dalam sektor

industri, pertanian, dan pariwisata dapat mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Investasi juga berperan dalam transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Dengan adanya modal baru, perusahaan dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya konsumsi masyarakat akibat bertambahnya pendapatan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, investasi yang diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, efektivitas investasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung masuknya investasi akan sangat menentukan keberhasilan Sumatera dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Permatasari et al., 2024) yang mengatakan bahwa Ekspor netto yang positif berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara meningkatkan ekspor, pendapatan nasional akan meningkat, yang selanjutnya dapat mendorong investasi dan konsumsi. Sektor-sektor yang

mengandalkan ekspor seringkali mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor lainnya, sehingga meningkatkan keseluruhan kinerja ekonomi.

Berpengaruhnya ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera karena mencerminkan daya saing ekonomi daerah dalam perdagangan internasional. Jika ekspor lebih besar daripada impor (surplus perdagangan), maka pendapatan daerah meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumatera memiliki potensi ekspor yang besar, terutama di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, serta sektor pertambangan seperti batu bara dan minyak bumi. Ketika permintaan global terhadap komoditas ekspor Sumatera meningkat, produksi dalam negeri pun terdorong, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, surplus ekspor dapat meningkatkan cadangan devisa, yang berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Namun, jika ekspor mengalami penurunan atau impor lebih tinggi dari ekspor (defisit perdagangan), maka pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena lebih banyak dana yang keluar daripada yang masuk. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor, seperti diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas produk, serta efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, sangat penting untuk memastikan ekspor netto berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Selain itu, stabilitas harga komoditas di pasar internasional serta perjanjian dagang dengan negara lain juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja ekspor netto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

5.3.2 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Amami & Asmara, 2022) yang mengatakan bahwa Belanja modal, khususnya dalam infrastruktur, membuka akses ke layanan dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Infrastruktur yang baik juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Berpengaruhnya belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Investasi pemerintah dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga menarik investasi swasta, yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya lebih banyak kesempatan kerja, pendapatan masyarakat meningkat, sehingga daya beli mereka juga membaik dan angka kemiskinan dapat ditekan. Selain itu, belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan sektor

produktif, seperti pertanian, industri, dan UMKM, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, efektivitas belanja modal dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat. Jika belanja modal tidak tepat sasaran atau tidak efisien, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan bisa menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan, serta evaluasi terhadap penggunaan belanja modal sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin di Sumatera.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Eka Suputra & Martini Dewi, 2015) yang mengatakan bahwa Pendidikan berperan penting dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, individu dari kelompok berpenghasilan rendah dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan yang berkualitas juga mendorong mobilitas sosial dan memutus lingkaran kemiskinan antar generasi.

Berpengaruhnya pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, lulusan dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke sektor formal yang menawarkan stabilitas kerja dan kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan sektor

informal, akses terhadap pendidikan berkualitas memberikan keterampilan kewirausahaan yang memungkinkan individu menciptakan lapangan kerja sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan berupah rendah, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan, sehingga masyarakat mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan terhindar dari jerat kemiskinan, pendidikan membuka akses terhadap berbagai program pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja dan peningkatan rata-rata lama sekolah di suatu daerah berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga lebih banyak masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Hodijah, 2017) yang mengatakan bahwa Investasi dalam ekonomi, baik domestik maupun asing, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Investasi juga mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti manufaktur dan jasa, yang menyediakan peluang kerja dengan upah yang lebih baik.

Berpengaruhnya investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera dikarenakan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi dari pelaku usaha dalam negeri, baik oleh perusahaan swasta maupun pemerintah, umumnya lebih terarah pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi

sosial-ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, industri manufaktur, dan UMKM. Dengan berkembangnya sektor-sektor ini, kesempatan kerja bagi masyarakat miskin semakin terbuka, sehingga pendapatan mereka meningkat dan daya beli juga membaik. Selain itu, investasi sering kali difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Ismi, 2019) yang mengatakan bahwa Ekspor netto yang positif, di mana nilai ekspor lebih besar daripada impor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika sektor ekspor berkembang, lapangan kerja di sektor terkait meningkat, yang pada gilirannya membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang sering bergantung pada sektor pertanian atau industri manufaktur ekspor. Secara keseluruhan, keempat faktor ini memiliki dampak yang saling terkait dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Berpengaruhnya ekspor netto terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera dapat disebabkan oleh Ekspor netto berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera karena mencerminkan keseimbangan antara ekspor dan impor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan

pendapatan masyarakat. Jika ekspor netto positif (surplus perdagangan), berarti nilai ekspor lebih besar daripada impor, yang menandakan kuatnya daya saing sektor ekonomi Sumatera, seperti perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi), pertambangan, dan perikanan. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk-produk unggulan Sumatera, produksi dalam negeri meningkat, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi pekerja sektor pertanian dan industri berbasis ekspor. Surplus ekspor juga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan sosial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, akses masyarakat terhadap pasar dan layanan publik meningkat, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi dari ekspor dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, yang juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Namun, jika ekspor netto negatif (defisit perdagangan), lebih banyak uang yang keluar daripada yang masuk, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketergantungan terhadap impor yang tinggi dapat membuat harga barang konsumsi lebih mahal bagi masyarakat miskin.

5.5.3 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera. Hasil penelitian ini

sependapat dengan (Fahira et al., 2023) yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya pengangguran, satu di antaranya terkait dengan penggunaan kapital sehingga masalah ketenagakerjaan tergantung pada jumlah pengeluaran (*total expenditure*). Menurut Keynes, pengangguran tidak dapat dihapuskan tetapi dapat dikurangi. Pengurangan pengangguran dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja dan untuk memperluas kesempatan kerja diperlukan modal, modal yang diperlukan adalah belanja modal.

Belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sumatera karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum, akan membuka banyak peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, baik di sektor konstruksi maupun sektor pendukung lainnya. Dengan adanya proyek-proyek pembangunan, permintaan tenaga kerja meningkat, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Belanja modal yang diarahkan pada pengembangan industri dan sektor produktif, seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata, juga dapat memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah di Sumatera, khususnya bagi angkatan kerja muda dan masyarakat berpendidikan rendah. Lebih lanjut, belanja modal yang mendukung sektor UMKM akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di banyak daerah. Dengan meningkatnya investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif, daya tarik investasi swasta juga semakin tinggi, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang kerja. Namun, efektivitas

belanja modal dalam mengurangi pengangguran sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang tepat. Jika belanja modal tidak terarah atau hanya terfokus pada proyek-proyek yang kurang menyerap tenaga kerja, maka dampaknya terhadap penurunan pengangguran akan terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Johar, 2023) yang mengatakan bahwa Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi pengangguran, karena semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang baik mempersiapkan individu untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga mengurangi pengangguran struktural akibat ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri.

Berpengaruhnya pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera dapat disebabkan oleh adanya program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja membantu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, pemerintah dan dunia usaha semakin meningkatkan kerja sama dalam pendidikan berbasis industri, seperti magang dan kerja sama riset, yang mempermudah transisi lulusan ke dunia kerja, masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih luas, yang dapat membantu mereka mendapatkan informasi dan akses ke peluang kerja yang lebih baik dan secara keseluruhan, pendidikan berperan dalam menciptakan ekosistem

ekonomi yang lebih dinamis dan inovatif, yang mendorong pertumbuhan sektor usaha dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan (Hidayah & Aji, 2022) yang mengatakan Investasi yang ditujukan pada pengembangan infrastruktur, sektor industri, dan teknologi menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam proses konstruksi maupun operasionalnya. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar kerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, investasi dalam sektor kewirausahaan mendorong munculnya bisnis baru yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi pemilik usaha tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, investasi yang tepat dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Tidak berpengaruhnya investasi terhadap tingkat pengangguran di Sumatera dapat disebabkan oleh investasi yang masuk lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal seperti pertambangan dan perkebunan skala besar, yang membutuhkan lebih banyak mesin dan teknologi daripada tenaga kerja manusia, investasi sering kali tidak diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, sehingga banyak lulusan pendidikan di Sumatera tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, lemahnya keterkaitan antara investasi dengan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menyebabkan manfaat investasi tidak

menyebarkan luas dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan, banyaknya investasi yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, yang meskipun penting untuk ekonomi jangka panjang, tidak serta-merta menciptakan banyak pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dalam jangka pendek dan kurangnya insentif bagi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama dalam industri yang membutuhkan keahlian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Pramessti, 2023) yang mengatakan bahwa Ekspor netto yang positif, di mana nilai ekspor lebih besar daripada impor, menandakan bahwa produksi domestik meningkat untuk memenuhi permintaan global. Hal ini mendorong ekspansi sektor-sektor produksi, terutama di industri manufaktur dan pertanian, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga membantu menurunkan pengangguran. Secara keseluruhan, keempat faktor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Ekspor netto yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sumatera dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Ketika ekspor netto meningkat, yang berarti ekspor lebih besar daripada impor, permintaan terhadap produk dalam negeri juga meningkat, mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sebaliknya, jika ekspor netto menurun atau mengalami defisit, industri yang bergantung pada ekspor dapat mengalami penurunan produksi,

menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya tingkat pengangguran. Selain itu, struktur ekonomi Sumatera yang banyak bergantung pada sektor perkebunan, pertambangan, dan manufaktur membuatnya sangat sensitif terhadap fluktuasi perdagangan internasional. Jika harga komoditas utama turun atau terjadi hambatan perdagangan, ekspor dapat melemah, mengurangi investasi dan kesempatan kerja di sektor terkait. Dengan demikian, ekspor netto berperan penting dalam menentukan stabilitas pasar tenaga kerja di Sumatera.

5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, implikasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menekan tingkat pengangguran di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah provinsi di wilayah Sumatera perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan transportasi. Infrastruktur yang baik akan mendorong konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Selain itu, pembangunan fasilitas publik seperti pasar rakyat, pusat pelatihan, dan fasilitas distribusi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi swasta. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek-proyek

infrastruktur tersebut tersebar merata ke daerah tertinggal agar manfaatnya dapat dinikmati secara inklusif. Dalam pelaksanaannya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan belanja modal harus dijaga untuk menghindari kebocoran anggaran. Kebijakan pengadaan barang dan jasa perlu diarahkan agar mendukung produk dalam negeri dan UMKM lokal. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional juga dapat memperbesar kapasitas pembiayaan belanja modal. Selain itu, proyek padat karya dapat dikembangkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja jangka pendek. Pemerintah daerah harus menjadikan belanja modal sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Evaluasi efektivitas belanja modal secara berkala juga penting untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar berdampak. Penyusunan rencana pembangunan daerah sebaiknya mengintegrasikan indikator belanja modal dengan capaian ekonomi makro. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama dalam optimalisasi kebijakan belanja modal. Dukungan dari DPRD dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat penting agar kebijakan ini tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Pendidikan terbukti secara empiris berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Pembangunan sekolah baru di daerah yang masih kekurangan fasilitas

pendidikan perlu diprioritaskan, disertai peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Program vokasional dan pendidikan keterampilan perlu diperluas untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan siap kerja. Pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin dapat meningkatkan partisipasi pendidikan dan mencegah putus sekolah. Selain itu, sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri (link and match) perlu diperkuat untuk meningkatkan relevansi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar. Pemerintah provinsi juga dapat mendorong pelatihan kerja berbasis komunitas dan lembaga pelatihan nonformal sebagai alternatif pemberdayaan tenaga kerja. Pendidikan karakter dan literasi digital juga harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu beradaptasi di era ekonomi digital. Perluasan akses pendidikan tinggi dan vokasi di daerah-daerah terpencil akan meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan perpustakaan dan fasilitas penunjang pembelajaran juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta sistem pendidikan yang adaptif dan produktif. Keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pendidikan juga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan manusia. Dalam jangka panjang, investasi di bidang

pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi.

3. Investasi terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan, meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kemungkinan karena investasi yang masuk bersifat padat modal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi yang bersifat padat karya, terutama di sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Kemudahan perizinan dan penyederhanaan regulasi harus terus ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penguatan layanan terpadu satu pintu (PTSP) menjadi salah satu kunci dalam mempercepat realisasi investasi di daerah. Pemerintah juga perlu menyediakan lahan industri dan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung. Selain itu, insentif fiskal seperti pengurangan pajak dan subsidi bagi investor lokal dapat menjadi daya tarik tambahan. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) juga harus menjadi bagian dari kebijakan investasi dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Kegiatan promosi investasi di tingkat nasional maupun internasional harus terus digencarkan, dengan menonjolkan potensi unggulan setiap daerah. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sesuai agar dapat terserap oleh sektor investasi yang berkembang. Evaluasi dampak sosial dan

lingkungan dari investasi harus dilakukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta juga penting untuk membangun kemitraan strategis dalam memperluas investasi. Dengan strategi yang tepat, investasi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus alat pengentasan kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan investasi harus dirancang tidak hanya berdasarkan nilai nominal, tetapi juga berdasarkan kualitas dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus lebih selektif dalam menyetujui proyek-proyek investasi agar benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Akhirnya, strategi investasi yang berorientasi pada inklusivitas dan pemerataan menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.

4. Ekspor netto yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan negatif terhadap kemiskinan serta pengangguran menjadi indikasi pentingnya penguatan sektor ekspor daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong komoditas unggulan ekspor seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk olahan agar memiliki daya saing tinggi di pasar global. Peningkatan kualitas produk, standarisasi, dan sertifikasi menjadi kunci untuk menembus pasar internasional. Selain itu, akses terhadap teknologi produksi dan logistik ekspor harus diperkuat, termasuk pembangunan pelabuhan ekspor dan gudang penyimpanan. Program pelatihan ekspor bagi pelaku usaha juga penting agar mereka mampu memahami regulasi dan prosedur perdagangan luar negeri. Pemerintah

dapat memberikan fasilitas pembiayaan ekspor, asuransi ekspor, dan kemudahan dalam proses bea cukai. Pengembangan klaster industri berbasis ekspor di setiap provinsi akan memperkuat daya saing dan efisiensi rantai pasok. Diversifikasi pasar ekspor juga perlu dilakukan agar ketergantungan terhadap negara mitra tertentu dapat dikurangi. Pemerintah daerah harus menjalin kerja sama dengan atase perdagangan dan perwakilan dagang di luar negeri untuk membuka akses pasar baru. Dukungan terhadap UMKM ekspor harus ditingkatkan, termasuk dalam hal promosi dan digitalisasi. Dalam jangka panjang, ekspor yang kuat akan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan multiplier effect terhadap sektor lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan ekspor, industrialisasi, dan pembangunan SDM. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dalam mendorong sektor ekspor agar tidak menimbulkan degradasi ekologis. Strategi jangka panjang harus mencakup penguatan branding produk lokal yang berkualitas tinggi. Dengan pendekatan holistik, ekspor dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Sumatera.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan dasar empiris yang kuat bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi. Pemerintah provinsi di Sumatera perlu merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang menggabungkan empat variabel utama: belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto. Integrasi antar sektor dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar

kebijakan berjalan efektif. Setiap daerah sebaiknya melakukan pemetaan potensi dan hambatan yang spesifik agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Monitoring dan evaluasi secara periodik wajib dilakukan agar dapat mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki strategi.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kebijakan harus menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi juga harus diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya pertumbuhan PDRB. Pemerintah harus menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bersifat eksklusif, tetapi merata dan berkeadilan. Kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam membentuk kawasan ekonomi terpadu di wilayah Sumatera juga dapat menjadi strategi jangka panjang. Dengan sinergi dan inovasi kebijakan yang tepat, pembangunan ekonomi daerah akan menjadi lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan. Akhirnya, komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Sumatera yang maju dan sejahtera. Kebijakan pembangunan tidak boleh bersifat jangka pendek, tetapi harus dirancang dengan visi jangka panjang dan berbasis data. Tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi juga harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengadopsi prinsip tata kelola yang baik, pembangunan ekonomi daerah akan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Penduduk bisa mencakup warga negara asli maupun pendatang yang menetap di daerah tersebut. Jumlah dan karakteristik penduduk sering digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, kebijakan ekonomi, dan analisis sosial. Untuk mengetahui jumlah penduduk di pada Provinsi di Pulau Sumatera selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	5.372.186	5.275.362	9.081.787	9.176.553	9.313.992	7.643.976
Perkembangan (%)	-	3,03	293,23	1,04	1,50	74,70
Sumatera Utara	14.563.229	14.799.314	14.936.668	15.115.075	15.387.423	14.960.342
Perkembangan (%)	-	1,62	0,93	1,19	1,80	1,39
Sumatera Barat	5.441.843	5.534.465	5.580.135	5.641.928	5.757.336	5.591.141
Perkembangan (%)	-	1,70	0,83	1,11	2,05	1,42
Riau	6.971.745	6.376.095	6.466.763	6.555.746	6.642.874	6.602.645
Perkembangan (%)	-	-8,54	1,42	1,38	1,33	-1,10
Jambi	3.624.628	3.548.239	3.585.124	3.631.126	3.679.283	3.613.680
Perkembangan (%)	-	-2,11	1,04	1,28	1,33	0,39
Sumatera Selatan	8.471.364	8.467.399	8.551.291	8.657.823	8.744.485	8.578.472
Perkembangan (%)	-	-0,05	0,99	1,25	1,00	0,80
Bengkulu	1.991.838	2.010.670	2.032.942	2.060.092	2.086.006	2.036.310
Perkembangan (%)	-	0,95	1,11	1,34	1,26	1,16
Lampung	8.938.634	9.007.852	9.081.787	9.176.553	9.313.992	9.103.764
Perkembangan (%)	-	0,77	0,82	1,04	1,50	1,03
Kep. Bangka Belitung	1.488.792	1.455.678	1.473.165	1.494.621	1.511.899	1.484.831
Perkembangan (%)	-	-2,22	1,20	1,46	1,16	0,40
Kep Riau	2.241.573	2.309.536	2.378.796	2.449.421	2.521.314	2.380.128
Perkembangan (%)	-	3,03	3,00	2,97	2,94	2,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023, provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Sumatera Utara dengan rata-rata 14.960.342 jiwa selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk di Sumatera Utara terus meningkat setiap tahunnya dengan perkembangan tertinggi sebesar 1,80% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki daya tarik bagi penduduk, baik karena faktor kelahiran yang tinggi maupun adanya arus migrasi masuk. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata 1.484.831 jiwa. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun-tahun tertentu, Kepulauan Bangka Belitung sempat mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar -2,22% pada tahun 2020, yang dapat dikaitkan dengan faktor migrasi keluar atau faktor demografis lainnya. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di setiap provinsi mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan pertumbuhan yang lebih tinggi di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar.

Dari sisi perkembangan jumlah penduduk, provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dalam satu tahun adalah Aceh, yang mencatat lonjakan luar biasa sebesar 293,23% pada tahun 2021. Lonjakan ini kemungkinan besar terjadi akibat adanya revisi data atau perubahan metode pencatatan yang signifikan, karena peningkatan sebesar ini tidak wajar dalam kondisi normal. Selain itu, Kepulauan Riau juga menunjukkan tingkat perkembangan yang relatif tinggi, dengan rata-rata 2,98% selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor migrasi masuk yang cukup besar, mengingat wilayah ini memiliki banyak pusat ekonomi dan industri yang menarik tenaga kerja dari berbagai daerah. Di sisi lain, provinsi

dengan perkembangan penduduk terendah adalah Riau, yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -1,10% selama periode tersebut. Riau mengalami penurunan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2020 dengan angka -8,54%, yang mungkin disebabkan oleh faktor migrasi keluar atau dampak sosial ekonomi yang mengakibatkan perpindahan penduduk ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak selalu bersifat linear dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Secara keseluruhan, pola perkembangan jumlah penduduk di Pulau Sumatera menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang stabil, sementara yang lain, seperti Riau dan Kepulauan Bangka Belitung, mengalami fluktuasi yang lebih tajam. Faktor-faktor seperti migrasi, kebijakan ekonomi, dan kondisi sosial dapat berperan dalam menentukan jumlah dan perkembangan penduduk di setiap wilayah. Perubahan demografis ini dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, serta strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan yang lebih ketat terhadap tren kependudukan sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara optimal dan berkelanjutan di masa depan.

4.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui perkembangan PAD di pada Provinsi di Pulau Sumatera selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Perkembangan PAD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Ribu)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	2.698.912.471	2.570.775.877	2.401.682.456	2.917.145.003	2.805.477.191	2.678.798.600
Perkembangan (%)	-	-4,75	-6,58	21,46	-3,83	1,58
Sumatera Utara	5.761.270.412	5.531.237.379	5.991.151.366	7.258.018.252	7.857.572.684	6.479.850.019
Perkembangan (%)	-	-3,99	8,31	21,15	8,26	8,43
Sumatera Barat	2.328.432.874	2.255.072.987	2.333.922.757	2.851.966.015	3.030.460.024	2.559.970.931
Perkembangan (%)	-	-3,15	3,50	22,20	6,26	7,20
Riau	3.558.210.585	3.333.176.033	4.045.832.279	4.696.769.080	5.410.980.551	4.208.993.706
Perkembangan (%)	-	-6,32	21,38	16,09	15,21	11,59
Jambi	1.651.089.944	1.535.183.486	1.507.203.796	2.163.585.920	2.259.688.736	1.823.350.376
Perkembangan (%)	-	-7,02	-1,82	43,55	4,44	9,79
Sumatera Selatan	3.486.853.387	3.375.100.985	4.371.615.899	4.930.509.573	5.608.776.752	4.354.571.319
Perkembangan (%)	-	-3,20	29,53	12,78	13,76	13,22
Bengkulu	826.674.935	712.345.549	948.694.012	1.088.415.650	967.957.038	908.817.437
Perkembangan (%)	-	-13,83	33,18	14,73	-11,07	5,75
Lampung	3.018.065.781	2.842.286.479	3.337.313.053	3.678.302.295	4.146.226.408	3.404.438.803
Perkembangan (%)	-	-5,82	17,42	10,22	12,72	8,63
Kep. Bangka Belitung	826.701.095	683.432.675	749.455.044	1.090.477.841	1.038.304.939	877.674.319
Perkembangan (%)	-	-17,33	9,66	45,50	-4,78	8,26
Kep Riau	1.298.917.001	1.195.634.364	1.352.645.560	1.675.729.889	1.518.211.727	1.408.227.708
Perkembangan (%)	-	-7,95	13,13	23,89	-9,40	4,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023, terlihat bahwa provinsi dengan PAD tertinggi selama periode tersebut adalah Sumatera Utara, dengan rata-rata PAD sebesar Rp6.479.850.019 ribu. Sedangkan PAD terendah dimiliki oleh Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata sebesar Rp877.674.319 ribu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kontribusi PAD antarprovinsi di Sumatera, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sektor industri, serta kebijakan fiskal masing-masing daerah.

Dalam hal pertumbuhan PAD, terdapat fluktuasi di berbagai provinsi. Provinsi Jambi mencatat perkembangan tertinggi pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 43,55%, diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 45,50%. Kenaikan signifikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan investasi, kebijakan pengelolaan sumber daya daerah, serta program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sebaliknya, Provinsi Bengkulu mengalami penurunan terbesar dalam satu tahun, yakni pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar -13,83%, sementara Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dengan -17,33%.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan PAD di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan dan Riau menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan angka perkembangan yang konsisten, masing-masing mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 13,22% dan 11,59%. Di sisi lain, provinsi seperti Aceh dan Kepulauan Riau memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih variatif, dengan beberapa tahun mengalami penurunan sebelum kembali meningkat. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam sumber pendapatan daerah, yang

kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun kebijakan daerah.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PAD di Pulau Sumatera tidak merata, dengan beberapa provinsi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, sementara yang lain mengalami penurunan atau stagnasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini dapat mencakup sektor industri unggulan, investasi swasta, serta dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah untuk memastikan peningkatan PAD yang berkelanjutan dan merata di seluruh provinsi di Sumatera.

4.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Indeks ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan pembangunan. Untuk mengetahui perkembangan IPM di pada Provinsi di Pulau Sumatera selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Perkembangan IPM pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun					Rata-Rata (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	71,90	71,99	72,18	72,80	73,40	72,45
Sumatera Utara	71,74	71,77	72,00	72,71	73,37	72,32
Sumatera Barat	72,39	72,38	72,65	73,26	73,75	72,89
Riau	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04	73,24
Jambi	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77	71,82
Sumatera Selatan	70,02	70,01	70,24	70,90	71,62	70,56
Bengkulu	71,21	71,40	71,64	72,16	72,78	71,84
Lampung	69,57	69,69	69,90	70,45	71,15	70,15
Kep. Bangka Belitung	71,30	71,47	71,69	72,24	72,85	71,91
Kep Riau	75,48	75,59	75,79	76,46	77,11	76,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Analisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2019-2023 menunjukkan adanya variasi dalam tingkat pertumbuhan dan capaian indeks. Provinsi dengan nilai IPM tertinggi secara konsisten adalah Kepulauan Riau dengan angka yang meningkat dari 75,48 pada tahun 2019 menjadi 77,11 pada tahun 2023, dengan rata-rata 76,09. Sementara itu, provinsi dengan IPM terendah adalah Lampung yang memiliki nilai 69,57 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 71,15 pada tahun 2023, dengan rata-rata 70,15. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan di semua provinsi, terdapat disparitas dalam tingkat pembangunan manusia di wilayah Sumatera.

Dari segi pertumbuhan tahunan, perkembangan tertinggi dalam satu tahun terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, yang mengalami peningkatan sebesar 0,67 poin dari 75,79 pada tahun 2021 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Di sisi lain, pertumbuhan terendah terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2020, di mana angka IPM mengalami stagnasi, bahkan sedikit menurun dari 70,02 pada tahun 2019

menjadi 70,01 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memperlambat kemajuan pembangunan manusia di provinsi tersebut pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM di Sumatera menunjukkan tren positif, dengan hampir semua provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, beberapa provinsi mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan IPM mereka, seperti Riau yang sempat mengalami penurunan dari 73,00 pada tahun 2019 menjadi 72,71 pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi aspek penting yang berkontribusi terhadap kenaikan IPM di masing-masing provinsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan merata untuk memastikan pembangunan manusia di Sumatera dapat meningkat secara berkelanjutan dan lebih merata di seluruh provinsi.

4.4 Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah total nilai barang dan jasa yang dikirim dari suatu negara ke negara lain dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam mata uang tertentu seperti dolar AS (USD) atau mata uang lokal. Nilai ini mencerminkan pendapatan dari perdagangan internasional dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga komoditas, nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan, serta permintaan global. Nilai ekspor sering digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan keseimbangan perdagangannya. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara tersebut mengalami surplus perdagangan, sedangkan jika lebih

kecil, maka terjadi defisit perdagangan. Untuk mengetahui perkembangan nilai ekspor pada Provinsi di Pulau Sumatera selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Perkembangan Nilai Ekspor pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	317,6	300,4	502,9	738,1	609,4	493,7
Perkembangan (%)	-	-5,42	67,41	46,77	-17,44	22,83
Sumatera Utara	7.663,1	8.084,4	11.850,2	12.923,7	10.449,6	10.194,2
Perkembangan (%)	-	5,50	46,58	9,06	-19,14	10,50
Sumatera Barat	149,8	227,8	304,4	194,5	163,4	207,9
Perkembangan (%)	-	52,09	33,66	-36,11	-16,01	8,41
Riau	12.364,4	13.698,2	19.716,7	22.537,3	26.213,5	18.906,0
Perkembangan (%)	-	10,79	43,94	14,31	16,31	21,34
Jambi	2.840,8	1.636,8	2.618,4	3.001,9	2.192,8	2.458,1
Perkembangan (%)	-	-42,38	59,97	14,65	-26,95	1,32
Sumatera Selatan	4.059,3	3.602,4	5.286,1	7.583,3	6.584,9	5.423,2
Perkembangan (%)	-	-11,26	46,74	43,46	-13,17	16,44
Bengkulu	208,5	153,7	237,7	311,2	4,6	183,15
Perkembangan (%)	-	-26,28	54,65	30,92	-98,51	-9,80
Lampung	2.929,2	3.144,7	4.844,0	5.601,1	4.645,7	4.232,9
Perkembangan (%)	-	7,36	54,04	15,63	-17,06	14,99
Kep. Bangka Belitung	1.451,3	1.291,1	2.672,1	2.640,1	2.034,7	2.017,9
Perkembangan (%)	-	-11,04	106,96	-1,20	-22,93	17,95
Kep Riau	12.789,7	11.951,6	15.969,0	19.626,1	18.938,3	15.854,9
Perkembangan (%)	-	-6,55	33,61	22,90	-3,50	11,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan nilai ekspor di provinsi-provinsi Pulau Sumatera menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2019-2023. Beberapa provinsi mengalami peningkatan ekspor yang signifikan, sementara yang lain menghadapi penurunan pada tahun-tahun tertentu. Riau dan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan rata-rata masing-masing sebesar 18.906,0 juta USD dan 15.854,9 juta USD selama lima tahun terakhir. Riau mencatat pertumbuhan ekspor yang relatif stabil dengan

kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 43,94%. Sementara itu, Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dengan lonjakan ekspor sebesar 33,61% pada 2021 dan 22,90% pada 2022, tetapi mengalami sedikit penurunan sebesar -3,50% pada 2023. Sebaliknya, provinsi dengan nilai ekspor paling rendah adalah Bengkulu, dengan rata-rata hanya 183,15 juta USD, terutama akibat penurunan drastis sebesar -98,51% pada tahun 2023. Fluktuasi nilai ekspor ini mencerminkan dinamika perdagangan global, harga komoditas, serta kebijakan ekspor yang diterapkan di setiap daerah.

Jika dilihat dari tren perkembangan, beberapa provinsi mengalami pertumbuhan ekspor yang signifikan, terutama Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Sumatera Utara menunjukkan kenaikan ekspor tertinggi pada 2021 sebesar 46,58%, sedangkan Riau dan Sumatera Selatan masing-masing mencatat pertumbuhan ekspor sebesar 43,94% dan 46,74% di tahun yang sama. Namun, pada 2023, beberapa provinsi mengalami penurunan ekspor, seperti Sumatera Utara (-19,14%), Jambi (-26,95%), dan Sumatera Selatan (-13,17%). Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan permintaan global, kebijakan perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas utama yang diekspor oleh masing-masing provinsi. Sebaliknya, Riau tetap menunjukkan peningkatan ekspor sebesar 16,31% pada 2023, yang mengindikasikan bahwa provinsi ini memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap perubahan kondisi ekonomi global dibandingkan provinsi lainnya.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekspor di Pulau Sumatera selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi tahunan,

ekspor dari provinsi-provinsi utama tetap tumbuh secara positif. Aceh, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang lebih tidak stabil dibandingkan provinsi lainnya. Aceh, misalnya, mengalami lonjakan ekspor 67,41% pada 2021, tetapi mengalami penurunan signifikan sebesar -17,44% pada 2023. Jambi mengalami pertumbuhan ekspor yang relatif baik pada 2021 dan 2022, tetapi penurunannya pada 2023 cukup tajam. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung mencatat pertumbuhan ekspor tertinggi pada 2021 sebesar 106,96%, namun mengalami tren negatif pada 2023 (-22,93%). Faktor-faktor seperti ketergantungan pada komoditas tertentu, kondisi ekonomi global, serta kebijakan ekspor-impor menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai ekspor di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, perlu adanya strategi diversifikasi ekspor dan penguatan industri hilir untuk meningkatkan daya saing ekspor di tingkat nasional dan internasional.

4.5 Nilai Ekspor

Nilai impor adalah total nilai barang dan jasa yang dibeli oleh suatu negara dari negara lain dalam periode tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam mata uang tertentu, seperti dolar AS (USD) atau mata uang lokal. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri atau untuk mendapatkan bahan baku dan barang modal yang mendukung industri domestik. Nilai impor suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan perdagangan, nilai tukar mata uang, harga komoditas global, dan tingkat permintaan dalam negeri. Jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara tersebut mengalami defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih kecil dari

ekspor, negara akan mengalami surplus neraca perdagangan. Untuk mengetahui perkembangan nilai ekspor pada Provinsi di Pulau Sumatera selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Perkembangan Nilai Impor pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)

Wilayah	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Aceh	131,2	126,3	119,1	113,5	148,1	127,6
Perkembangan (%)	-	-3,73	-5,71	-4,70	30,48	4,09
Sumatera Utara	4.530,3	3.979,9	5.091,2	6.134,8	7.109,1	5.369,1
Perkembangan (%)	-	-12,15	27,92	20,50	15,88	13,04
Sumatera Barat	10,8	11,8	27,7	20,4	30,6	20,3
Perkembangan (%)	-	9,46	134,49	-26,17	49,98	41,94
Riau	1.378,1	1.207,8	1.626,4	2.980,5	2.335,9	1.905,7
Perkembangan (%)	-	-12,36	34,66	83,26	-21,63	20,98
Jambi	753,9	652,5	319,1	380,1	786,1	578,3
Perkembangan (%)	-	-13,45	-51,10	19,12	106,81	15,35
Sumatera Selatan	511,6	938,7	951,4	913,7	1.164,4	895,96
Perkembangan (%)	-	83,48	1,35	-3,96	27,44	27,08
Bengkulu	27,7	3,3	1,8	0,0	0,0	6,6
Perkembangan (%)	-	-88,19	-44,95	0,00	0,00	-33,29
Lampung	2.858,1	1.343,7	2.217,0	2.534,1	2.163,9	2.223,4
Perkembangan (%)	-	-52,99	64,99	14,30	-14,61	2,93
Kep. Bangka Belitung	16,0	14,6	34,2	75,0	19,5	31,9
Perkembangan (%)	-	-8,75	134,25	119,30	-74,00	42,70
Kep Riau	10.765,3	11.263,7	14.427,7	16.717,1	17.795,0	14.193,8
Perkembangan (%)	-	4,63	28,09	15,87	6,45	13,76

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan nilai impor di provinsi-provinsi Pulau Sumatera dalam periode 2019-2023 menunjukkan pola yang bervariasi, dengan beberapa provinsi mengalami peningkatan signifikan, sementara yang lain menunjukkan penurunan atau fluktuasi tajam. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan nilai impor tertinggi, dengan rata-rata impor sebesar 14.193,8 juta USD. Tren impor di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, dengan peningkatan

tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 28,09%, diikuti oleh kenaikan 15,87% pada 2022 dan 6,45% pada 2023. Sumatera Utara juga memiliki nilai impor yang cukup tinggi dengan rata-rata 5.369,1 juta USD, mengalami lonjakan signifikan pada 2021 sebesar 27,92% dan terus meningkat hingga 2023. Sebaliknya, provinsi dengan nilai impor terendah adalah Bengkulu, dengan rata-rata hanya 6,6 juta USD dan mengalami penurunan drastis dalam lima tahun terakhir, bahkan mencapai 0,0 juta USD pada 2022 dan 2023. Pola ini menunjukkan bahwa provinsi dengan sektor industri dan perdagangan besar cenderung memiliki nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan ekonomi berbasis sumber daya alam yang lebih terbatas.

Tren impor di beberapa provinsi juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Misalnya, Sumatera Barat mengalami lonjakan impor tertinggi pada 2021 sebesar 134,49%, meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar -26,17%. Begitu juga dengan Kepulauan Bangka Belitung yang mencatat pertumbuhan impor sebesar 134,25% pada 2021 dan 119,30% pada 2022, tetapi mengalami penurunan tajam sebesar -74,00% pada 2023. Riau menunjukkan peningkatan impor yang cukup tajam pada 2022 sebesar 83,26%, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku industri atau komoditas tertentu. Namun, pada 2023, nilai impor Riau turun sebesar -21,63%, yang menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan perdagangan atau permintaan barang impor. Jambi juga mengalami pola yang hampir serupa, dengan penurunan drastis pada 2021 (-51,10%) tetapi mengalami lonjakan signifikan pada 2023 sebesar 106,81%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa impor di beberapa

provinsi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan industri dan faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan global dan nilai tukar mata uang.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan impor di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa meskipun ada tren positif dalam beberapa provinsi, banyak daerah mengalami ketidakstabilan dalam nilai impor mereka. Sumatera Selatan, misalnya, mengalami peningkatan impor yang cukup konsisten dengan rata-rata pertumbuhan 27,08%, menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kebutuhan impor yang stabil untuk mendukung industrinya. Sementara itu, Lampung yang memiliki rata-rata impor sebesar 2.223,4 juta USD juga mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2021 sebesar 64,99%, tetapi mengalami penurunan pada 2023 sebesar -14,61%. Provinsi seperti Aceh dan Jambi memiliki pertumbuhan impor yang lebih moderat dengan rata-rata masing-masing 4,09% dan 15,35%. Berdasarkan pola ini, dapat disimpulkan bahwa impor di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan industri, fluktuasi harga barang impor, serta kebijakan ekonomi domestik dan internasional. Untuk meningkatkan stabilitas perdagangan, provinsi-provinsi di Sumatera perlu mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan di wilayah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Metode analisis data sekunder adalah suatu metode dalam menganalisis suatu permasalahan atau fenomena dalam ekonomi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, diolah, disajikan dan dilaporkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2019). Metode pengumpulan data sekunder sering disebut dengan penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini peneliti tidak langsung melakukan penelitian sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak lain.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (time series data) selama kurun waktu tahun 2019-2023 dan data deret lintang (cross section data) yang meliputi 10 Provinsi di Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera periode 2019-2023
- b. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Sumatera periode 2019-2023
- c. Tingkat Pengangguran Provinsi di Sumatera periode 2019-2023
- d. Realisasi Belanja Modal Provinsi di Sumatera periode 2019-2023
- e. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah di Sumatera periode

2019-2023

- f. Investasi yang diukur dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Sumatera periode 2019-2023
- g. Realisasi Ekspor netto Provinsi di Sumatera periode 2019-2023

3.2.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari publikasi dan informasi data serta laporan-laporan yang dilakukan oleh dinas dan instansi terkait. Untuk memperoleh landasan teori, studi sebelumnya dan kerangka pemikiran dilakukan studi kepustakaan berupa buku-buku literatur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Badan Pusat Statistik
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan persoalan yang didukung oleh fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis, sementara analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data menggunakan regresi berganda data panel.

3.3.1 Analisis Deskriptif

Adapun untuk menganalisis tujuan penelitian pertama yaitu perbandingan kinerja ekonomi antara wilayah Sumatera dilihat dari pertumbuhan ekonomi,

tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera dengan menggunakan formula berikut ini (Halim, 2004):

$$X_G = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

X_G = Perkembangan

X_t = Data Tahun sekarang

X_{t-1} = Data Minimum Tahun sebelumnya

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Menurut (Ghozali, 2013) bahwa data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu.

Keunggulan regresi data panel menurut (Ghozali, 2013) antara lain : *Pertama*. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; *kedua*. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode datapanel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data semakin

berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; *Kelima*, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; *Keenam*, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu, metode *Common Effect (pooled least square)*, metode *Fixed Effect (FE)*, dan metode *Random Effect (RE)* (Ghozali, 2013).

Metode *Common Effect* adalah metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

Metode *Fixed Effect* adalah metode yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu (Ghozali, 2013). Namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar waktu (*time invariant*). Akan tetapi metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

Metode *Random Effect* adalah metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Ghozali, 2013). Teknik yang digunakan dalam Metode *Random Effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, atau metode *Random Effect*. (Ghozali, 2013)

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan metode *Common Effect* atau dengan metode *Fixed Effect*, apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji Hausman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji *Hausman* untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood ratio test*, dengan asumsi yaitu:

H_0 : model mengikuti *Pool*, dan H_1 : model mengikuti *Fixed*.

Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test dengan asumsi, yaitu:

H_0 : model mengikuti *Random Effect* H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Adapun model regresi data panel sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil penelitian pada tujuan penelitian pengaruh belanja modal, Pendidikan, investyasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menggunakan persamaan regresi data panel berikut ini :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 EN_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

2. Untuk mengetahui hasil penelitian pada tujuan penelitian pengaruh belanja modal, Pendidikan, investyasi dan ekspor netto terhadap Tingkat kemiskinan yaitu menggunakan persamaan regresi data panel berikut ini :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 EN_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

3. Untuk mengetahui hasil penelitian pada tujuan penelitian pengaruh belanja modal, Pendidikan, investyasi dan ekspor netto terhadap Tingkat pengangguran yaitu menggunakan persamaan regresi data panel berikut ini:

$$TP_{it} = \beta_0 + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 EN_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana :

- β_0 = intersep,
- β_1 dan β_2 = parameter yang diduga dan menggambarkan hubungan variabel independent dengan variabel dependent,
- ε_{it} = Error Term,
- PE_{it} = pertumbuhan ekonomi pada provinsi i periode t,
- TK_{it} = Tingkat Kemiskinan pada provinsi i periode t,
- TP_{it} = Tingkat Pengangguran pada provinsi i periode t,
- BM_{it} = Belanja Modal Pemerintah pada provinsi i periode t,
- PD_{it} = Pendidikan pada provinsi i periode t,
- I_{it} = Investasi pada provinsi i periode t,
- EN_{it} = Ekspor netto pada provinsi i periode t,

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program *EViews ver 9*. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini.

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $p \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $p \text{ value} < 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

3.3.2.1 Analisis koefisien determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari independen variabel yaitu efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap dependen variabel yaitu keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh dari variable bebas.

3.3.2.2 Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika signifikansi F lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan kata lain jika nilai signifikansi F lebih dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5 %.

3.3.2.3 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependent secara nyata.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini.

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak $p \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima $p \text{ value} < 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.2.4. Uji Asumsi Klasik

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Hariyanto, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2012). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel.

3.4. Operasional Variabel

Perumusan definisi operasional variabel dalam penelitian empirik dilakukan untuk menghindari perbedaan terhadap variabel-variabel penelitian, dalam penelitian ini beberapa operasional variabelnya adalah ;

1. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang sudah dipublikasi untuk 10 provinsi di Sumatera dari tahun 2019-2023 dalam satuan persen.
2. Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang bersumber dari publikasi resmi BPS yang dinyatakan dalam persen.
3. Tingkat Pengangguran adalah persentase tingkat pengangguran terbuka yang bersumber dari publikasi resmi BPS dalam satuan persen.
4. Belanja Modal adalah realisasi belanja modal pemerintah diperoleh dari laporan realisasi APBD yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
5. Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang dinyatakan dalam tahun.
1-6 Tahun = SD
7-9 Tahun = SMP
8-9 Tahun = SMA
6. Investasi adalah realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut lokasi yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
7. Ekspor netto adalah selisih antara nilai ekspor dan impor yang dinyatakan dalam satuan ribu US\$.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tan (2010), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan suatu negara atau daerah dalam jangka panjang, dalam perhitungannya selalu dihitung dalam satu tahun. Dari pengertian tersebut, ada tiga kunci yaitu : (1), proses berarti pertumbuhan ekonomi dicapai melalui sistem perencanaan yang benar, memerlukan waktu dan mengikuti pola pertumbuhan normal; (2), indikator yang digunakan adalah pendapatan yang disebut dengan PDB atau PDRB; dan (3), keberhasilan dilihat dalam jangka panjang, menunjukkan dimensi waktu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil per tahun adalah suatu yang rasional, sebagai akibat banyak faktor yang mempengaruhinya tetapi dalam jangka panjang harus menunjukkan kecenderungan meningkat.

Menurut Mankiw (2013) teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai factor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, mengenai bagaimana factor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi daerah menurut Todaro, Michael & Smith, (2013) “Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu.” Karena itu pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada Tahun tertentu

ke Tahun berikutnya. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara normatif apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka pembangunan manusia akan meningkat

Pertumbuhan ekonomi menurut Latifah (2017), adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian ini mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Adam Smith memaparkan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memandang kepada:

- a. Adanya hukum alam. Adam Smith sangat percaya dengan prinsip bahwa hanya individu sendirilah yang tahu akan kebutuhannya, tidak orang lain apalagi pemerintah. Ia beranggapan bahwa adanya kekuatan yang tidak kentara (*invisiblehand*) menyebabkan setiap perekonomian akan

memperlakukan individu sesuai dengan harapannya. Jadi bila semua orang dibebaskan berusaha, maka akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat.

- b. Peningkatan daya produktivitas tenaga kerja berhubungan dengan:
 - Meningkatkan keterampilan kerja
 - Penghematan waktu dalam memproduksi barang
 - Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga kerja
- c. Proses penumpukan (akumulasi) modal. Menurutnya proses akumulasi modal meningkat seiring meningkatnya tabungan, dan dari tabunganlah asalnya investasi. Dengan demikian juga bila pendapatan naik sementara konsumtif relatif tetap maka tabungan akan semakin tinggi dan berdampak pada penyediaan modal yang semakin banyak untuk investasi.
- d. Tingkat keuntungan akan semakin menurun manakala tingkat persaingan semakin tinggi. Padahal persaingan berasal dari kemampuan investasi yang memajukan perekonomian. Pada masa ini tingkat suku bunga akan semakin menurun karena meningkatnya kemakmuran, kesejahteraan dan jumlah penduduk meningkat. Akibat dari itu maka cadangan modal akan bertambah besar sehingga investasi semakin murah dan akan berdampak pada semakin murahnya produksi.
- e. Petani, pengusaha dan produsen adalah merupakan agen pertumbuhan dalam perekonomian. Bila pertanian meningkat maka usaha industry dan perniagaan akan semakin meningkat dan tentu saja akan memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian karena adanya rantai kebutuhan dan

kepentingan.

- f. Proses pertumbuhan bersifat menggumpal (mengakumulatif), setiap peningkatan di bidang pertanian maka akan ada peningkatan dibidang industri dan perniagaan an seterusnya sampai terjadi kelangkaan sumber daya sehingga perekonomian mengalamikondisi stasioner.

2. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod di Inggris dan Evsey D. Domar di Amerika Serikat Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana ketnes melihat jangka pendek (kondisi stalis) sedangkan Harrod-Domar melihat dalam jangka panjang (kondisi dinamis), teori ini didasarkan pada:

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan,
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*),
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Kesimpulan dari teori Harrod-Domar bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh proses produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut

$$g = k = n. \dots\dots\dots(2.1)$$

Di mana: $g = Growth$ (tingkat pertumbuhan *output*)

$k = Capital$ (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$ tingkat pertumbuhan angkatan kerja.

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio* = rasio modal *output*), apabila tabungan dan investasi adalah sama (J = S), maka:

$$\frac{1}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} = \frac{Y}{K} = \frac{S/Y}{K/Y} = \frac{S}{V} \dots\dots\dots(2.2)$$

Karena S, v, dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit tercapai kondisi pertumbuhan mantap. Harrod-Domar mendasarkan teorinya tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam posisi penawaran dan sisi permintaan barang.

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran, Menurut teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots\dots\dots(2.3)$$

Di mana:

- ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi.
- ΔK = tingkat pertumbuhan modal.
- ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk.
- ΔT = tingkat perkembangan teknologi.

Menurut Solow ini faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakatan tenaga kerja.

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik tradisional pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih tiga faktor, yakni kenaikan kualitas dan kuanlitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro & Smith, 2011).

2.1.2 Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Haughton & Khander (2012) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Menurut Jhingan (2016) kemiskinan juga dapat diakibatkan di antaranya oleh keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung kemampuan produktif manusia. Penduduknya banyak yang miskin dan berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswataan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru terbengkalai, tidak berkembang, atau bahkan salah guna. Sumber daya alam ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia. Kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia.

Menurut Yacaoub (2012) kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, kerana kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara..

Purnamawati, (2021) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sistem ekonomi, yaitu: (1) secara mikro, disebabkan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, (2) adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, dan (3) adanya perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki suatu kelompok dalam mengakses pembangunan (Purnamawati, 2021). Adapun sebab kelompok miskin di Indonesia terbatas dalam mengakses sumber daya pembangunan (Purnamawati, 2021), antara lain: (1) konstelasi struktur ekonomi dan politik yang otoriter dan tidak berpihak pada golongan lemah, (2) terbentuknya struktur ekonomi dan politik yang diakibatkan pola insentif institusional yang bersifat mencari keuntungan pribadi/golongan (*rent seeking behavior*), otoriter; dan sentralistis.

Purnamawati (2021) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri.

Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: (1) kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan

yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: perkembangan miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Menurut , kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu (Andriani & Sukmawati, 2022):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut BPS, nilai nominal garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 354.000 per kapita per bulan di Bulan April 2016.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Padriyansyah & Syahputera (2022) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun

2. Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
3. Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.
4. Accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020) ciri-ciri kemiskinan itu terdiri dari :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti
 - a) Kesehatan
 - b) Pendidikan
 - c) Sanitasi
 - d) Air bersih
 - e) Transportasi
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
- f. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

Kriteria Miskin Menurut Standar (Badan Pusat Statistik, 2020) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Andriani & Sukmawati (2022), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per Tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Menurut (Kumalasari & Poerwono, 2016) faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat.
2. Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.
3. Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

Todaro & Smith (2013) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan alam suatu wilayah atau negara yang tidak subur dan tidak mempunyai sumber daya alam potensial. Namun, faktor ini mendapat kritikan.
2. Kemiskinan karena penjajahan. Negara yang mengalami penjajahan dalam waktu yang lama akan menjadi miskin karena diperas oleh penjajah. Namun, faktor ini juga mendapat kritikan.
3. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural. Kemiskinan ini turun temurun dari nenek moyang karena sulitnya merubah kebiasaan penduduk. Misalnya suku-suku di pedalaman.
4. Kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Kemiskinan daerah yang disebabkan karena daerah tersebut jauh dari perkotaan dan sulitnya jalur transportasi.
5. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara kota dengan desa dan adanya persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan pada suatu negara, juga disebabkan karena:

1. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian
Negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian akan menyebabkan negara tersebut miskin. Hal ini disebabkan produktivitas

pertanian lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, apalagi pertanian yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional dengan waktu lama dan harga jual yang kurang layak, menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.

2. Ekonomi dualitas.

Perekonomian dualitas merupakan perekonomian yang berpusat pada dua pihak. Pihak pertama berpusat pada perekonomian pasar dan lainnya berekonomi pertanian. Ekonomi pasar mempunyai ciri modern, sedangkan ekonomi pertanian terbelakang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan pada penduduk kota dan desa.

3. Sumber alam yang kurang terolah

Sumber daya alam yang kurang terolah menyebabkan negara tidak mampu berkembang untuk mencari sumber daya alam yang baru.

4. Pengangguran dan pengangguran tersembunyi

Pengangguran yang berpendidikan muncul karena mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

5. Ketiadaan inisiatif dan usaha

Tidak adanya inisiatif dan usaha dari masyarakat untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa berkembang dan mampu meningkatkan pendapatannya.

6. Kelangkaan modal

Negara terbelakang mempunyai modal dan tabungan yang sangat kecil. Investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan negara industri mencapai kira-kira 15-20%.

7. Keterbelakangan teknologi termin dalam ongkos produksi yang tinggi, upah buruh rendah, besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih dan mahalny barang-barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi suatu produk.

Bappenas (2011) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan dari 2 macam berikut ini :

1. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor- faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

2. Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, oleh karena itu mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membesakan diri dari perangkap kemiskinan atau

dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2010) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaankeadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di

Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu.

Dari segi penawaran modal dan permintaan modal. Dari segi penawaran modal ingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

2.1.3 Konsep Pengangguran

Menurut Hasyim (2017) pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh golongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan

tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (Unemployment) merupakan masalah yang selalu hampir ada dalam setiap perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada situasi atau keadaan dimana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.

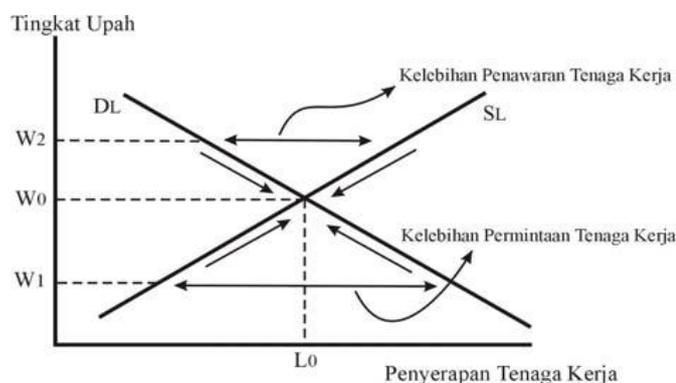
Pengangguran merupakan seseorang yang tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan pekerjaan apa pun, sedang mencari kerja, selama seminggu hanya bekerja kurang dari dua hari, atau yang dalam tahap berusaha memperoleh pekerjaan yang pantas (Prawoto, 2021).

Pengangguran berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS mengartikannya sebagai seseorang yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak memiliki batasan waktu satu minggu saja, namun dapat dilakukan dalam periode sebelumnya selama dalam kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih berada pada status masih menunggu respons dari lamaran. Menurut Sukimo dalam (Prawoto, 2021) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada perekonomian baik secara aktif mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan.

Perhitungan tingkat pengangguran diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur dengan jumlah Angkatan Kerja (AK). Sedangkan angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja dikurangi dengan penduduk nonangkatan kerja (siswa, mahasiswa, ibu rumah

tangga). Kemudian ada istilah yang disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua jumlah penduduk dilibatkan dalam perhitungan tingkat pengangguran dikarenakan dalam jumlah penduduk tersebut terdapat penduduk bukan usia kerja, seperti anak-anak usia muda di bawah 15 Tahun dan penduduk usia tua di atas 64 Tahun (Prawoto, 2021).

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Mankiw (2013) menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), di mana tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan yang cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output, tingkat penyerapan tenaga kerja (*level of employment*) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan oleh segenap harga-harga output dan faktor-faktor produksi selain tenaga kerja.



Gambar 2.2. Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja

Gambar 2.1. memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar tenaga kerja,

SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah ekuilibrium (W_0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W_2) penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja, sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium (W_0). Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah (W_1) jumlah total tenaga kerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas penawaran yang ada, sehingga terjadi persaingan di antara para perusahaan atau produsen dalam memperebutkan tenaga kerja. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium. Pada titik W_0 jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu horisontal adalah sebesar L_0 . Secara definitif, pada titik L_0 inilah tercipta kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (*full employment*). Artinya pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak akan terdapat pengangguran, kecuali pengangguran secara sukarela

Berdasarkan akibat penyebabnya, pengangguran dikelompokkan menjadi tiga macam antara lain sebagai berikut (Prawoto, 2021).

1. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran disebabkan adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Jenis pengangguran konjungtur tersebut disebabkan adanya perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi, jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya jika tingkat kegiatan ekonomi menurun maka

pengangguran tinggi. Secara mikro ketika perusahaan dalam kondisi maju maka akan membutuhkan karyawan atau tenaga kerja untuk pengembangan usahanya.

Kebalikannya jika usaha suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian terus-menerus akan menyebabkan pengurangan pegawai dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengangguran ini baik di negara maju dan berkembang relatif dominan dibanding dengan jenis pengangguran lainnya, karena langsung berhubungan dengan kondisi ekonomi di negara tersebut.

2. Pengangguran Struktural

Penyebab terjadinya pengangguran struktural karena terdapat struktur ekonomi yang mengalami ekonomi. Perubahannya menyebabkan perlunya ada perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Namun, tenaga kerja tidak dapat menyesuaikan adanya perubahan keterampilan baru tersebut. Pada dasarnya, ada tiga hal yang dapat memengaruhi pengangguran struktural, antara lain: mobilitas tenaga kerja, kecepatan perubahan struktural serta aspek regional dari adanya struktural yang berubah tersebut. Pada kasus karyawan yang memiliki mobilitas tinggi, pendidikan tinggi dapat menyebabkan perubahan antar sektor berlangsung lebih cepat dan hal tersebut meminimalkan pengangguran struktural. Kecepatan struktural yang berubah pun turut berpengaruh. Dapat dimisalkan jika adanya

perubahan yang sangat cepat, karyawan akan melewati masa sulit untuk beradaptasi.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional diakibatkan adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sulitnya penyesuaian yang dimaksud tidak hanya berbentuk waktu yang dibutuhkan namun juga prosedur pelamaran dan seleksi, karena faktor jarak atau sedikitnya mendapatkan informasi. Jenis pengangguran ini juga dapat terjadi akibat kurangnya fasilitas pencari kerja di mana lowongan pekerjaan justru berada di lokasi yang tidak sesuai dengan si pencari pekerjaan.

Setiap hari sebagian pekerja kehilangan atau keluar dari pekerjaannya, dan sebagian lagi yang menganggur diterima bekerja. Pasang surut yang terjadi secara terus menerus ini menentukan bagian dari angkatan kerja yang menganggur. Dalam bagian ini kita akan mengembangkan sebuah model dinamika angkatan kerja yang menunjukkan hal-hal faktor-faktor penentu tingkat pengangguran alamiah (Mankiw, 2013).

Kita akan mengawalinya dengan beberapa notasi. Notasi L menunjukkan angkatan kerja, E jumlah orang yang bekerja, dan U jumlah pengangguran. Karena setiap orang dalam usia kerja bervariasi antara bekerja atau menganggur, maka angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan menganggur :

$$L = E + U \dots\dots\dots (2.4)$$

Dalam notasi ini, tingkat pengangguran adalah U/L .

Untuk melihat apakah yang menentukan tingkat pengangguran, kita asumsikan bahwa angkatan kerja L adalah tetap dan memfokuskan pada perubahan individu dalam angkatan kerja di antara yang bekerja E atau menganggur U . Notasi s menunjukkan tingkat pemutusan kerja, bagian dari tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya setiap bulannya. Notasi f menunjukkan tingkat perolehan pekerjaan, bagian dari pengangguran yang mendapatkan pekerjaan setiap bulannya. Tingkat pemutusan kerja s dan tingkat perolehan pekerjaan f secara bersama-sama menentukan tingkat pengangguran.

Jika tingkat pengangguran tidak naik atau turun yaitu, pasar tenaga kerja berada dalam kondisi mapan, maka jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan harus sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Jumlah orang yang memperoleh pekerjaan adalah fU dan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan adalah sE , sehingga kita bisa menulis kondisi mapan sebagai berikut :

$$fU = sE \dots\dots\dots (2.5)$$

Kita dapat menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan tingkat pengangguran kondisi mapan. Dari definisi angkatan kerja, kita ketahui bahwa $E = L - U$, yaitu, jumlah orang yang bekerja sama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Jika kita mengganti $(L - U)$ untuk E dalam kondisi mapan, diperoleh:

$$fU = s(L - U) \dots\dots\dots (2.6)$$

Untuk mendapatkan tingkat pengangguran, kedua sisi dibagi dengan L untuk mendapatkan :

$$f \frac{U}{L} = s \left(1 - \frac{U}{L}\right) \dots\dots\dots (2.7)$$

Sekarang, cari U/L :

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s+f} \dots\dots\dots (2.8)$$

Persamaan ini bisa juga ditulis :

$$\frac{U}{L} = \frac{1}{1+f/s} \dots\dots\dots (2.9)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran kondisi mapan U/L bergantung pada tingkat pemutusan kerja s dan tingkat perolehan kerja f. Semakin tinggi tingkat pemutusan kerja, semakin tinggi tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat perolehan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran.

Pada setiap waktu tertentu terdapat sejumlah, atau sekelompok, pengangguran, dan terdapat arus keluar masuk dari kelompok pengangguran (*unemployment full*) tersebut. Seseorang bisa menjadi pengangguran akibat dari salah satu dari empat alasan berikut (Mankiw, 2013):

1. Ia mungkin baru memasuki angkatan kerja-orang yang baru pertama kali mencari pekerjaan-atau mungkin orang yang masuk kembali-memasuki angkatan kerja kembali setelah tidak mencari pekerjaan selama lebih dari 4 minggu.
2. Orang yang keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan baru dan terdaftar sebagai pengangguran ketika sedang mencari pekerjaan.
3. Orang yang mungkin diberhentikan sementara. Definisi didefinisikan sementara ialah penangguhan kerja tanpa diupah yang diekspektasi lebih dari 7 hari, dilakukan oleh pemberi kerja”tanpa diadili terlebih dahulu”.
4. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik karena dipecat maupun karena perusahaannya bangkrut.

Menurut Mankiw (2013) seseorang bisa menjadi pengangguran akibat salah satu dari empat alasan berikut ini :

1. Ia mungkin baru memasuki angkatan kerja, orang yang baru pertama kali mencari pekerjaan atau mungkin orang yang masuk kembali memasuki angkatan kerja kembali setelah tidak mencari pekerjaan selama lebih dari 4 minggu.
2. Orang yang keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan baru dan terdaftar sebagai pengangguran ketika sedang mencari pekerjaan.
3. Orang yang mungkin diberhentikan sementara. Definisi diberhentikan sementara ialah penangguhan kerja tanpa diupah yang diekspektasi lebih dari 7 hari, dilakukan oleh pemberi kerja “tanpa prasangka pada pekerja”.
4. Para pekerja dapat kehilangan pekerjaan, baik karena dipecat maupun karena perusahaannya bangkrut.

Pengangguran timbul selain disebabkan karena kelebihan tenaga kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia, juga disebabkan karena faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi tersebut antara lain pranata dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan hak kerja, serta ketidakcocokan kualifikasi pekerjaan dengan tingkat keahlian atau pendidikan yang dimiliki, selera dan atau aspirasi mereka. Pengangguran secara umum dapat dirinci sebagai berikut (Soleh et al., 2019) :

1. Pengangguran friksi (*frictional unemployment*)

Yaitu pengangguran yang diakibatkan karena berpindahnya pekerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain sehingga terdapat tenggang waktu yang

membuat seseorang berstatus pengangguran sebelum mendapat pekerjaan yang lainnya.

2. Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)

Yaitu pengangguran sementara yang diakibatkan oleh pergantian musim panen dan musim tanam.

3. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Atau pengangguran yang terjadi apabila perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau *full employment*.

4. Pengangguran yang diakibatkan oleh kelebihan yang kronis dari total penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja.

Selain pengangguran seperti yang diungkapkan di atas, pengangguran juga dapat digolongkan menjadi setengah pengangguran (*under employment*).

Kelompok setengah pengangguran ini dapat pula dibedakan menjadi :

5. Pengangguran tidak kentara (*disgued unemployment*)

Yaitu pengangguran yang bekerja memenuhi jam kerja normal tetapi berada pada jabatan atau posisi yang sebetulnya membutuhkan kualifikasi atau kapasitas di bawah atau lebih rendah dari yang ia miliki.

6. Setengah menganggur kentara (*visible unemployment*)

Yaitu mereka yang bekerja di bawah jam normal (35 jam per minggu).

7. Setengah menganggur potensial (*potential unemployment*)

Yaitu mereka yang bekerja memenuhi jam kerja normal dengan kapasitas normal tetapi output yang dihasilkan sangat rendah karena faktor organisasi, faktor teknis dan keterbatasan lainnya di tempat ia bekerja.

2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Christia & Ispriyarso, 2019).

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada wimp menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan

pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap iru perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil (Nahumuri, 2019).

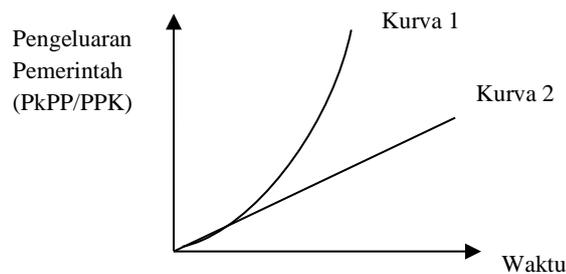
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan penge-luaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan *The Law of Expanding State Expenditure*. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah hams mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mardiasmo, 2018).

Atas penelitian tersebut ia menemukan bahwa belanja pemerintah terus mengalami peningkatan terutama karena pemerintah harus mengatur kegiatan/hubungan/aktivitas yang ada dalam masyarakat (Idris, 2018). Hubungan-hubungan seperti pendidikan, kebudayaan, hukum, rekreasi, dan sebagainya merupakan kepentingan yang harus diatur oleh pemerintah, sebab di negara maju ketika terjadi kegagalan pasar, maka bisa saja kegagalan dari suatu industri menimpa industri lain yang saling berkaitan di negara tersebut (Gulo et al., 2017). Selain itu meningkatnya belanja pemerintah juga disebabkan karena terjadinya urbanisasi, meningkatnya pendapatan masyarakat, tuntutan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, berkembangnya ekonomi dan demokrasi, serta ketidakefisienan birokrasi pemerintah (Mardiasmo, 2018). Teori Wagner ini juga dikenal dengan sebutan Hukum Wagner. Hukum Wagner dapat dituliskan dengan rumus:

$$\frac{PkPP_1}{PPK_1} < \frac{PkPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{PkPP_n}{PPK_n}$$

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
 PPK : Pendapatan per kapita 1,2,...,
 n : Jangka waktu (tahun)

Sementara itu, kurva mengenai peningkatan belanja pemerintah yang digambarkan oleh Wagner dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah

Kurva pertumbuhan pengeluaran pemerintah digambarkan oleh Kurva 1 dengan bentuk eksponensial dan cembung bukan digambarkan oleh Kurva 2 yang berbentuk linear (Nasution, 2018).

Dalam teori ini Peacock dan Wiseman mengutarakan sebuah teori pengeluaran pemerintah yang lebih memperhatikan pola waktu, karena perkembangan pengeluaran pemerintah tidaklah bersifat *continuous growth*, tetapi mirip dengan rumah tangga (*step like*). Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, padahal hal tersebut sangat tidak disukai oleh masyarakat. Namun, Peacock dan Wiseman berpegang pada teori dimana pada titik tertentu masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi terhadap pajak, sehingga meskipun pajak yang dipungut oleh pemerintah cukup besar, tetapi pada tingkatan tertentu mereka bersedia membayar pajak tersebut. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus berhati-hati karena apabila jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melebihi batas toleransi masyarakat, maka masyarakat akan cenderung enggan untuk membayar pajak tersebut (Nahumuri, 2019).

Kesimpulan atas teori ini adalah bahwa meskipun tarif pajak yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, tetapi pertumbuhan ekonomi menyebabkan pajak yang dipungut oleh pemerintah semakin meningkat. Semakin meningkatnya penerimaan negara ini maka akan menyebabkan pengeluaran negara juga akan naik. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan peningkatan pada pengeluaran pemerintah, yakni i) efek penggantian (*displacement effect*), yang

merupakan suatu gangguan sosial yang mengakibatkan teralihnya aktivitas swasta ke aktivitas pemerintah, seperti terjadinya perang, ii) efek inspeksi (*inspection effect*), yang merupakan kegiatan pengembalian pinjaman dan aktivitas baru pasca perang, dan iii) efek konsentrasi (*concentration effect*), yang merupakan gangguan sosial yang menyebabkan terjadinya perpindahan fokus aktivitas dari yang sebelumnya dilakukan oleh swasta ke pemerintah. Setelah perang usai dan situasi kembali normal, maka tingkat pajak akan kembali turun (Idris, 2018)

2.1.5. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim & Kusufi, 2012). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2010). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

(Dewi, 2006) dan (Syaiful, 2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah pengeluaran pemerintah yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Jenis belanja ini dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan aktivitas atau output yang dihasilkan.

Contohnya:

- a. Belanja Pegawai: Honorarium tenaga kerja atau pegawai yang terlibat langsung dalam suatu program atau kegiatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa: Pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang digunakan langsung dalam pelaksanaan program, seperti alat tulis, peralatan, atau bahan baku.
- c. Belanja Modal: Pengeluaran untuk pembelian aset tetap atau pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan.

Belanja langsung mudah dikaitkan dengan tujuan spesifik, dan realisasinya diukur melalui pencapaian output kegiatan.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran pemerintah yang tidak secara langsung terkait dengan program atau kegiatan tertentu, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung kelangsungan fungsi pemerintahan. Contohnya:

1. Belanja Pegawai: Gaji tetap dan tunjangan untuk seluruh pegawai pemerintah yang tidak terkait dengan kegiatan tertentu.
2. Belanja Subsidi: Dana yang dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau sektor tertentu, seperti subsidi bahan bakar.
3. Belanja Hibah: Pemberian dana kepada pihak ketiga (masyarakat atau organisasi) tanpa mengharapkan pengembalian.
4. Belanja Bantuan Sosial: Dana yang digunakan untuk program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
5. Belanja Bagi Hasil: Alokasi dana kepada daerah sesuai dengan peraturan.

Belanja tidak langsung biasanya bersifat rutin dan lebih fokus pada fungsi pemerintahan secara umum.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama (Syaiful, 2008) yaitu :

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambaha/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalm kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan,irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku serta jurnal ilmiah.

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 53 ayat (1), Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Ayat (2) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Ayat (4), Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Dalam PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Dalam Pemendagri No. 13 tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut PP No. 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

2.1.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang bisa menciptakan kemajuan dan perkembangan aktivitas kehidupan manusia. Dengan pendidikan manusia akan memiliki ide-ide baru yang memungkinkan dapat mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Tjiptoherijanto, 2002) mengatakan bahwa aspek pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Dia mengatakan bahwa dasar peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat itu diawali dari peningkatan kualitas mereka. Dan faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan.

Kemudian Jhon Simmons dalam (Todaro & Smith, 2013) juga memberikan sketsa bagaimana faktor pendidikan juga mempengaruhi upaya peningkatan tingkat kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Disini Jhon Simmons mengungkapkan bagaimana beratnya tantangan yang dihadapi miskin ketika mereka mengenyam pendidikan. Pelaksanaan pendidikan itu bisa berlangsung dalam keluarga, lembaga formal dan di dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

1. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung dalam lembaga formal yang diatur secara bertingkat dan terus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Pendidikan Non formal adalah pendidikan yang peroleh melalui kursus-kursus atau pelatihan.

3. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang didalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di dalam lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian tersebut bahwa pendidikan merupakan suatu strategi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan peranan pendidikan itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar peluang baginya untuk mencapai kemajuan dimasa yang akan datang.

Indikator tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah. Standar pendidikan saat ini adalah sekolah wajib 12 tahun, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain itu syarat untuk melamar kerja saat ini rata-rata standar pendidikan yang digunakan setiap lembaga atau perusahaan adalah tamat SLTA. Sehingga SDM yang berumur 20 tahun minimal sudah menamatkan sekolahnya di jenjang SLTA akan lebih mudah mencari pekerjaan.

2.1.7 Investasi

Investasi juga diartikan sebagai membelanjakan sejumlah uang pada investor atau pengusaha untuk mengumpulkan uang untuk kegiatan produktif guna menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dihasilkan dari pendapatan dan investasi yang secara langsung atau tidak langsung disimpan oleh banyak pihak untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan di masa depan. Investasi berarti ekspansi bisnis atau pengeluaran untuk peralatan baru, meningkatkan persediaan (Mankiw, 2013).

Gambaran pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan alokasi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan ini, jenis investasi swasta dan pemerintah perlu dipisahkan, dan faktor-faktor yang menentukan posisi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama.

Investasi menurut sumbernya terbagi atas (Mankiw, 2013):

1. Investasi Pemerintah

Investasi ini adalah investasi yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi APBD tingkat 1 dan APBD seluruh daerah tingkat 1 kabupaten dan kota madya dalam satu provinsi.

2. Investasi Non pemerintahan atau investasi swasta.

Yang dimaksud investasi ini adalah investasi yang berasal dari : 1) Tabungan rumah tangga. 2) Tabungan perusahaan negara atau daerah yang ditanam kembali. 3) Keredit investasi. 4) Terutama berasal dari pekereditan dalam rangka penanaman modal asing.

Secara garis besar ada dua bentuk investasi yaitu langsung (*direct investment*) dan tidak langsung (*indirect investment*) atau portofolio investment (Mankiw, 2013).

- a. Investasi juga diartikan sebagai membelanjakan sejumlah uang pada investor atau pengusaha untuk mengumpulkan uang untuk kegiatan produktif guna menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dihasilkan dari pendapatan dan investasi yang secara langsung atau tidak langsung disimpan oleh banyak pihak untuk meningkatkan produksi dan

meningkatkan pendapatan di masa depan. Investasi berarti ekspansi bisnis atau pengeluaran untuk peralatan baru, meningkatkan persediaan (Mankiw, 2007). Gambaran pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan alokasi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan ini, jenis investasi swasta dan pemerintah perlu dipisahkan, dan faktor-faktor yang menentukan posisi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama.

- b. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan pada kegiatan transaksi pasar modal dan di pasar uang (*money exchange*).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi belanja modal di dunia nyata. Baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Stabilitas politik, gaya kepemimpinan nasional dan kondisi sosial turut menentukan keputusan investasi investor. Investor tidak berinvestasi di negara dengan kekacauan politik atau gaya kepemimpinan yang mengejutkan investor. Oleh karena itu, para ekonom sepakat bahwa investasi merupakan indikator ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan dan kondisi sosial ekonomi.

Beberapa faktor yang menentukan tingkat investasi dalam perekonomian yaitu (Mankiw, 2137) :

1. Tingkat Bunga

Tingkat investasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Saat suku bunga naik, tingkat investasi menurun. Ini karena suku bunga tinggi meningkatkan profitabilitas modal dalam bentuk tabungan atau deposito.

2. *Marginal Efficiency Of Capital (MEC)*

Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh efisiensi marginal modal, investasi dapat dilakukan ketika CEM lebih tinggi dari suku bunga, dan sebaliknya, investasi tidak dapat dilakukan ketika CEM lebih rendah dari suku bunga.

3. Peningkatan Aktifitas Perekonomian

Jika tingkat perekonomian suatu negara mengalami peningkatan pada masa yang akan datang walaupun tingkat suku bunga lebih besar dari pada MEC, kemungkinan investasi akan tetap dilakukan oleh investor yang pemikirannya tajam dalam melihat peluang untuk dapat meraih keuntungan.

Hambatan yang dialami investor dalam berinvestasi (Mankiw, 20013):

1. Kondisi Pasar yang Kurang Baik

Salah satu kendala yang mungkin dihadapi investor saat berinvestasi adalah kendala pemasaran yang sulit dan prospek masa depan yang tidak menguntungkan. Ini umumnya ditandai dengan pasar yang lesu. Beberapa penyebab kemacetan dalam bentuk pemasaran yang sulit antara lain:

- a) Komoditas yang diproduksi dan diperdagangkan tidak umum di pasar.
Artinya, itu tidak perlu. perbandingan.
 - b) Perekonomian nasional sedang mengalami resesi akibat krisis keuangan.
 - c) Kemasan produk kurang bagus sehingga kurang diminati konsumen.
kembali.
 - d) Layanan yang diberikan tidak memuaskan konsumen.
 - e) Harga produk terlalu tinggi untuk harga produk sejenis pesaing.
- ### 2. Kemanan wilayah yang buruk

Adapun hambatan lainnya yang mungkin dihadapi investor saat berinvestasi adalah masalah keamanan berisiko tinggi. Seringnya protes dari penduduk lokal, meminta seluruh penduduk lokal untuk mempekerjakan staf, apapun kualitasnya, atau meminta biaya tambahan / fee untuk daerah tersebut seringkali merupakan indikasi situasi keamanan, resiko. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keamanan menjadi riskan antara lain (Mankiw, 2013):

- a. Kurangnya pemahaman publik tentang mekanisme perekrutan pekerja baru di pabrik. Filter jenis ini ditujukan untuk memberikan tenaga kerja yang baik ke pabrik..
- b. Kuarang pedulinya pabrik terhadap kesejahteraan masyarakat setempat sehingga memicu etrjadinya kesenjangan sosial.

3. Biaya Produksi yang Tinggi

Masalah lain yang mungkin dihadapi investor saat berinvestasi adalah biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi yang tinggi berdampak signifikan terhadap tingginya harga produk dan secara langsung mempengaruhi kesulitan pemasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya produksi yang tinggi mengarah pada “hukum hasil yang semakin berkurang”, dan bahkan jika pendapatan meningkat karena alat produksi yang tidak efisien dan kekurangan tenaga kerja, biaya produksi akan naik. Perusahaan tidak. Proporsional terhadap pengeluaran (Mankiw, 2013).

4. Persaingan yang Tidak Sehat

Masalah lain yang sama berbahayanya dengan masalah lain yang dapat dihadapi investor ketika berinvestasi adalah persaingan tidak sehat antar pengusaha. Ini sering ditandai dengan adanya rumor dan serangan provokatif terhadap satu atau

lebih pengusaha. Hal ini dikarenakan penulis memilih persaingan tidak sehat karena tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dan tidak dapat bersaing secara sehat.

2.1.8 Ekspor netto

Ekspor netto adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara biasa disebut ekspor bersih (Ibrahim, 2016). Ekspor netto (*net export*) adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang di impor dari negara lain (Mankiw, 2013). Ekspor netto bernilai positif ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor dan negatif ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Ekspor netto menunjukkan pengeluaran netto dari luar negeri atas barang dan jasa kita, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik. Karena barang dan jasa yang di impor dari luar negeri bukanlah bagian dari output suatu negara, maka persamaan ini harus dikurangi dengan pengeluaran untuk impor. Dengan mendefinisikan ekspor netto (*net exports*) sebagai ekspor dikurang impor.

Nama lain dari ekspor netto adalah neraca perdagangan (*trade balanced*), karena menunjukkan bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor. Dornbusch et al., (2008) menyatakan bahwa surplus perdagangan adalah suatu keadaan di mana nilai ekspor melebihi nilai impor barang, yang disebut sebagai neraca perdagangan yang menguntungkan. Lalu yang disebut dengan defisit perdagangan adalah nilai impor melebihi nilai ekspor barang, biasa di sebut sebagai neraca perdagangan yang tidak menguntungkan. Namun para ekonom berpendapat bahwa kadang-kadang defisit perdagangan secara ekonomi menguntungkan bagi negara yang memerlukan pemasukan modal asing.

Ekspor netto adalah selisih antara total nilai ekspor dan total nilai impor suatu negara dalam periode tertentu. Jika nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, maka negara tersebut memiliki ekspor netto positif, yang menunjukkan bahwa negara tersebut menjual lebih banyak barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan dengan yang dibeli dari luar negeri. Sebaliknya, jika nilai impor lebih tinggi, maka negara mengalami ekspor netto negatif. Ekspor netto merupakan indikator penting dalam neraca perdagangan dan mencerminkan posisi ekonomi suatu negara di pasar global.

2.1.9 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut model Rostow dan Musgrave (dijelaskan bahwa model belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan, produktivitas meningkat, inovasi lebih berkembang, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru juga meningkat (Johar, 2023).

Investasi, baik dari sektor domestik maupun asing (Foreign Direct Investment/FDI), adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Investasi

meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan (Fatihudin, 2016).

Ekspor netto yang positif berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara meningkatkan ekspor, pendapatan nasional akan meningkat, yang selanjutnya dapat mendorong investasi dan konsumsi. Sektor-sektor yang mengandalkan ekspor seringkali mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor lainnya, sehingga meningkatkan keseluruhan kinerja ekonomi. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang berkelanjutan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri dan inovasi (Permatasari et al., 2024).

2.1.10 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto dengan Tingkat Kemiskinan

Belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Belanja modal, khususnya dalam infrastruktur, membuka akses ke layanan dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Infrastruktur yang baik juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka (Amami & Asmara, 2022).

Pendidikan berperan penting dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, individu dari kelompok berpenghasilan rendah dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup

mereka. Pendidikan yang berkualitas juga mendorong mobilitas sosial dan memutus lingkaran kemiskinan antar generasi (Eka Suputra & Martini Dewi, 2015).

Investasi dalam ekonomi, baik domestik maupun asing, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Investasi juga mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti manufaktur dan jasa, yang menyediakan peluang kerja dengan upah yang lebih baik (Hodijah, 2017).

Ekspor netto yang positif, di mana nilai ekspor lebih besar daripada impor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika sektor ekspor berkembang, lapangan kerja di sektor terkait meningkat, yang pada gilirannya membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang sering bergantung pada sektor pertanian atau industri manufaktur ekspor. Secara keseluruhan, keempat faktor ini memiliki dampak yang saling terkait dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan (Ismi, 2019).

2.1.11 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto dengan Tingkat Pengangguran

Keynes menyatakan bahwa penyebab terjadinya pengangguran, satu di antaranya terkait dengan penggunaan kapital sehingga masalah ketenagakerjaan tergantung pada jumlah pengeluaran (*total expenditure*). Menurut Keynes, pengangguran tidak dapat dihapuskan tetapi dapat dikurangi. Pengurangan pengangguran dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja dan untuk

memperluas kesempatan kerja diperlukan modal, modal yang diperlukan adalah belanja modal (Fahira et al., 2023).

Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi pengangguran, karena semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang baik mempersiapkan individu untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga mengurangi pengangguran struktural akibat ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri (Johar, 2023).

Investasi yang ditujukan pada pengembangan infrastruktur, sektor industri, dan teknologi menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam proses konstruksi maupun operasionalnya. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar kerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, investasi dalam sektor kewirausahaan mendorong munculnya bisnis baru yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi pemilik usaha tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, investasi yang tepat dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi (Hidayah & Aji, 2022).

Ekspor netto yang positif, di mana nilai ekspor lebih besar daripada impor, menandakan bahwa produksi domestik meningkat untuk memenuhi permintaan global. Hal ini mendorong ekspansi sektor-sektor produksi, terutama di industri manufaktur dan pertanian, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga membantu menurunkan pengangguran. Secara keseluruhan, keempat faktor ini

berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan tingkat pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja (Pramesti, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengkajian atas hasil – hasil penelitian sebelumnya akan sangat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Selain itu, dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti. Oleh karena itu di bagian berikut akan diterangkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. (Mustika et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di pulau Sumatera dan Jawa dan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) PDRB, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera dan Jawa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan multiple analisis regresi menggunakan data panel dengan objek penelitian provinsi pada pulau sumatera dan jawa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Pulau Sumatera variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan kemiskinan berpengaruh positif

berdampak pada ketimpangan. TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Jumlah penduduk tidak signifikan terhadap kemiskinan dan ketidaksamaan. Sedangkan hasil regresi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan ketidaksamaan. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan. TPT punya berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

2. (Mustika & Nurjanah, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Rural and urban poverty models on Sumatra Island*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan pedesaan dan perkotaan di Pulau Sumatera, Indonesia, dan faktor-faktor penentunya. Variabel yang diuji dalam model adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan pengeluaran per kapita. Data yang digunakan adalah data panel provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2011 -2019. Alat analisisnya menggunakan model regresi data panel. Hasil kajian menemukan bahwa selama periode 2011-2019, angka kemiskinan pedesaan di Pulau Sumatera sebesar 11,68 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 9,22 persen. Indeks kesenjangan kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan juga relatif lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan dipengaruhi secara signifikan oleh IPM,

sedangkan PDRB dan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh secara signifikan.

3. (Mustika et al., 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Ekspor ke Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Pengangguran di Indonesia Periode 1993 sampai 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Nilai Ekspor ke Jepang, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia, selama periode tahun 1993 sampai tahun 2013 dan menganalisis pengaruh Nilai Ekspor ke Jepang terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesiaselama periode tahun 1993 sampai 2013. Perkembangan nilai ekspor ke jepang selama periode 1993 sampai 2013 mengalami fluktuasi atau naik turun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,31% dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 38,79% dan pertumbuhan terendah sebesar 33,04% Yakni pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi selama periode 1993 sampai 2013 juga berfluktuasi naik turun dengan rata-rata 4,7% dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1995 yakni 8,2% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 yakni -13,1%, sementara jumlah pengangguran di Indonesia selama periode 1993 sampai 2013 juga berfluktuasi dengan rata-rata 8,32% dengan pertumbuhan pengangguran tertinggi pada tahun 1995 yakni 67,2% dan pertumbuhan pengangguran terendah pada tahun 2007 sebesar -8,42%. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai ekspor ke jepang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, sementara hasil lainnya menunjukkan bahwa nilai ekspor ke Jepang berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia.

4. Olasunkanmi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Effect of Capital Expenditure on Unemployment Rate in Nigeria*. Studi ini menyelidiki pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran di Nigeria 1981 hingga 2020. Data untuk penelitian ini diperoleh dari Statistik Bank Sentral Nigeria Buletin dan Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia. Beberapa tes diagnostik telah dilakukan untuk menilai hubungan antar variabel, termasuk deskriptif, korelasi analisis, uji akar unit, uji kointegrasi Johansen, dan pendekatan error Correction Model (ECM). Hasil uji unit root dan kointegrasi Johansen mengarah pada penggunaan pendekatan ECM untuk mengetahui dampak belanja modal terhadap tingkat pengangguran di Nigeria. Ketergantungan Variabelnya adalah tingkat pengangguran, dan variabel penjelasnya adalah belanja modal, pajak pendapatan, angkatan kerja, kompensasi pekerja, pembentukan modal bruto, produk domestik bruto dan impor barang dan jasa. Temuan mengungkapkan bahwa empat dari tujuh penjelasan variabel-variabel tersebut signifikan secara statistik, dengan belanja modal dan pembentukan modal bruto dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Nigeria. Sebaliknya, angkatan kerja dan produk domestik bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Ruang belajar merekomendasikan agar pemerintah Nigeria meningkatkan belanja modalnya untuk menghasilkan

lebih banyak belanja modal, kesempatan kerja, yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pemerintah harus hati-hati memantau alokasi belanja modal sektor produktif yang akan mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pinem et al., (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Profit Sharing Fund, Export Value, Capital Expenditure Investment in Economic Growth and Unemployment in East Kalimantan*. Penelitian ini membahas Untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil, Nilai Ekspor Terhadap Perekonomian Pertumbuhan, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Investasi terhadap pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan analisis data menggunakan analisis jalur. Dana Bagi Hasil, Nilai Ekspor, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Dana Bagi Hasil, Nilai Ekspor, Belanja Modal dan Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di wilayah Timur Provinsi Kalimantan. dana bagi hasil, nilai ekspor, belanja modal dan investasi mempunyai pengaruh tidak langsung pengaruhnya terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sinha, (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *How Far Unemployment Affected By Capital Expenditure & Growth During Post Economic Reform Period In India*. Studi ini mengkaji dampak pengeluaran pemerintah, dipilah

menjadi belanja modal dan belanja berulang, dan belanja swasta investasi terhadap tingkat pengangguran di India dan dampaknya terhadap perekonomian pembangunan pasca reformasi ekonomi periode 1990-2021, berdasarkan model yang mengasumsikan pengangguran sebagai fungsi pengeluaran pemerintah yang dipisahkan modal dan belanja rutin, tingkat pertumbuhan PDB riil, Pembentukan Modal Bruto sebagai persentase PDB riil, dan investasi swasta. Uji stasioner deret waktu digunakan dalam penelitian ini diselidiki melalui penerapan Augmented Tes Dickey-Fuller (ADF). Belanja modal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, menjadi katalisator pengurangan rasa tidak enak pengangguran, sementara belanja rutin tidak secara statistik cukup kuat untuk melakukan hal yang sama.

7. (Ngiik et al., 2021) dalam pnelitiannya yang berjudul *Impact of Government Expenditure, Exchange Rate and Unemployment Rate on Economic Growth of Malaysia*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah, nilai tukar dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dari tahun 1988 hingga 2017. Semua variabel dalam model dikointegrasikan dengan dua vektor kointegrasi dan menyiratkan hal itu hubungan jangka panjang ada. Kausalitas Granger berdasarkan Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM) mengungkapkan kausalitas jangka pendek searah dari pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, pengangguran terhadap nilai tukar dan pengangguran

terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan seperti kebijakan fiskal dan nilai tukar kebijakan perlu diterapkan oleh pembuat kebijakan di Malaysia untuk memastikan pemberdayaan ekonomi pertumbuhan.

8. (Sese & Ebisine, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure On Education And Unemployment Rate In Nigeria*. Studi ini mengevaluasi dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap pengangguran di Nigeria dari tahun 1981–2019. Data bersumber dari Buletin Statistik Bank Sentral Nigeria dan bank data Bank Dunia. Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan berbagai uji statistik signifikansi digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah (GXE) bersama dengan tingkat melek huruf (LTR), belanja pemerintah untuk administrasi (GXA) dan belanja modal pemerintah mengurangi pengangguran di Nigeria. Adjusted R² sebesar 0,647470, hal ini menunjukkan kesesuaian yang baik dan hasilnya signifikan secara statistik. Secara teoritis, semua variabel sesuai dengan ekspektasi teoritis kami. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, angka melek huruf, biaya administrasi pemerintahan dan belanja modal pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap pengangguran seperti yang diharapkan. Berdasarkan temuan-temuan ini, studi ini merekomendasikan agar pengeluaran pemerintah federal dan negara bagian untuk pendidikan harus disalurkan untuk mengurangi pengangguran seperti yang ditunjukkan pada hasil empiris. Selain itu, pemerintah di semua

tingkatan (federal, negara bagian dan lokal) harus mendirikan pusat perolehan keterampilan di samping pengeluarannya untuk pendidikan. Hal ini akan meningkatkan tingkat melek huruf di negara tersebut dan mengurangi tingkat pengangguran di Nigeria.

9. (Amar et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Determination of Poverty, Unemployment, Economic Growth, and Investment in West Sumatra Province*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan, pengangguran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam sistem persamaan simultan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi ini penting untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan pengangguran serta bagaimana caranya investasi dan pertumbuhan ekonomi berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data panel dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Estimasi Teknik yang digunakan adalah persamaan simultan dengan menggunakan beberapa uji asumsi klasik seperti normalitas, uji heteroskedastisitas multikolinearitas, dan uji kausalitas Granger. Hasil dari ini Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mempunyai berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat, 2) Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat, 3) Pengangguran, investasi, kemiskinan, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Sumatera Barat, 4) Pertumbuhan ekonomi, upah, dan pajak berpengaruh signifikan terhadap investasi di Sumatera Barat.

10. (Aluthge et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria, 1970-2019*. Studi ini menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah Nigeria (dipilah menjadi modal dan berulang) terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan data seri waktu untuk periode 1970-2019. Makalah ini menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Untuk memastikan hasil yang kokoh, studi ini memperhitungkan kerusakan struktural dalam uji akar unit dan analisis kointegrasi. Temuan utama dari studi ini adalah belanja modal mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan belanja rutin tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan porsi belanja modal terutama pada proyek-proyek penting yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memperbaiki pola belanja rutin melalui realokasi sumber daya secara hati-hati menuju kegiatan produktif yang akan meningkatkan pembangunan manusia di negara tersebut.

11. (Nwamuo, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Government Expenditure and Unemployment Rate in Nigeria: An Empirical Analysis*. Studi ini menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah terhadap

pengangguran tingkat di Nigeria. Data deret waktu dari tahun 1991 hingga 2020 yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buletin statistik Bank Sentral Nigeria (CBN) dan Indikator Pembangunan Dunia (WDI). Pengujian batas ARDL Pendekatan kointegrasi digunakan untuk menganalisis data. Autoregresif Model Distributed Lag (ARDL) dan Error Correction Model (ECM) digunakan untuk mengatasi tujuan utama penelitian. Estimasi koefisien jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran sementara pengeluaran rutin dan kredit ke sektor swasta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Koefisien menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja berulang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Hasilnya juga menunjukkan hal itu belanja modal signifikan secara statistik sedangkan belanja rutin tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kredit kepada sektor swasta mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

12. Penelitian yang dilakukan (Fajri, 2017) yang berjudul Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan belanja modal di provinsi-provinsi di Sumatera serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju perkembangan belanja modal tertinggi dicatat oleh Provinsi Lampung, mencapai 41%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bangka Belitung yang masing-

masing memiliki perkembangan sebesar 18%. Sebaliknya, Provinsi Aceh mengalami perkembangan belanja modal terendah dengan angka -4%. Meskipun belanja modal mengalami variasi antar provinsi, penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengalokasian belanja modal masih kurang tepat dan belum efektif dalam mendorong peningkatan permintaan produksi daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi alokasi belanja modal yang lebih efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

13. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2023) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta. Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan di 12 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada periode 2016-2020. Metode analisis yang diterapkan adalah Analisis Jalur dengan pendekatan Parsial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sebaliknya, Belanja Modal terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Pertumbuhan Ekonomi juga menunjukkan pengaruh positif, namun tidak signifikan,

terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen keuangan, memberikan wawasan bagi akademisi dan mahasiswa, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai analisis PAD, belanja modal dan ekspor netto dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

14. (Meida & Susilo, 2024) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh PAD, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2022. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linier berganda, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS), DJPK Kemenkeu, serta publikasi terkait. Penelitian ini menggunakan data panel, yang menggabungkan data time series dari tahun anggaran 2018-2022 dan data cross section dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan PAD berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal saat ini belum efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pertumbuhan

Ekonomi, di sisi lain, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

15. (Permatasari et al., 2024) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ekspor dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008-2022. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa data times series yang terdiri dari data ekspor, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tahun 2008-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji t variabel ekspor secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tahun 2008-2022. Sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur tahun 2008-2022. Selanjutnya hasil uji signifikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) di Kalimantan Timur tahun 2008-2022. Berdasarkan uji koefisien, ekspor dan pengangguran memiliki pengaruh sebesar 48,2% terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan sisanya sebesar 51,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

16. Penelitian yang dilakukan (Lubis & Handayani, 2024) yang berjudul Pengaruh Inflasi Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang berasal dari data Badan Pusat Statistik Kota Medan yaitu data Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013-2022 dengan menggunakan aplikasi eviews 10. Penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang variabel PE, INF dan PAD PE direspon positif dalam jangka pendek dan jangka panjang oleh PE sendiri, direspon negatif dalam jangka menengah dan jangka panjang oleh INF. Namun direspon positif dalam jangka menengah oleh PAD tetapi dalam jangka panjang direspon negatif. INF direspon positif dalam jangka pendek dan jangka panjang oleh INF dan PE, tetapi direspon negatif dalam jangka menengah dan jangka panjang oleh PAD. PAD direspon positif dalam jangka pendek dan jangka panjang oleh PE, direspon positif dalam jangka panjang oleh PAD namun direspon negatif dalam jangka pendek, menengah dan panjang oleh INF.

17. (Hidayah & Aji, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh inflasi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dalam hasil penelitian ini menghasilkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, sedangkan investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia

2.3 Kerangka Pemikiran

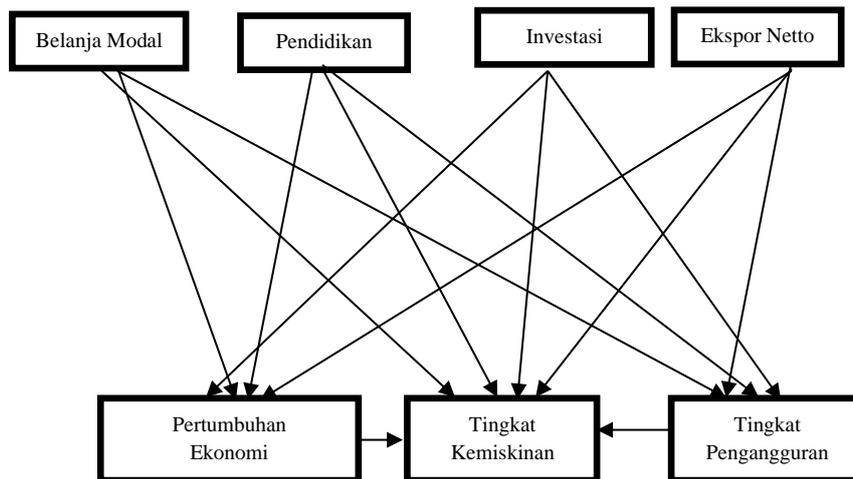
Belanja modal, investasi, pendidikan, dan ekspor netto adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Sumatera. Belanja modal mengacu pada pengeluaran pemerintah atau swasta untuk aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan. Di Sumatera, belanja modal yang signifikan pada infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, dll.) dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memperlancar arus barang dan jasa. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya produksi, serta menciptakan lapangan kerja yang berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, belanja modal yang diarahkan ke sektor-sektor strategis dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dengan memperbaiki akses masyarakat ke layanan dasar dan kesempatan kerja.

Investasi, baik domestik maupun asing, memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Sumatera, investasi di sektor-sektor seperti

manufaktur, pertanian, dan energi dapat mempercepat perkembangan industri lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah pendapatan daerah. Tingkat investasi yang tinggi biasanya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, distribusi investasi yang merata sangat penting untuk memastikan manfaatnya terasa di seluruh daerah, terutama di wilayah yang lebih tertinggal.

Pendidikan yang baik adalah fondasi bagi peningkatan kualitas tenaga kerja. Di Sumatera, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah tersebut. Pendidikan yang lebih baik akan menurunkan tingkat pengangguran karena masyarakat yang lebih terampil memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, peningkatan pendidikan juga berdampak pada pengurangan kemiskinan, karena masyarakat yang terdidik cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik ke peluang ekonomi.

Ekspor netto (perbedaan antara ekspor dan impor) juga menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di Sumatera, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, peningkatan ekspor produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil tambang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang kuat akan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor terkait ekspor. Jika Sumatera dapat menjaga ekspor netto yang positif, hal ini akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan, pada jangka panjang, mengurangi kemiskinan.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan pada BAB II diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagai berikut :

1. Diduga belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
2. Diduga belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera.
3. Diduga belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses ini mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan suatu negara sebaiknya difokuskan pada tiga aspek utama: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar, memperbaiki standar hidup masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan social (Todaro & Smith, 2013).

Permasalahan ekonomi makro mencakup rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran. Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat menghambat kemajuan suatu negara (Mankiw, 2013). Keberhasilan perkembangan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak *multiplier* yang besar terhadap banyak aspek ekonomi dan sosial masyarakat, terutama terhadap beberapa permasalahan sosial misalnya kemiskinan, dan pengangguran (Prawoto, 2021).

Berdasarkan pernyataan Ernawati (2024) pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai sejauh mana sebuah aktivitas suatu perekonomiannya yang telah mampu menghasilkan suatu tambahan pendapatan seorang masyarakat dalam suatu periode yang tertentu. Dapat juga dinyatakan bahwa terdapat sebuah perekonomian yang terus tumbuh maka terdapat kesempatan kerja, pengurangan

tingkat dalam kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, dan termasuk sebuah pendidikan yang akan menjadi baik (Astuti & Mispityanti, 2019). Negara yang telah mempunyai sebuah pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu merupakan seorang masyarakatnya yang telah berada di negara tersebut yang sudah dapat memenuhi suatu kebutuhan dasarnya dan bahkan juga mampu mendapatkan sebuah kesejahteraannya (Prawoto, 2021).

Masalah kemiskinan menjadi hal yang sangat serius dan menjadi masalah bagi daerah yang kondisi perekonomiannya tertinggal jauh. Dimana strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan suatu realita yakni kemiskinan yang tampak jelas (Adawiyah, 2020). Pada saat seseorang dengan produksi rendah maka, pendapatan akan rendah pula, dengan begitu akan masuklah kedalam satu posisi dikatakan kemiskinan (Yunanto, 2015). Harus ada solusi atau kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang di buat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan dengan terpadu dan menyeluruh (Kuncoro, 2012).

Salah satu visi pembangunan nasional adalah mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat dan misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dengan salah satu sasaran pokok menurunkan jumlah pengangguran. Sukirno (2013) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan.

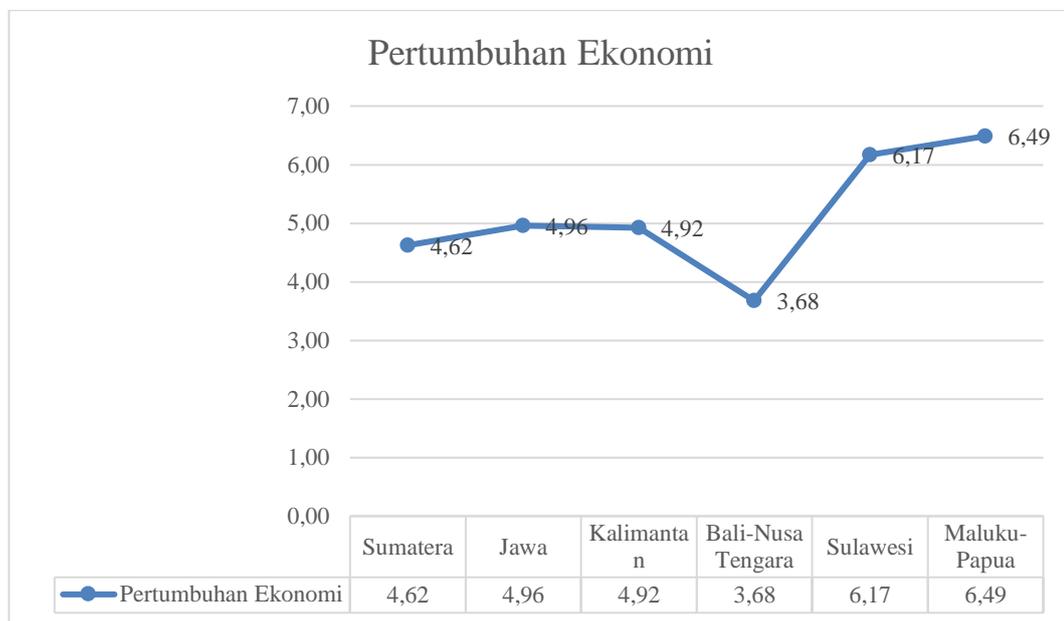
Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2019) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah et al., 2023) bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Apriliansah, 2024) bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2024) bahwa ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amami & Asmara, 2022) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Faisal, 2021) bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nisa et al., 2023) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adisti, 2010) bahwa ekspor netto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fahira et al., 2023) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2023) bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Sinha, (2022) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti, 2023) bahwa ekspor netto berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

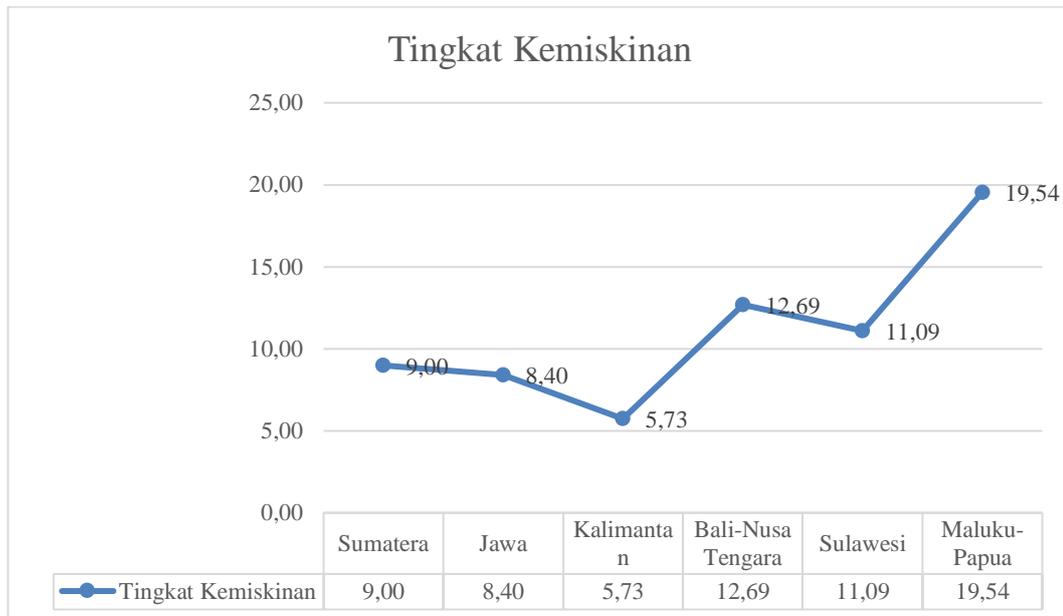


Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Per-Pulau di Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Sumatera mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%, diikuti oleh Jawa dengan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 4,96%. Kalimantan berada sedikit di bawah Jawa dengan pertumbuhan 4,92%. Sementara itu, wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di antara semua wilayah yang tercantum, yaitu 3,68%. Sulawesi menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan angka 6,17%, dan puncaknya terjadi di wilayah Maluku-Papua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 6,49%. Grafik ini menggambarkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dengan beberapa wilayah seperti Sulawesi dan Maluku-Papua mengalami akselerasi yang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan, salah satu permasalahan utama di Sumatera adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%, Sumatera tertinggal dari wilayah seperti Sulawesi (6,17%) dan Maluku-Papua (6,49%). Ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera mengalami perkembangan yang lebih lambat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum merata, ketergantungan pada sektor-sektor tradisional (perkebunan dan pertambangan), serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor industri baru dan modern. Kondisi ini juga bisa mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah di pulau ini, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh krisis multi dimensional yang melanda seluruh Indonesia akibat dari krisis keuangan global. Walaupun terjadi fluktuatif, namun masih menempatkan Sumatera dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah Pulau Kalimantan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera kemungkinan juga berkaitan dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.



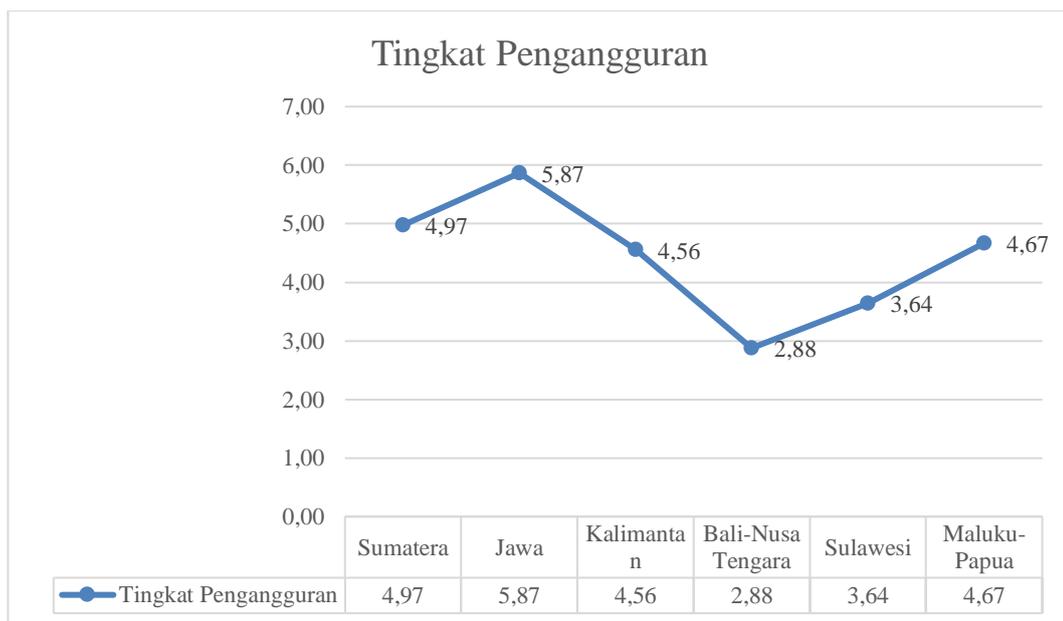
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Grafik di atas menunjukkan perbandingan tingkat kemiskinan di enam wilayah utama Indonesia. Sumatera memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,00%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa dengan 8,40%. Kalimantan menempati posisi terendah dengan tingkat kemiskinan hanya 5,73%. Namun, Bali-Nusa Tenggara mencatat kenaikan signifikan hingga 12,69%, lebih tinggi dari Sumatera dan Jawa. Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan 11,09%, sementara wilayah Maluku-Papua menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,54%. Perbedaan ini mencerminkan variasi kondisi sosial-ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, dengan beberapa wilayah menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain.

Permasalahan kemiskinan di Sumatera, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,00%, mencerminkan tantangan yang signifikan dalam konteks sosial-ekonomi.

Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah seperti Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi, masih terdapat populasi yang rentan dan terpinggirkan. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan yang tidak memadai, dan infrastruktur yang kurang berkembang menjadi kontributor utama terhadap permasalahan ini. Selain itu, ketidakmerataan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi di berbagai daerah di Sumatera dapat memperburuk kondisi masyarakat, sehingga perlu adanya intervensi strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung program-program pemberdayaan yang lebih inklusif. Dengan langkah yang tepat, diharapkan tingkat kemiskinan di Sumatera dapat ditekan lebih lanjut dan kualitas hidup masyarakat meningkat.



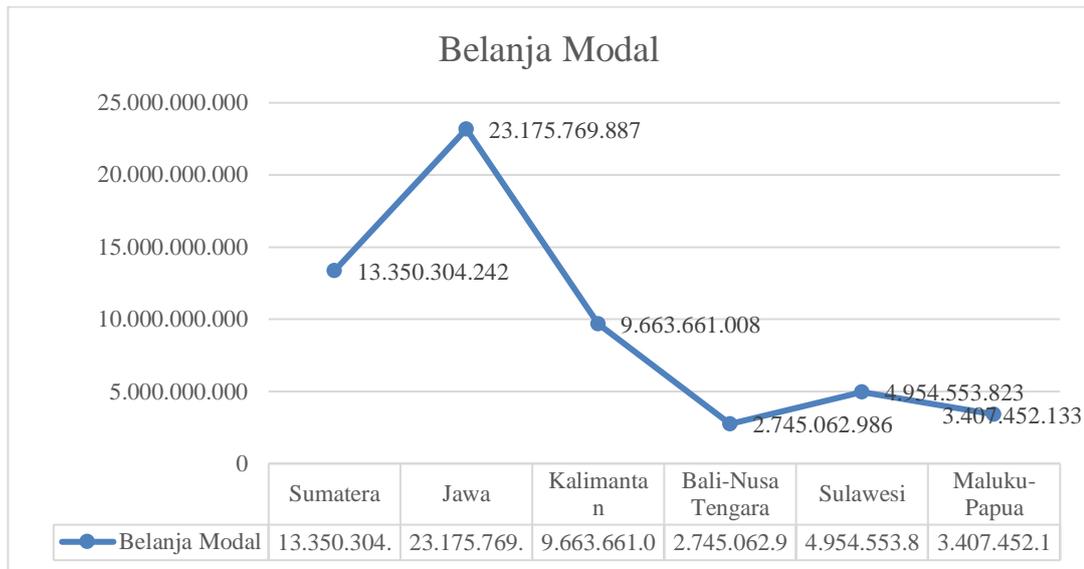
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar tingkat pengangguran tahun 2013 di pulau besar Indonesia, dapat dilihat dalam lingkup yang lebih kecil persentase tingkat pengangguran antarpulau tidak sama atau masih terdapat disparitas antarwilayah. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Pulau Jawa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,87 persen, sementara tingkat pengangguran terendah tercatat pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 2,88 persen. Sedangkan Sumatera tingkat penganggurannya sebesar 4,97 persen, tertinggi kedua setelah Pulau Jawa.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya kemiskinan dan pengangguran di Sumatera menunjukkan kondisi makro yang buruk pada provinsi-provinsi di Sumatera. Kondisi makro yang buruk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah infrastuktur daerah dan keuangan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pemerintah di dalam menyediakan sarana infrastruktur dapat dilihat dalam realisasi belanja modal dalam APBD masing-masing provinsi pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai belanja modal, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, begitu juga sebaliknya.



Sumber : BPS (2024), data diolah

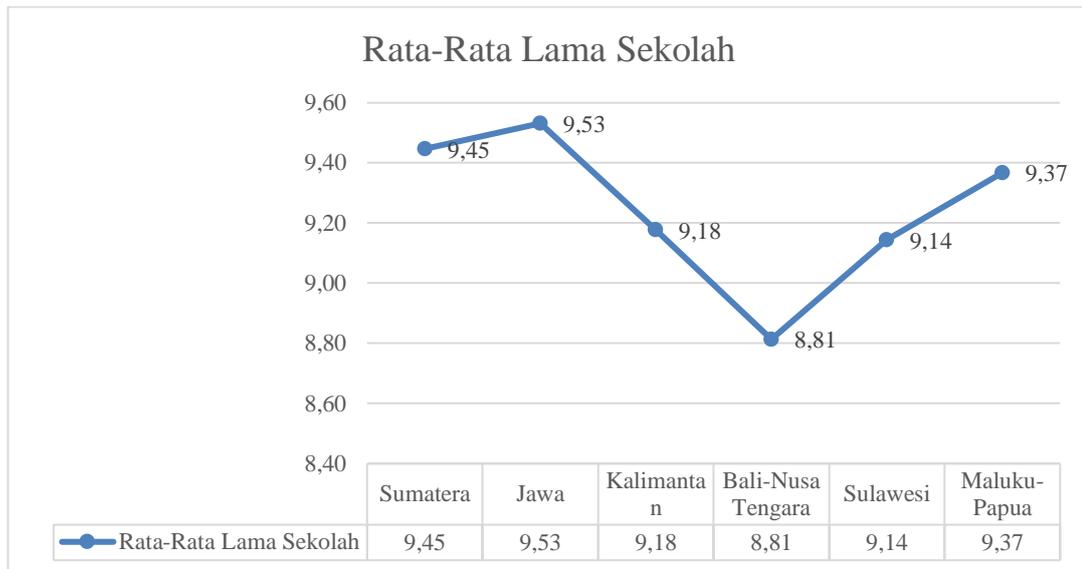
Gambar 1.4 Belanja Modal di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

Gambar 1.4 menunjukkan belanja modal di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki belanja modal tertinggi, yaitu sebesar Rp. 23.175.769.887 ribu. Hal ini jauh melampaui belanja modal di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan belanja modal sebesar Rp. 13.350.304.242 ribu. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 9.663.661.008. Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat angka terendah sebesar Rp. 2.745.062.986 ribu, diikuti oleh Maluku-Papua sebesar Rp. 3.407.452.133 ribu, dan Sulawesi sebesar 4.954.553.823 ribu.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan

yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi. Pendidikan juga meningkatkan kapasitas individu untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan di pasar tenaga kerja, sehingga mereka lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Ketika lebih banyak orang memiliki akses ke pendidikan, angka pengangguran dan ketergantungan ekonomi menurun, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Annisa & Anwar, 2021).

Selain itu, pendidikan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang berpendidikan cenderung memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan, yang menciptakan siklus positif antargenerasi. Pendidikan juga berkontribusi terhadap kesadaran akan pentingnya partisipasi sosial dan politik, yang memungkinkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu alat paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi (Vhernando et al., 2024).



Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.5 Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Tahun)

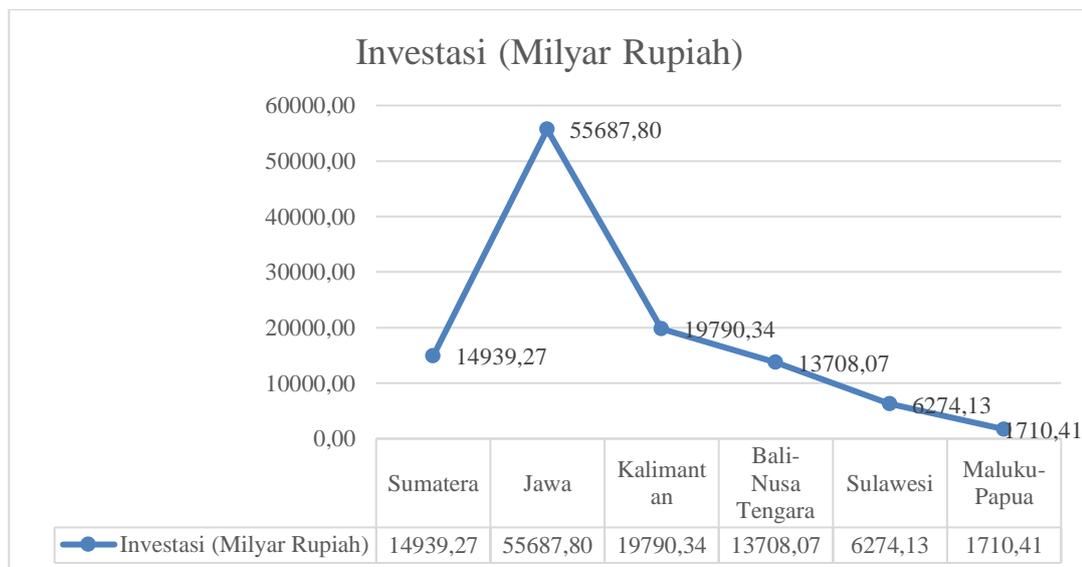
Grafik tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah di berbagai pulau besar di Indonesia. Berdasarkan data, Pulau Jawa memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 9,53 tahun, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan 9,45 tahun, dan Maluku-Papua sebesar 9,37 tahun. Pulau Kalimantan mencatatkan rata-rata sebesar 9,18 tahun, sementara Sulawesi berada di angka 9,14 tahun. Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan rata-rata lama sekolah terendah, yaitu 8,81 tahun.

Pulau Sumatera memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 9,45 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam grafik. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Sumatera rata-rata telah menempuh pendidikan hingga kelas 3 SMP atau awal kelas 1 SMA. Nilai ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Bali-Nusa Tenggara yang memiliki rata-rata lama sekolah

terendah (8,81 tahun), tetapi masih lebih rendah dari Pulau Jawa (9,53 tahun), yang memiliki angka tertinggi.

Angka ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan yang cukup baik di Sumatera, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Beberapa faktor yang memengaruhi angka rata-rata lama sekolah di Sumatera antara lain adalah akses terhadap fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman atau daerah terpencil, di mana akses ke sekolah mungkin terbatas. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan upaya dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung program wajib belajar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan untuk meningkatkan angka ini di masa depan.



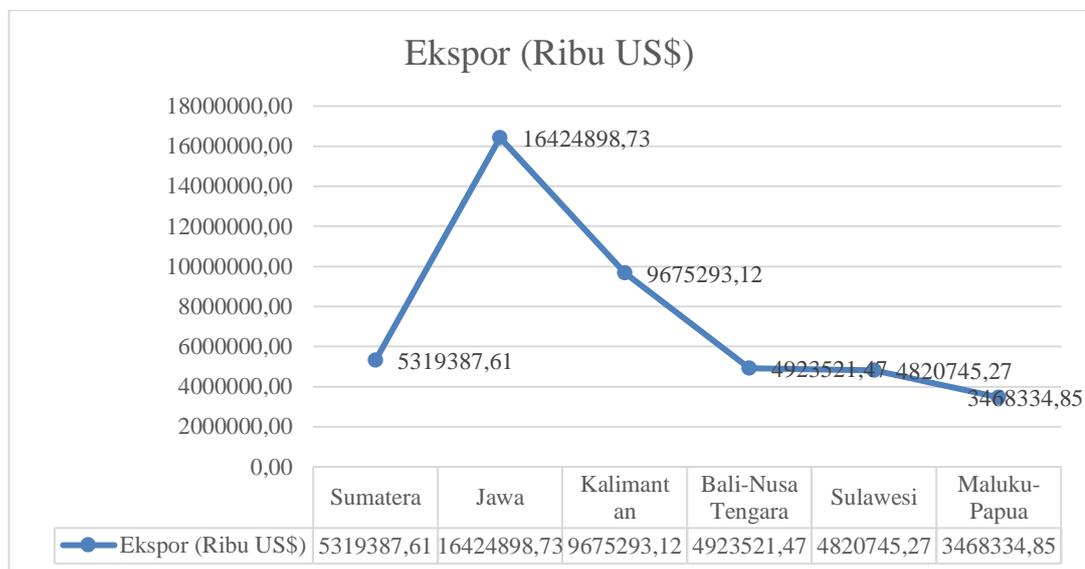
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.6 Investasi di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.6 menunjukkan investasi (penanaman modal dalam negeri) di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki investasi tertinggi, yaitu sebesar Rp. 55.687,82 miliar. Hal ini jauh melampaui investasi di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan investasi sebesar Rp. 14.939,27 miliar. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 19.790,34 miliar. Pulau Maluku-Papua mencatat angka terendah sebesar Rp.1710,41 miliar, diikuti oleh Sulawesi sebesar Rp.6.274,13 miliar, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 13.728,07 miliar.

Ekspor netto, yang merupakan selisih antara ekspor dan impor, yang diduga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Pertama, peningkatan ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, yang mendorong investasi dan konsumsi, serta mendiversifikasi sektor-sektor ekonomi, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, sektor yang berkembang melalui ekspor seringkali menarik investasi asing, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan kesempatan kerja di sektor ekspor membantu mengurangi tingkat kemiskinan, karena karyawan di sektor ini biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mendanai program-program sosial dan infrastruktur, lebih lanjut mengurangi kemiskinan. Ketiga, ekspansi sektor ekspor menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas pekerjaan serta kondisi kerja. Perusahaan yang berfokus pada ekspor seringkali berinvestasi dalam

pelatihan keterampilan, yang membantu lebih lanjut dalam mengurangi pengangguran. Secara keseluruhan, ekspor netto yang positif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.7 Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu US\$)

Gambar 1.7 menunjukkan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki Nilai Ekspor Migas dan Non Migas tertinggi, yaitu sebesar 16.424.899 Ribu US\$. Hal ini jauh melampaui Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas sebesar 5.319.388 Ribu US\$. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 9.675.293 Ribu US\$. Pulau Maluku-Papua mencatat angka terendah sebesar Rp.3.468.335 Ribu US\$, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 4.923.521 Ribu US\$ dan Sulawesi sebesar Rp.4.820.745 Ribu US\$.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa buruknya kondisi makro di wilayah Sumatera dibuktikan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya pengangguran. Sementara peranan belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto bila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan dan belanja daerah juga tidak besar. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pengaruh belanja modal, ekspor netto, pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera dalam bentuk tesis yang berjudul : “Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan makro yang terjadi di Sumatera sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi dibanding pulau besar lainnya di Indonesia menjadikan Sumatera sebagai prioritas pemerintah untuk memperbaiki kondisi makro yang buruk. Belanja modal sebagai belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi alasan dibalik buruknya kondisi makro yang terjadi di Sumatera. Begitu juga dengan pendidikan dan investasi serta ekspor netto merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera periode 2019-2023.

1.4. Manfaat penelitian

Dari penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Manfaat tersebut dapat berguna untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagai pengembangan penelitiannya. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera sehingga bisa sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TESIS	i
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.1.2. Teori Kemiskinan	23
2.1.3. Konsep Pengangguran.....	35
2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah	45
2.1.5. Belanja Modal	49
2.1.6. Pendidikan.....	54
2.1.7. Investasi.....	55
2.1.8. Ekspor netto	60
2.1.9 Keterkaitan PAD, belanja modal dan ekspor netto dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	61
2.1.10 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan.....	62
2.1.11 Keterkaitan pertumbuhan Ekomomi, Investasi dan Pendidikan dengan Tingkat Pengangguran	63
2.2. Penelitian Terdahulu	65
2.3. Kerangka Berpikir.....	79
2.4. Hipotesis.....	81
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan.....	82
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	82
3.2.1. Jenis Data	82
3.2.2. Sumber Data.....	83
3.3. Metode Analisis Data	83

3.3.1. Analisis Deskriptif.....	83
3.3.2. Analisis Regresi Data Panel	84
3.4 Operasional Variabel	90

BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Jumlah Penduduk	91
4.2. Pendapatan Asli Daerah	93
4.3. Indeks Pembangunan Manusia.....	96
4.4. Nilai Ekspor	98
4.5. Nilai Impor.....	101

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perbandingan Belanja Modal, Pendidikan, Investasi, Ekspor Netto, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Antara Wilayah Sumatera.....	105
5.1.1 Perbandingan Belanja Modal Antara Wilayah Sumatera	105
5.1.2 Perbandingan Pendidikan Antara Wilayah Sumatera.....	107
5.1.3 Perbandingan Investasi Antara Wilayah Sumatera	110
5.1.4 Perbandingan Ekspor Netto Antara Wilayah Sumatera	113
5.1.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Wilayah Sumatera.....	116
5.1.6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antara Wilayah Sumatera	119
5.1.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Antara Wilayah Sumatera.....	121
5.2. Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi Dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran.....	124
5.2.1 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera	124
5.2.1.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM).....	129
5.2.1.2 Uji Hipotesis	131
5.2.1.3 Estimasi Model REM	132
5.2.2 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera.....	137
5.2.2.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM).....	141
5.2.2.2 Uji Hipotesis	143
5.2.2.3 Estimasi Model REM	144
5.2.3 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera	148
5.2.3.1 Hasil Pengujian Estimasi Random Effects Model (REM).....	153
5.2.3.2 Uji Hipotesis	155
5.2.3.3 Estimasi Model REM	156
5.3. Analisis Ekonomi	160

5.3.1 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.....	160
5.3.2 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera	166
5.5.3 Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, Investasi dan Ekspor Netto Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera.....	170
5.4. Implikasi Kebijakan	175

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	182
6.2 Saran.....	189

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Penduduk pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023	91
Tabel 4.2	Perkembangan PAD pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Ribu).....	94
Tabel 4.3	Perkembangan IPM pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023	97
Tabel 4.4	Perkembangan Nilai Ekspor pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)	99
Tabel 4.5	Perkembangan Nilai Impor pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)	102
Tabel 5.1	Perbandingan Belanja Modal antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Ribu)	105
Tabel 5.2	Perbandingan Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Tahun).....	108
Tabel 5.3	Perbandingan Investasi (Penanaman Modal dalam Negeri) antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar).....	111
Tabel 5.4	Perbandingan Ekspor Netto antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Juta US\$)	114
Tabel 5.5	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)	116
Tabel 5.6	Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)	119
Tabel 5.7	Perbandingan Tingkat pengangguran antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Persen)	122
Tabel 5.8	Model Pooled OLS.....	125
Tabel 5.9	Fixed Effect Model (FEM).....	126
Tabel 5.10	Random Effect Model (REM).....	127
Tabel 5.11	Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM	128
Tabel 5.12	Uji Hausman untk memilih antara model FEM dengan REM.....	128
Tabel 5.13	Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara model PLS dengan REM.	129
Tabel 5.14	Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)	130
Tabel 5.15	Nilai t Statistik Pada Metode REM.....	131
Tabel 5.16	Random Effect Estimasi Model REM.....	134
Tabel 5.17	Model Pooled OLS.....	137
Tabel 5.18	Fixed Effect Model (FEM).....	138
Tabel 5.19	Random Effect Model (REM).....	139
Tabel 5.20	Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM	140
Tabel 5.21	Uji Hausman untk memilih antara model FEM dengan REM.....	140
Tabel 5.22	Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara model PLS dengan REM.	141
Tabel 5.23	Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)	142
Tabel 5.24	Nilai t Statistik Pada Metode REM.....	143
Tabel 5.25	Random Effect Estimasi Model REM.....	146
Tabel 5.26	Model Pooled OLS.....	149

Tabel 5.27 Fixed Effect Model (FEM).....	150
Tabel 5.28 Random Effect Model (REM).....	151
Tabel 5.29 Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM	152
Tabel 5.30 Uji Hausman untk memilih antara model FEM dengan REM.....	152
Tabel 5.31 Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara model PLS dengan REM.	153
Tabel 5.32 Hasil Estimasi Random Effects Model (REM)	154
Tabel 5.33 Nilai t Statistik Pada Metode REM.....	155
Tabel 5.34 Random Effect Estimasi Model REM.....	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Per-Pulau di Indonesia Tahun 2023 (Persen)	4
Gambar 1.2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)	6
Gambar 1.3	Persentase Tingkat Pengangguran di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)	7
Gambar 1.4	Belanja Modal di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu Rupiah).....	9
Gambar 1.5	Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Tahun)	11
Gambar 1.6	Investasi di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Miliar Rupiah).....	12
Gambar 1.7	Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu US\$)	14
Gambar 2.1	Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah	47
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data.....	198
Lampiran 2	Hasil Regresi Data Panel.....	200

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera periode 2019-2023, 2) mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera periode 2019-2023. Kemudian alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel.

Analisis perbandingan indikator ekonomi di provinsi-provinsi Sumatera selama 2019-2023 menunjukkan variasi signifikan dalam belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Tren belanja modal bervariasi dengan Sumatera Utara dan Riau menunjukkan pertumbuhan stabil, sementara Jambi mengalami fluktuasi ekstrem. Pendidikan meningkat di seluruh provinsi, tetapi masih terdapat kesenjangan, dengan Kepulauan Riau tertinggi dan Kepulauan Bangka Belitung terendah. Investasi PMDN tertinggi di Riau, sedangkan Lampung mencatat pertumbuhan tertinggi. Ekspor netto paling tinggi di Riau, sementara beberapa provinsi mengalami volatilitas tinggi. Pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan pasca-pandemi, dengan Jambi mencatat rata-rata tertinggi. Tingkat kemiskinan cenderung menurun tetapi masih tinggi di Aceh, sedangkan tingkat pengangguran tertinggi di Kepulauan Riau dan Aceh. Faktor-faktor seperti belanja modal, pendidikan, investasi, dan ekspor netto terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meskipun investasi tidak berdampak signifikan terhadap pengangguran.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendidikan, Investasi, Ekspor Netto, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran.

ABSTRACT

This study is entitled Comparative Study of Economic Growth, Poverty Rate and Unemployment Rate in Sumatra. This study aims to: 1) determine and analyze the comparison of capital expenditure, education, investment, net exports, economic growth, poverty rate and poverty rate between Sumatra regions for the 2019-2023 period, 2) determine and analyze the effect of capital expenditure, education, investment and net exports on economic growth, poverty rate and poverty rate in Sumatra for the 2019-2023 period. Then the analysis tool used is panel data regression.

Comparative analysis of economic indicators in the provinces of Sumatra during 2019-2023 shows significant variations in capital expenditure, education, investment, net exports, economic growth, poverty rate, and poverty rate. The trend of capital expenditure varies in North Sumatra and Riau showing stable growth, while Jambi is experiencing extreme drought. Education has increased across provinces, but there are still gaps, with the Riau Islands the highest and the Bangka Belitung Islands the lowest. PMDN investment is highest in Riau, while Lampung recorded the highest growth. The highest net exports were in Riau, while several provinces experienced high volatility. Economic growth experienced a post-pandemic recovery, with Jambi recording the highest average. Poverty rates tended to decline but were still high in Aceh, while the highest poverty rates were in the Riau Islands and Aceh. Factors such as capital expenditure, education, investment, and net exports have been shown to have a positive effect on economic growth and contribute to reducing poverty and poverty, although investment has no significant impact on poverty.

Keywords: Capital Expenditure, Education, Investment, Net Exports, Economic Growth, Poverty Rate, Unemployment Rate.